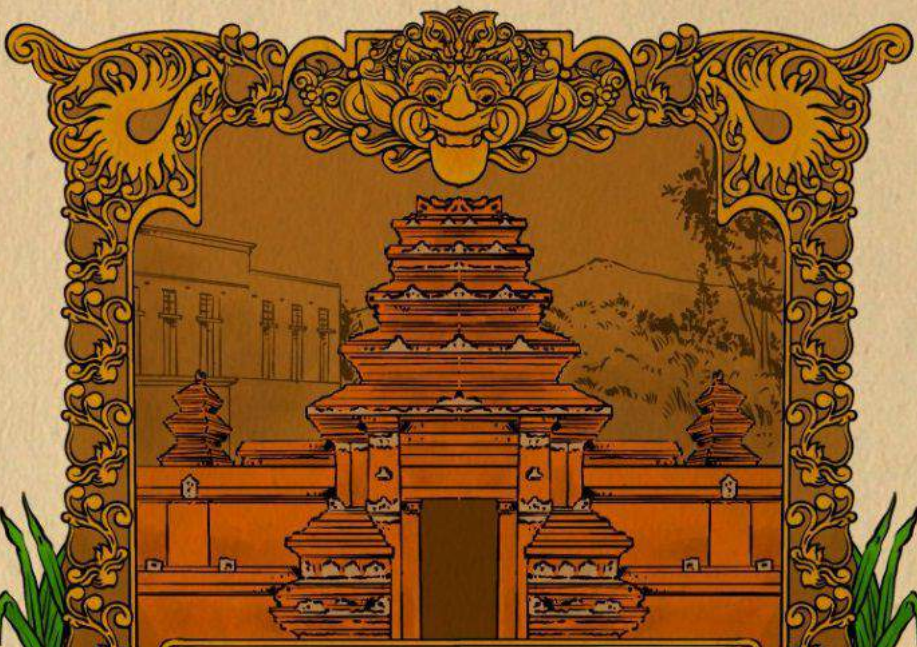

Gading Mataram:

Sejarah Bantul 1678–1942

Ahmad Athoillah | Kuncoro Hadi | Bayu Ananto Wibowo

KABUPATEN BANTUL

Gading Mataram:

Sejarah Bantul 1678-1942

Ahmad Athoillah
Kuncoro Hadi
Bayu Ananto Wibowo

Gading Mataram: Sejarah Bantul 1678–1942

Penulis
Dr. Ahmad Athoillah, M.A.
Kuncoro Hadi, S.S., M.A.
Bayu Ananto Wibowo, M.Pd.

Penanggungjawab
Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

Pengarah
Dra. Kun Ernawati, M.Si.

Koordinator
Devi Puspitasari, S.Ant., M.Sc.

Penyunting
Latief S. Nugraha

Lay Outer
Al Farisi

Ilustrator
Prihatmoko Catur Wicaksono

Fotografer
Early Danendra Putra

Surveyor
Dhita Fitria Hernawati
Rizki Dian Saputra

Sekretariat
Fanisa Fiandra Anindita, S.Hum.

Distributor
Uke Ardhian Listyo Saputro

Penerbit:
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul
Kompleks II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode pos 55714
Telepon/Fax (0274) 2810 756
Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id
laman: www.disbud.bantulkab.go.id

Cetakan Pertama, 2023
ISBN: 978-623-98569-5-3
14x20 cm; 142 halaman.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini
dalam bentuk dan dengan cara apa pun
tanpa izin dari penerbit

Buku ini tidak diperjualbelikan

Sambutan

Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Budaya!

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga Publikasi Sejarah berupa buku sejarah *Gading Mataram: Sejarah Bantul 1678 – 1942* dapat diterbitkan. Buku ini merupakan salah satu upaya pendokumentasian sejarah lokal yang merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan.

Buku ini mengisahkan tentang sejarah yang terjadi di Bantul pada 1678 hingga 1942. Berbagai peristiwa dan peninggalan sejarah digali dan dituliskan agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada di Bantul pada era setelah runtuhnya Istana Mataram di Pleret hingga sebelum pendudukan oleh Jepang. Bukan sekadar mendokumentasi-

kan sejarah dari segi sejarah administratif saja, namun buku ini juga mendokumentasikan sejarah kehidupan sosial budaya masyarakat, sejarah pendidikan, sejarah pertanian-perkebunan, sejarah sarana transportasi, dampak revolusi industri terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di Bantul, serta Bantul pada akhir masa Kolonial.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis; Dr. Ahmad Athoillah, M.A., Kuncoro Hadi, S.S., M.A., Bayu Ananto Wibowo, M.Pd., dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Kami mohon maaf, apabila masih terdapat kekurangan di dalam buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi terkait dengan sejarah lokal di Bantul.

Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bantul, November 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS
KEBUDAYAAN

Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

PENDAHULUAN

Kajian sejarah Bantul ini menarasikan berbagai peristiwa penting dan keadaan wilayah—yang pasca-Perang Jawa disebut sebagai—Bantoel Karang. Kajian dimulai dari masa runtuhnya Istana Pleret pada 1677, yang membuat wilayah bekas Istana Mataram di Pleret tidak begitu berarti. Hal tersebut karena pusat pemerintahan Mataram oleh Susuhunan Amangkurat II dipindah ke Kartasura, sebuah wilayah yang dekat dengan situs pusat Kerajaan Pajang. Meskipun demikian, daerah Mataram Selatan (sekitar bekas Istana Pleret) memiliki Imogiri dan Pantai Selatan yang bermakna dan menjadi tujuan penting bagi Mataram Kartasura.

Pada masa tersebut, wilayah yang kemudian disebut menjadi Bantul dalam buku ini merupakan 'daerah di sekitar bekas Istana Kerto dan Pleret' yang memang saat ini menjadi bagian dari Kabupaten Bantul. Pada masa pemerintahan Mataram Kartasura, daerah di sekitar bekas Istana Kerto dan Pleret sering disebut sebagai "Gading Mataram". Secara geografis, wilayah yang sebelum Perjanjian Giyanti (1755) disebut dengan Kadipaten Gading Mataram merujuk daerah sepanjang Pantai Selatan Kulon Progo dan Bantul. Dalam pengertian yang spesifik, wilayah Gading Mataram untuk daerah

yang kemudian disebut Bantul adalah daerah lembah antara Sungai Progo sampai Pantai Parangtritis yang berbatasan dengan Pegunungan Gunungkidul.

Ada beberapa daerah yang kemudian menjadi penting dalam perkembangan berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Daerah yang dimaksud adalah Ambarketawang dan Panggung Krapyak. Wilayah yang pernah menjadi bagian dari Bantul pada masa Sultan Hamengku Buwono IX (bertakhta 1940-1988), yaitu Ambarketawang pernah didirikan pesanggrahan oleh Pangeran Mangkubumi sebelum menempati Keraton Yogyakarta. Begitu juga tentang Panggung Krapyak yang sering digunakan untuk berburu Pangeran Mangkubumi. Dua daerah yang pernah menjadi bagian dari Kabupaten Bantul dan berada di perbatasan Bantul dengan Kota Yogyakarta tersebut memiliki arti penting sejarah bagi berdirinya Kasultanan Yogyakarta pasca-1755. Di samping itu, beberapa wilayah penting di Bantul juga memiliki fungsi penting dalam Perang Jawa (1825–1830). Daerah yang dimaksud adalah Selarong yang digunakan sebagai markas perang awal oleh Pangeran Diponegoro serta beberapa daerah penting yang digunakan dalam pertempuran dan juga dimanfaatkan menjadi pos benteng stelsel.

Di dalam perkembangannya, *wewengkon* (wilayah) Bantul—yang memang tidak bisa lepas dari nama Bantoel Karang—menjadi salah satu wilayah administratif baru akibat reorganisasi Yogyakarta pasca-Perang Jawa 1830 melalui traktat-traktat yang diinginkan oleh kolonial Belanda atas wilayah Kasunanan dan Kasultanan. Dalam catatan kolonial, wilayah ini dikenal dengan *Regentschap Bantool* yang—tentu saja sesuai tingkatan *regentschap* kolonial umumnya pada abad ke-19—dipimpin oleh seorang *regent* (bupati). Wilayah Bantul, seperti halnya kabupaten-kabupaten

lain, mengalami perubahan-perubahan wilayah administratif di bawahnya (distrik/*district*). *Regentschap Bantool* pernah dibagi dalam 13 distrik (641 desa), lalu pada paruh pertama abad ke-20—melalui *Rijksblad van Jogjakarta* nomor 11 tahun 1916—terbagi lagi menjadi (hanya) 4 distrik. Bupati memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah administratifnya, diberi simbol-simbol atas statusnya (gelar, *songsong*, dan lainnya) dari keraton dan tetap terkoneksi dengan struktur pemerintah kolonial di Yogyakarta.

Perubahan-perubahan administratif di Yogyakarta ini secara tidak langsung—terkait dengan tekanan-tekanan yang dialami keraton dari pemerintah kolonial—membuat pergeseran ke arah ekonomi perkebunan yang masif. Sejak industri pewarna indigo (nila) dibuka lalu berlanjut pada semakin meluasnya industri gula di paruh kedua abad ke-19—selepas hadirnya aturan Agraria 1870, wilayah Bantul mengalami perubahan lanskap tanah pedesaan. Para penyewa tanah Eropa (*landhuurder*) datang ke wilayah Bantul. Perkebunan-perkebunan nila yang kemudian berganti menjadi perkebunan-perkebunan tebu—termasuk juga tembakau—meluas dan bertahan hingga awal abad ke-20, sebelum meredup karena krisis ekonomi 1930-an. Saat bisnis gula merajalela, pabrik-pabrik didirikan di wilayah Bantul pada paruh kedua abad ke-19. Pada 1912, terdapat 8 pabrik gula yang beroperasi di Distrik Imogiri, Jejeran, Srandakan, Panggang, Kretek, dan Cepit dengan produksi puluhan ribu pikul dalam satu tahun (setidaknya pada akhir 1880-an).

Yang menarik, di Yogyakarta—bahwa pada abad ke-19 di wilayah Jawa muncul gerakan-gerakan sosial pasca-Perang Diponegoro, yakni kepemimpinan dipegang para kiai, haji, dan tokoh lokal sehingga tidak lagi berpusat pada figur dari keraton

sepenuhnya—muncul gerakan-gerakan "ratu adil". Langsung maupun tidak langsung, perubahan ekonomi perkebunan di pedesaan membawa perubahan yang melahirkan gejolak ratu adil di pinggiran ini. Di wilayah Jejeran muncul sosok Haji Istat, berikut keluarganya, yang terlibat dalam gerakan Suryengalagan pada 1883 serta Ronodjemiko yang merasa mendapat 'bisikan' menjadi ratu adil di Srandakan pada 1924. Kedua gerakan ini dengan mudah dapat ditundukkan dalam waktu singkat. Gerakan-gerakan semacam ini tentu saja mengagetkan—ditambah dengan ingatan tentang perang Jawa—bagi kalangan pengusaha perkebunan Eropa. Mereka pernah—melalui Residen Yogyakarta pada 1868—meminta penetapan kepala polisi untuk keamanan tanah-tanah yang mereka sewa.

Memasuki abad ke-20, selaras dengan perkembangan Politik Etis dan perekonomian yang telah terbangun, Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang maju. Industri-industri berkembang di wilayah ini, baik industri gula yang besar maupun industri kerajinan rumahan. Industri gula yang menjamur di wilayah ini mengakibatkan pemerintah kolonial beserta *Nederlandsch-Indisch Spoorweg Maatschappij* (*NISM*) membangun jalur transportasi untuk kereta api dengan rute Yogyakarta-Brosot melewati Srandakan dan rute Yogyakarta-Pundong. Pembangunan jalur ini awalnya bertujuan untuk pengangkutan hasil perkebunan dan pabrik tersebut ke wilayah kota. Namun, kereta api ini juga dipergunakan untuk angkutan penumpang.

Perkembangan pada periode ini bukan hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan transportasi melainkan juga pendidikan. Hal yang paling menarik adalah ketika sumber-sumber banyak mengatakan bahwa sekolah untuk kalangan bumiputra telah berdiri di wilayah ini sejak akhir abad ke-19. Sekolah-sekolah tersebut pun

berdiri di berbagai distrik di Bantul, seperti Imogiri, Jejeran, Srandakan, dan Godean. Berdirinya sekolah-sekolah untuk kalangan bumiputra ini tidak terlepas dari kebijakan Politik Etis di awal abad ke-20. Berkembangnya pendidikan tersebut juga membawa sebuah budaya berupa gaya hidup yang baru di tengah masyarakat Bantul. Gaya hidup tersebut berupa kegiatan *plesir* yang dilakukan oleh bangsawan bumiputra serta orang Eropa. Wilayah Parangtritis menjadi penting ketika berkembangnya budaya ini. Pantai tersebut merupakan destinasi wisata bagi para pelancong ketika mengunjungi wilayah Bantul. Bukan hanya itu, budaya jamuan makan besar (*maalfeest*) juga sering dilakukan ketika perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh industri gula.

Pada akhir masa kolonial, Bantul mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Proses ini terjadi selama beberapa dekade terakhir periode kolonial, khususnya pada dekade kedua hingga dekade ketiga abad ke-20. Perubahan signifikan terjadi dalam ketiga bidang tersebut. Meskipun demikian, semua kegemilangan yang dibangun nantinya akan runtuh pada masa depresi ekonomi 1930-an.

Tim Penulis

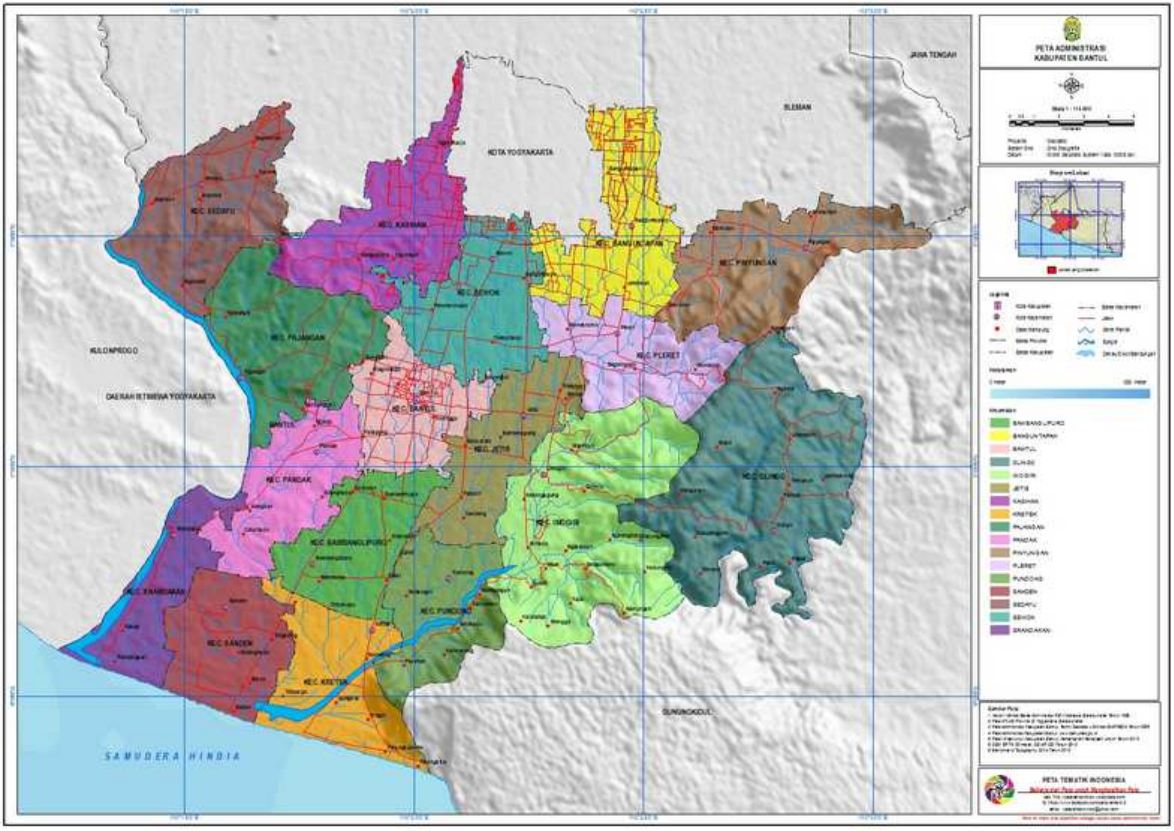
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN BANTUL
JAWA TENGAH
SLEMAN
KOTA YOGYAKARTA
KEC. SEDAYU
KEC. KASIHAN
KEC. BANGUNTAPAN
KEC. PINYUNGAN
KEC. SEWON
KEC. PAJANGAN
KULONPROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEC. PLERET
KEC. BANTUL
BANTUL
KEC. JETIS
KEC. PANDAK
KEC. DLINGO
KEC. IMOGIRI
KEC. BAMBANGLIPURO
KEC. KRAMBAHAN
KEC. PUNDONG
KEC. SANDEN
KEC. KRETEK
GUNUNGKIDUL
SAMUDERA HINDIA
PETA TEMATIK INDONESIA

Daftar Isi

Sambutan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul **5**
PENDAHULUAN *7*

BAB 1 | BANTUL PASCA RUNTUHNYA PLERET **15**
Dari *Nagara* Menjadi *Negaragung* 15
Gading Mataram 18
Daerah yang Dihormati dan Tujuan Ritual 20

BAB 2 | BANTUL DAN (SEKITAR) BERDIRINYA KASULTANAN YOGYAKARTA **25**
Perang Suksesi Jawa 25
Wilayah Hasil Perjanjian Giyanti 28
Situs dan Bangunan Penting 30
Pesanggrahan di Selatan 32

BAB 3 | BANTUL PADA MASA PERANG JAWA **37**
Wilayah Bantul Sebelum Perang Jawa 37
Markas Selarong 40
Perang Jawa di Sekitar Bantul 47

BAB 4 | LAHIRNYA PEMERINTAHAN BANTUL **51**
Kasultanan Yogyakarta dan Pembagian *Wewengkon* Pasca-Perang Jawa 51
Para Bupati (*Regent*) 59

BAB 5 | BANTUL DAN PERUBAHAN SISTEM EKONOMI PERKEBUNAN **67**
Indigo, Tembakau, hingga Gula 67
Ramalan, Keresahan, dan Gerakan Sosial 80

BAB 6 | DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI PERKEBUNAN **87**
Sistem Transportasi 87
Berkembangnya Pusat Ekonomi Baru 95
Lapangan Pekerjaan Mulai Terbuka 96

BAB 7 | KONDISI SOSIAL, PENDIDIKAN, BUDAYA DI BANTUL **99**
Kondisi Sosial Bantul 99
Kerajinan di Bantul 100
Pendidikan di Bantul 107
Pelesir di Parangtritis: Gaya Hidup dan Pariwisata Bantul 110
Maalfeest: Pesta Perjamuan Makan oleh Industri Gula di Bantul 113
Perdagangan 116

BAB 8 | BANTUL PADA AKHIR MASA KOLONIAL **119**
Depresi Ekonomi 1930-an 119
Terhantam Krisis Malaise: Kemunduran Industri Gula 120
Kenaikan Harga Bahan Pangan 122

PENUTUP **127**
DAFTAR PUSTAKA **131**
BIODATA PENULIS **141**

BAB 1

BANTUL PASCA RUNTUHNYA PLERET

Dari *Nagara* Menjadi *Negaragung*

Wilayah di sekitar pusat pemerintahan Mataram, sejak Panembahan Senopati bertakhta 1589[1] sampai runtuhnya Istana Pleret 1677 merupakan daerah berstatus *nagara*. Wilayah tersebut berada di sekitar pusat pemerintahan Mataram, seperti Kotagede, Kerto, dan Pleret.[2] Tiga daerah tersebut secara berurutan, merupakan wilayah utama kerajaan dengan wilayah status *nagara* atau *kuthanegara*. Wilayah yang disebut dengan *nagara* merupakan tempat bagi kota-istana atau pusat segalanya bagi pemerintahan Mataram Islam.[3]

Hal yang penting bagi sejarah pusat pemerintahan Mataram dari periode Sultan Agung (bertakhta 1613-1646[4]) dan putranya, yaitu

1 Tahun 1588 atau 1589 dipilih karena Panembahan Senopati mulai berusaha melakukan gerakan agar kekuasaannya di Mataram diakui oleh raja-raja di Jawa Timur. Lihat Dr. H. J. De Graaf dan Dr. Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram* (Jakarta: Penerbit PT Grafiti Pers, 1985), hlm. 287.

2 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden*, a.b. Suhardjo Hatmosuprobo, Yogyakarta, 1988, hlm. 5.

3 *Ibid.*

4 Dr. H. J. De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: Penerbit PT Grafiti Pers, 1986), hlm. 27, 302.

Susuhunan Amangkurat I adalah penggeseran ke arah selatan Kotagede. Jika dilihat, maka pergeseran pusat pemerintahan tersebut justru mendekati arah makam suci Imogiri dan Laut Selatan. Pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat I (bertakhta 1640-1677)[5] mulai melakukan reorganisasi wilayah Mataram pada 1655.[6] Perubahan tata kelola wilayah tersebut lebih ditekankan pada kepengurusan wilayah Pesisir Utara Jawa.[7] Setelah pemerintahan Susuhunan Amangkurat I runtuh pada Juli 1677[8] maka terjadi banyak perubahan penting di daerah sekitar pusat Mataram Islam.

Setelah hancurnya kekuasaan Mataram di Pleret pada 1677, Rouffaer menyebut wilayah bekas ibu kota Mataram—sekitar Kotagede, Kerto, dan Pleret—sebagai *negaragung*.[9] Wilayah ini tidak lagi berstatus sebagai *nagara* karena ibu kota pemerintahan Mataram yang baru pimpinan Susuhunan Amangkurat II (bertakhta 1677-1703[10]) didirikan di Kartasura.[11] Sebagai wilayah berstatus *negaragung*, maka menjadi kawasan utama tanah *apanage* para pegawai Istana Mataram.[12]

Gambaran wilayah sekitar Istana Pleret setelah runtuhnya Istana Mataram ini tidak menjadi daerah yang penting. Hal itu karena gerakan politik Mataram Kartasura selalu berhubungan dengan VOC yang berada di pusat-pusat politik Pantai Utara Jawa. Dengan demikian wilayah Mataram lama seperti bekas Istana Mataram di Pleret tidak begitu diperhatikan oleh pemerintahan di Kartasura.

---

5 Dr. H. J. De Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I* (Jakarta: Penerbit PT Grafiti Pers, 1987), hlm. 3
6 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 87.
7 Dr. H. J. De Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I…*, hlm. 21-23.
8 Dr. H. J. De Graaf, *Runtuhnya Istana Mataram* (Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti,1987), hlm. 195-203.
9 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 6.
10 M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Jawa 1677-1726: Asian and European Imperialisme in the Early Kartasura Period* (Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 2003), hlm. 42.
11 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 8.
12 *Ibid.*

Setelah pusat pemerintahan Mataram dipindah ke Kartasura hampir semua pembesar yang awalnya tinggal di Pleret kemudian berpindah ke Kartasura. Hanya saja bagi para pembesar yang sejak awal tinggal di sekitar bekas Istana Kerto dan Pleret disebutkan tidak semuanya pindah ke Kartasura. Mereka adalah keluarga juru kunci di makam suci Pajimatan Imogiri dan para keluarga yang sejak awal telah tinggal di Mataram, salah satunya adalah keluarga Tumenggung Gajah yang tinggal di Jejeran.[13]

Sebuah kutipan dari tradisi Yogyakarta menyebutkan tentang keluarga pendukung Mataram yang tinggal di Jejeran, sebagai berikut:[14]

> *"Sadherek Kyai Wonokriyo wahu putraning Adipati Pragola Pati kaping II, saking garwa pangrembe sabedhaking Pati, Kyai Wonokriyo taksih alit, kabekta ngili dening Suramangunjaya ing Pati, dhateng tanah Blambangan ngantos lami, sesampuning dewasa dhateng Mataram, njujug ing dhusun Jejeran, katrimah lajeng kapendhet mantu dhateng Kyai Jejer pikantuk ingkang wayah sa(n)tri putraning Patih Singaranu."*

Keterangan tersebut menunjukkan jika daerah Jejeran sebelum berdirinya Keraton Yogyakarta sudah menjadi tanah milik keluarga keturunan Pati. Di dalam tradisi tersebut keluarga Jejeran adalah keturunan Kiai Jejer dan Kiai Wanakriya, termasuk Tumenggung Gajah. Namun selain wilayah tersebut, seperti Pleret yang selama setengah abad (56 tahun) ditinggalkan, keadaannya terlihat terbengkalai. Hal itu dilaporkan oleh Lons yang mengunjungi bekas Istana Pleret pada 13 Agustus 1733.[15]

---

13 Tumenggung Gajah adalah putera dari Kiai Wanakriya dengan nama Ki Puspatruna (Demang Jawinata). Oleh karena jasanya kepada Susuhunan Amangkurat Agung dan membantu Pangeran Puger dalam mengamankan Pleret ketika diserang Trunajaya tahun 1677, kemudian mendapat gelar yaitu Tumenggung Gajah Mada atau Tumenggung Gajah Gede. Lihat *Sejarah Ratu,* t.t., hlm. 58.

14 *Ibid.*

15 Inajati Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000), hlm. 67.

Gading Mataram

Setelah tidak lagi menjadi pusat dari pemerintahan Mataram, wilayah yang pada masa sekarang (2023) disebut sebagai Kabupaten Bantul masih tetap menjadi daerah inti Mataram. Dalam istilah sebelumnya, daerah bekas ibu kota Mataram Islam ini disebut sebagai *negaragung* atau kota besar.[16] Mataram dalam pengertian *negaragung* adalah terdiri dari: Kalasan, Bantul, dan Sleman. Semua wilayah *negaragung* yang dimaksud memiliki luas 16.757 cacah.[17]

Secara geografis, wilayah bekas pusat Mataram Islam dikenal sebagai daerah inti Mataram atau Mataram Krajan.[18] G.P. Rouffaer menjelaskan hal tentang Mataram Krajan sebagai berikut: [19]

> *"Juga Mataram-Krajan (= Mataram-Inti), yaitu daerah antara Kali Bagawanta dan Gunungkidul dibagi menjadi belahan utara dan belahan selatan".*

Keterangan G.P. Rouffaer di atas menerangkan jika wilayah bekas pusat-pusat pemerintahan Mataram sampai runtuhnya Istana Pleret pada 1677 adalah bagian dari Mataram Krajan. Hanya saja, Rouffaer kemudian membagi wilayah Mataram Inti lebih detail, yaitu wilayah utara dan selatan. Untuk wilayah utara, seperti daerah sekitar Pegunungan Trajumas-Kelir, Gunung Merapi, pusat Yogyakarta, lereng Gunung Merapi, dan sekitar Gunungkidul disebut sebagai Mataram Krajan. Sementara itu untuk wilayah Mataram selatan disebut sebagai Gading Mataram (Negeri Gading). G.P. Rouffaer menerangkan pembagian wilayah Mataram Inti sebagai berikut: [20]

---

16 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 5.

17 Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830* (Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2014), hlm. 14.

18 G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 88.

19 *Ibid.*

20 Daerah Kadilangu disebutkan berada di sekitar muara Sungai Bogowonto. Untuk nama Gading Mataram disebutkan jika banyak tumbuhan kelapa gading (*coco nucifera eburnea*) yang kemudian digunakan sebagai lambang pemerintahan Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 2 tahun

*"Daerah belahan utara tetap bernama Mataram, sedang yang belahan selatan (daerah Kadilangu-Bantul-Mantingan) memperoleh nama Gading Mataram, barangkali karena banyaknya kelapa gading (*krambil gadhing*) yang dihasilkan daerah rendah lagi subur itu".*

Keterangan tersebut didukung oleh pandangan Veth dan Selo Soemardjan tentang konsepsi lingkaran konsentris Mataram. Pandangannya adalah jika wilayah sekitaran bekas Istana Kerto dan Pleret disebut dengan istilah Distrik Mataram. Dalam penyebutan lain dikenal dengan 'daerah asli Mataram' atau Distrik Mataram.[21] Soemarsaid mengutip pendapat G.P. Rouffaer yang menyebutkan daerah inti Mataram tersebut dengan istilah Gading Mataram.[22]

Gambaran tentang Gading Mataram dilukiskan oleh kartografer bernama Gerard van Keulen yang dicetak awal abad ke-17. Dalam penyebutannya, Gading Mataram dikenal sebagai wilayah yang sebagian terdiri dari rawa yang luas, berada di timur Pegunungan Karst dan Sungai Bogowonto. Gerard van Keulen melukiskan bahwa Gading Mataram juga berada di timur Sungai Progo sampai ujung barat Pegunungan Kidul.[23]

2020. Lihat P.M. Laksono, *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan: Alih-ubah Model Berfikir Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 64; Ahmad Athoillah, *Siwates dan Temon; Sejarah Sosial-Budaya Perbatasan di Kulon Progo* (Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Kebudayaan (kunda Kabudayan), 2020), hlm. 58; G.P. Rouffaer, *Praja Kejawen: Vorstenlanden…*, hlm. 88.

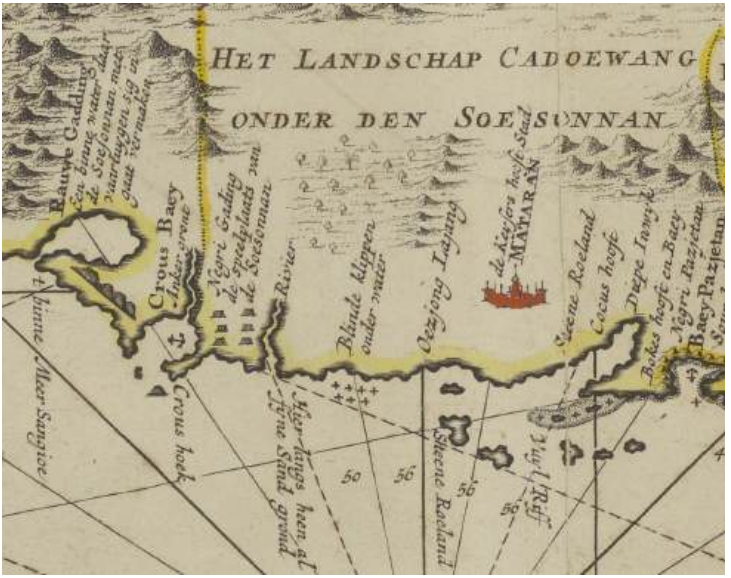

Negeri Gading pada Peta Karya Gerard van Keulen
(Sumber: Nationaal Archief)

Wilayah Gading Mataram—yang di dalamnya juga terdapat Bantul—pada masa kekuasaan Mataram di Kartasura berstatus sebagai kadipaten. Dengan begitu, wilayah Gading Mataram dipimpin oleh seorang *abdi dalem Gadhing Mataram.*[24] Hal tersebut berlaku sampai diadakannya Perjanjian Giyanti pada 1755 yang menjadikan wilayah Gading Mataram antara Sungai Progo dan ujung barat Pegunungan Kidul menjadi wilayah Pangeran Mangkubumi.

Daerah yang Dihormati dan Tujuan Ritual

Daerah Gading Mataram yang merupakan bekas pusat pemerintahan Mataram menurut Soemarsaid Moertono memiliki sebuah

24 S. Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-The Toyota Foundation 2004), hlm. 18-20.

keutamaan dalam konsepsi politik Mataram. Wilayah di selatan bekas pusat Mataram Islam dikenal dengan wilayah kosmologis tentang pertemuan Panembahan Senopati dengan penguasa Laut Selatan. Hal tersebut kemudian diikuti oleh semua Raja Mataram agar terjaminnya kejayaan dan keamanan kerajaan dari hal-hal yang bersifat mistis. Maka diadakanlah upacara labuhan untuk membuktikan adanya pertalian antara penguasa dunia dengan Nyai Ratu Kidul.[25]

Selain Laut Selatan, terdapat juga situs Makam Kotagede dan Imogiri yang sangat dihormati oleh para penguasa Mataram di Kartasura. Raja-Raja Mataram yang bertakhta di Kartasura hampir semua dimakamkan di Imogiri, kecuali yang diasingkan oleh VOC ke luar Jawa. Dengan demikian, maka kemudian terdapat perjalanan ritual para Raja Mataram di Kartasura ke bekas pusat Mataram Islam sesudah 1677.

Hal itu ditunjukan seperti kunjungan Susuhunan Amangkurat II ke Makam Imogiri untuk menjalankan ibadah puasa pada Agustus 1684. Susuhunan Amangkurat II bersama seluruh abdi dalemnya melakukan perjalanan ritual ke Imogiri. Perjalanan tersebut karena para ulama dan beberapa bangsawan Mataram Kartasura berhasil membujuk Susuhunan Amangkurat II untuk meninggalkan pasukan Belanda di Kartasura. Dengan melakukan perjalanan ke Imogiri, maka Susuhunan Amangkurat II terpisah dari pimpinan VOC yang menjaga benteng VOC di Kartasura bernama Kapten Letnan Arnoldus Greving. Perjalanan ke Imogiri juga dimaksudkan agar Susuhunan Amangkurat II selalu sadar akan kewangsaannya dan keagamaannya.[26]

---

25 Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lalu: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*…, hlm. 76.

26 Dr. H. J. De Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*…, hlm. 8, 13.

Selanjutnya adalah kunjungan Susuhunan Paku Buwono I bersama keluarganya ke wilayah Mataram selatan pada 21 Mei 1709. Tempat yang dituju adalah Pamancingan dan Gua Langse di pinggiran Pantai Selatan. Semuanya dilakukan untuk menunjukkan hubungan Susuhunan Paku Buwono I dengan Mataram Inti dan penguasa Pantai Selatan[27] masih terjaga, Dengan demikian, maka kewibawaan Susuhunan Paku Buwono I tetap terjaga, baik di mata kompeni, punggawa, maupun rakyatnya.

Kunjungan penting lainnya dilakukan oleh Susuhunan Amangkurat IV yang berziarah ke Imogiri dan Laut Selatan pada September 1724. Rute kunjungan pimpinan Mataram tersebut diterangkan melalui Madegonda.[28]

Situs Watu Gentong Madugondo 1987 (Ricklefs, 2003).

27 M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Jawa 1677-1726: Asian and European Imperialisme in the Early Kartasura Period…*, hlm. 157.

28 Daerah Madegonda atau Madugondo menurut Ricklef berada di Piyungan. Daerah Madugondo berada di Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Lihat M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Jawa 1677-1726: Asian and European Imperialisme in the Early Kartasura Period…*, hlm. 348-349. Untuk melihat profil Padukuhan (Dusun) Madugondo dapat ditemukan pada https://sitimulyo.bantulkab.go.id/first/artikel/392 diakses 9 Oktober 2023.

Dusun Madugondo, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi Rizki Dian Saputra, 2023)

Setelah dari dusun kecil tersebut, Susuhunan Amangkurat IV kemudian menuju ke Kotagede untuk menziarahi Panembahan Senopati dan Panembahan Seda Krapyak. Susuhunan Amangkurat IV kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mengunjungi Makam Imogiri dan Goa Langse di Pantai Selatan.[29]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa daerah Gading Mataram sangat penting bagi simbol politik Mataram di Kartasura. Dapat disebutkan juga bahwa meskipun pusat pemerintahan di Pleret telah runtuh, namun wilayah selatan Mataram tetap menjadi pusat perhatian emosional para Raja Mataram di Kartasura. Artinya, daerah Gading Mataram tetap memiliki peran penting dalam sejarah panjang perjalanan Kerajaan Mataram Islam sampai pertengahan abad ke-18.

29 M.C. Ricklefs, *War, Culture and Economy in Jawa 1677-1726: Asian and European Imperialisme in the Early Kartasura Period…*, hlm. 213.

BAB 2

BANTUL DAN (SEKITAR) BERDIRINYA KASULTANAN YOGYAKARTA

Perang Suksesi Jawa

Dalam perjalanan panjang politik kekuasaan Mataram di Kartasura, para raja yang bertakhta umumnya tidak mampu membangun kejayaan seperti para pendahulu sebelumnya. Kerajaan Mataram dibangun dengan ketergantungan yang kuat dengan VOC kemudian mengalami krisis politik sepanjang 1677 sampai 1755, atau hampir delapan dasawarsa. Perebutan kekuasaan, intrik politik, tekanan hutang, dan ketergantungan, serta kontestasi politik selalu menghiasi perjalanan kerajaan yang dipusatkan di Kartasura oleh Susuhunan Amangkurat II. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik Mataram maupun VOC sampai munculnya Perjanjian Giyanti mengalami penurunan kontrol politik-militer dan melemahnya kekuatan ekonomi.

Puncak perebutan kekuasaan pada keturunan Susuhunan Amangkurat I tersebut terjadi ketika Susuhunan Paku Buwono I (bertakhta 1704–1719) berhasil mengambil alih kekuasaan keponakannya yaitu

Susuhunan Amangkurat III (bertakhta 1703–1708).[30] Keadaan tersebut ditunjukkan dengan rapuhnya Kerajaan Mataram pada masa kepemimpinan Susuhunan Paku Buwono II (bertakhta 1726–1754).[31] Pada masa tersebut, terjadi pemberontakan daerah Sokawati yang dapat diselesaikan oleh Pangeran Mangkubumi dengan janji hadiah dari Susuhunan Paku Buwono II. Hanya saja hadiah yang dijanjikan sebanyak 3000 cacah tersebut tidak dikabulkan karena hasutan Patih Pringgalaya.[32]

Tokoh besar Mataram yang memiliki nama Bendara Raden Mas (B.R.M.) Sujono merupakan putra dari Susuhunan Prabu Amangkurat IV dari istri bernama Mas Ayu Tedjawati.[33] Setelah janjinya tidak ditepati, putra dari Mas Ayu Tejawati kemudian melakukan pemberontakan kepada Susuhunan Paku Buwono II di Kartasura. Perlawanan yang dilakukan oleh sosok yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi itu dimulai pada 19 Mei 1746.[34] Peristiwa tersebut dikenal dengan "Perang Suksesi Jawa Ketiga" yang terjadi sejak 1746 sampai 1755. Peristiwa besar tersebut berpengaruh pada perkembangan politik pada wilayah Mataram lama—sekitar bekas Istana Kotagede, Kerto, dan Pleret. Hal itu karena Pangeran Mangkubumi dalam gerakannya berusaha menghalangi keponakannya yang berusia 16 tahun untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Pangeran Mangkubumi juga berniat mempersiapkan dirinya menjadi raja.

---

30 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Matabangsa, 2002), hlm. 31.
31 *Ibid.*
32 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 58-59.
33 Mas Ayu Tedjawati merupakan puteri dari Ngabehi Handakara dari Kepundung, Kartasura. Lihat R.M. Soemardjo Nitinegoro SH, *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta: t.p, 1981), hlm. 17
34 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 59.

Di dalam persiapannya, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya mempersiapkan wilayah pusat kekuasaannya. Tentang pusat wilayah kekuasaan baru Pangeran Mangkubumi itu, Ricklefs menerangkan sebagai berikut: [35]

> *"Tampaknya Mangkubumi berharap bisa menghalangi penobatan putra Sunan yang berusia enam belas tahun, keponakan Mangkubumi, dengan memproklamasikan dirinya sebagai raja Jawa. Sebagai persiapan dia menyiapkan tempat tinggal sekitar tujuh puluh lima kilometer sebelah barat daya Surakarta di tempat yang bernama Yogya, dekat keraton lama di Kotagede dan Plered. Pilihan atas tempat ini memiliki arti penting. Ketika van Imhoff mengunjungi Yogya selama lawatannya pada 1746 dia diberi tahu bahwa wilayah itu dianggap oleh sebagian orang sebagai 'pusatnya Mataram'. Mangkubumi kini telah kembali ke wilayah yang memberikan nama bagi dinastinya, dan merupakan dasar bagi kejayaan Mataram."*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pangeran Mangkubumi pada 1749 mulai menghidupkan kembali wilayah Mataram Inti, atau sekitar Kotagede, Kerto, dan Pleret. Terdapat keterangan yang menyatakan bahwa sebelum terjadinya perang perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, disebutkan wahyu keraton dilihat oleh Susuhunan Amangkurat III jatuh ke Hutan Beringan. Di dalam hutan yang terkenal itu terdapat sebuah pesanggrahan milik Mataram Kartasura yang sangat disucikan. Pesanggrahan tersebut bernama Pesanggrahan Garjitawati yang sepeninggal Susuhunan Amangkurat Jawi kemudian diganti nama menjadi Ngayogyakarta oleh Susuhunan Paku Buwono II.[36] Pesanggrahan tersebut digunakan untuk pemberhentian jenazah Raja-Raja

35 *Ibid.*
36 Djoko Dwiyanto, *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangannya* (Yogyakarta: Penerbit Pradigma Indonesia, 2009), hlm. 34.

Mataram Kartasura sebelum dimakamkan ke Pajimatan Imogiri.[37]

Keterangan tersebut sangat mungkin karena kemudian muncul pemberitaan yang menyebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai 'Susuhunan' oleh pendukungnya di sekitaran Yogyakarta. Peristiwa tersebut tepat dengan penobatan Paku Buwono III pada 11 Desember 1749.[38] Keterangan lain menerangkan jika Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Susuhunan hanya berbeda satu hari dengan Paku Buwono III, yaitu 12 Desember 1749. Pangeran Mangkubumi kemudian dikenal sebagai raja yang paling cakap dari Keluarga Mataram sejak Sultan Agung.[39]

Wilayah Hasil Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Paku Buwono III, dan Nicholas Hartingh ditandatangani pada 13 Februari 1755.[40] Perjanjian tersebut membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu daerah bagian yang dikuasai oleh Susuhunan Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi.[41] Dengan itu, maka Pangeran Mangkubumi berkuasa atas 33.950 cacah (keluarga atau rumah tangga). Wilayahnya yang terpenting adalah di Mataram Inti atau di sekitar bekas Istana Kotagede, Kerto, dan Pleret.

Di daerah Mataram Inti tersebut Pangeran Mangkubumi mendapat dukungan dari pemimpin wilayah bernama Tumenggung Jayawinata. Pemimpin Mataram yang seharusnya setia dengan junjungannya, yaitu Susuhunan di Kartasura justru malah membantu

---

37 Drs. Djoko Dwiyanto dkk, *Hari Jadi Yogyakarta* (Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, 2004), hlm. 43.
38 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 73.
39 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Penerbit PT Serambi, Ilmu Semesta, 2008), hlm. 215.
40 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 107.
41 Djoko Dwiyanto, *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangannya …*, hlm. 41-46.

Pangeran Mangkubumi. Tindakan Tumenggung Jayawinata tersebut digambarkan oleh Ricklefs sebagai berikut:[42]

"Tumenggung Jayawinata, yang bersekutu dengan pemberontak."

Keterangan tersebut memberi petunjuk bahwa wilayah bekas ibu kota Mataram setelah Istana Pleret runtuh tetap memiliki penguasa. Mereka umumnya adalah para pendukung Pangeran Puger (Susuhunan Paku Buwono I) yang wilayahnya dijadikan *apanage* bagi bangsawan Mataram di Kartasura. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Djoko Suryo bahwa keraton baru di Jawa seperti Yogyakarta yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi selalu ditopang oleh kekuatan pemukiman-pemukiman yang sudah ada.[43]

Tentu gerakan politik yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dengan dukungan penguasa lokal Mataram Inti tersebut membawa perubahan besar pada keadaan sosiologis di Jawa. Hal itu dimulai ketika Pangeran Mangkubumi mendirikan istana sementara di Gamping 1749 dan mulai tinggal di Yogyakarta pada akhir September 1756.[44] Usaha tersebut berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk di kawasan *negaragung* atau yang dimaksud sebagai daerah Mataram Inti. Dalam catatan Ricklefs disebutkan bahwa terjadi peningkatan angka populasi penduduk di sekeliling keraton Pangeran Mangkubumi setelah 1755.[45] Jumlah penduduk yang besar tersebut hadir karena usaha Pangeran Mangkubumi mengerahkan tenaga kerja untuk pembangunan di sekitar keraton. Keterangan lebih

---

42 M.C. Ricklefs, *Samber Nyawa: Kisah Perjuangan Seorang Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Mangkunegara I (1726-1795)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), hlm1. 67.

43 Djoko Suryo, "Kisah Senapati-Ki Ageng Mangir dalam Historiografi Babad" (ed.) T. Ibrahim Alfian, H.J. Koesoemanto, Dharmomo Hardjowidjono, Djoko Suryo, *Dari Babad dan Hikayat: Kumpulan Karanagn dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartomo Kartodirdjo* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 113.

44 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 116-117.

45 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 235.

lengkapnya adalah seperti yang disebutkan Ricklefs sebagai berikut:[46]

> "*Mempekerjakan dan menghabiskan tenaga rakyatnya terus-menerus membangun berbagai macam bangunan untuk kesenangan baginda, dan menghancurkan serta membangun kembali bangunan-bangunan tersebut bilamana tidak memenuhi maksud dan harapannya.*"

Situs dan Bangunan Penting

Situs-situs penting Mataram Islam di Gading Mataram oleh Pangeran Mangkubumi dan pendukungnya masih sangat dihormati. Sultan Yogyakarta pertama tersebut juga meninggalkan beberapa situs penting yang berada di perbatasan wilayah Bantul dengan Sleman pasca berdirinya Keraton Yogyakarta. Salah satunya adalah bekas bangunan Pesanggarahan Ambarketawang yang dibangun oleh Bupati Mataram Tumenggung Jayawinata atas perintah Pangeran Mangkubumi.[47] Letak bangunan yang dekat dengan wilayah Bantul[48] tersebut dibangun untuk persinggahan sementara Pangeran Mangkubumi sebelum menempati istana barunya yang dibangun.[49] Peristiwa tersebut diungkapkan oleh R.M. Soemardjo Nitinegoro sebagai berikut: [50]

---

46 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 243.

47 R.M. Soemardjo Nitinegoro SH, *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta: t.p, 1981), hlm. 53.

48 Secara administrasi pengaturan daerah di wilayah Yogyakarta, untuk Ambarketawang yang merupakan bagian dari Distrik Gamping (terdiri dari 124 desa) pada 1884 masuk di wilayah *Regentschap Soeleman*. Kedekatan wilayah Ambarketawang (Gamping) dengan Bantul ditunjukkan kembali dengan sebuah penggabungan Ondedistrik Kasihan dengan Onderdistrik Gamping menjadi Onderdistrik Gamping, Distrik Godean Kabupaten Sleman. Perlu diketahui bahwa Onderdistrik Kasihan di atas kemudian menjadi bagian penting dari Kabupaten Bantul. Kedekatan sosial politik Ambarketawang dengan Bantul terbukti kembali dengan dimasukkannya Distrik Gamping ke wilayah Kabupaten Bantul pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Lihat *Regerings Almanak voor Nederlandsch Indie* I (Batavia: Landsrukkerijk 1884), hlm. 32; Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017), hlm. 153.

49 Drs. Djoko Dwiyanto dkk, *Hari Jadi Yogyakarta …*., hlm. 2-3.

50 R.M. Soemardjo Nitinegoro SH, *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat …*, hlm. 53.

"Bupati Mataram bernama Tumenggung Jayawinata menyambut dengan gembira kedatangan Gusti Pangeran Mangkubumi itu. Setelah kurang lebih satu bulan beristirahat di Mataram, Pangeran Mangkubumi kemudian memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk membangun sebuah pesanggrahan di Kabanaran yang letaknya di sebelah barat kota Yogyakarta atau di sebelah utara Gunung Gamping."

Di pesanggrahan yang kemudian berbatasan dengan wilayah Bantul itu, Pangeran Mangkubumi menyatakan jika wilayah kekuasaanya dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Peristiwa yang terjadi pada 13 Maret 1755 kemudian diperingati sebagai *Hadeging Nagari Dalem Kasultanan Mataram-Ngayogyakarta.*[51] Setelah keraton selesai dibangun, Pangeran Mangkubumi kemudian meninggalkan Ambarketawang memasuki Kota Yogyakarta pada 7 Oktober 1756.[52]

Selain Pesanggrahan Ambarketawang yang sangat dekat dengan wilayah Bantul, juga terdapat bangunan penting yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I. Bangunan yang dimaksud adalah Panggung Krapyak dengan nilai monumental penting bagi konsepsi Sumbu Filosofi Yogyakarta. Panggung Krapyak dibuat untuk menyimpan hasil buruan dari Pangeran Mangkubumi itu didirikan pada 1782.[53] Fungsi penting lainnya dari Panggung Krapyak adalah digunakan oleh Sultan Hamengku Buwono I sebagai pesanggrahan.

Bangunan tersebut digunakan untuk istirahat Sultan Yogyakarta setelah melakukan perburuan hewan-hewan kesukaan raja. Panggung Krapyak juga merupakan bangunan-bangunan penting yang dibangun pada masa kekuasaan Sultan Hamengku Buwono I. Oleh Masyarakat, bangunan Panggung Krapyak kemudian dikenal juga sebagai batas sebelah selatan pusat Keraton Yogyakarta.

---

51 Drs. Djoko Dwiyanto dkk, *Hari Jadi Yogyakarta*…, hlm. 39.
52 Drs. Djoko Dwiyanto dkk, *Hari Jadi Yogyakarta*…, hlm. 3.
53 Baha'Uddin dan Ratna Nurhajarini, Dwi. (2018). "Mangkubumi Sang Arsitek Kota Yogyakarta". Patrawidya, Vol. 19, No. 1. hlm. 85–86.

Bangunan Panggung Krapyak
(Sumber: https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/21-sumbu-filosofi-yogyakarta-pengejawantahan-asal-dan-tujuan-hidup/. Diakses 20 Oktober 2023).

Pesanggrahan di Selatan

Bangunan lain yang penting dan menjadi simbol kekuasaan dari Kasultanan Yogyakarta adalah situs Lipura. Lokasi situs bersejarah Mataram ini terdapat di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Di situs tersebut terdapat sebuah batu hitam atau *sela gilang* yang dipercaya oleh kalangan penguasa Mataram sebagai lokasi diterimanya wahyu kerajaan oleh Panembahan Senopati.

Di awal berdirinya Keraton Yogyakarta, terdapat sebuah peristiwa penting terkait Lipura. Peristiwa yang dimaksud masih terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I yang memiliki permasalahan pribadi dengan putra mahkotanya. Sultan Yogyakarta sejak awal tidak menyetujui hubungan pernikahan antara Putra Mahkota dengan putri Raden Rangga. Hal itu karena Sultan

Hamengku Buwono I didesak oleh VOC untuk tidak merestui hubungan pernikahan Putra Mahkota tersebut. Dalam adat VOC pernikahan antara Putra Mahkota dengan putri Raden Rangga tersebut dilarang.[54]

Oleh karena masalah tersebut, maka Putra Mahkota merasa kecewa kemudian merencanakan pergi menuju ke Lipura untuk menghimpun kekuatan. Tindakan tersebut kemudian berhasil memaksa Sultan Hamengku Buwono I untuk menyetujui hubungan putranya dengan Raden Ayu Rangga, meskipun berakhir dengan perpisahan pada 1787.[55] Peristiwa tersebut menggambarkan pentingnya situs sejarah seperti Lipura yang berada di wilayah selatan Keraton Yogyakarta bagi para pembesar kerajaan.

Wilayah di selatan Keraton Yogyakarta juga memiliki arti penting bagi Putra Mahkota. Hal itu ditunjukkan dengan perhatiannya melalui pembangunan banyak bangunan di wilayah selatan Yogyakarta.[56] Beberapa di antaranya adalah Pesanggrahan Rejakusuma, Pesanggrahan Goa Siluman, dan Pesanggrahan Sonopakis.[57] Salah satu yang menarik adalah pesanggrahan Rejakusuma yang tentu dibangun atas permintaan Putra Mahkota.

Pesanggrahan Rejakusuma memiliki sejarah tersendiri, karena pernah dikunjungi petinggi Eropa. Pejabat yang dimaksud adalah Gubernur Pantai Timur Laut Jawa di Semarang bernama Jan Greeve (memimpin September 1768–September 1791). Kunjungan petinggi

---

54 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 359-350.

55 *Ibid.*

56 Beberapa pesanggrahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwana II ada 13 buah, seperti Pesanggrahan Rejawinangun (Situs Warungboto), Pesanggrahan Ngarjakusuma, Pesanggrahan Purworejo, Pesanggrahan Wanacatur, Pesanggrahan Cendanasari, Pesanggrahan Gua Seluman, Pesanggrahan Sanapakis, Pesanggrahan Madyaketawang, Pesanggrahan Pengawatreja, Pesanggrahan Tanjungtirto, Pesanggrahan Sanasewu, Pesanggrahan Tlogo Ji, dan Pesanggrahan Toyo Tumpang Kanigoro. Lihat https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/mengekspos-pesanggrahan-peninggalan-sultan-hamengku-buwana-ii/ diakses 20 Oktober 2023.

57 https://disbud.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-bidang-warisan-budaya-galeri-foto-cagar-budaya-bagian-i diakses 20 Oktober 2023.

VOC di Semarang tersebut dilakukan pada Agustus 1788[58] sebagai wujud perhatiannya kepada pesanggrahan di selatan Yogyakarta.

Realitas di atas menunjukkan bahwa wilayah Gading Mataram yang kemudian pasca-Perang Jawa (*Java Oorlog*) atau Perang Diponegoro (1825-1830) disebut sebagai Bantoel Karang, memiliki situs-situs sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Menariknya, situs-situs tersebut masih dihormati oleh Sultan Yogyakarta. Selain itu, keberadaan beberapa bangunan penting yang dibangun di wilayah selatan Yogyakarta juga menjadi bukti penting tentang awal kekuasaan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke-18.

58 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa…*, hlm. 441, 444–450.

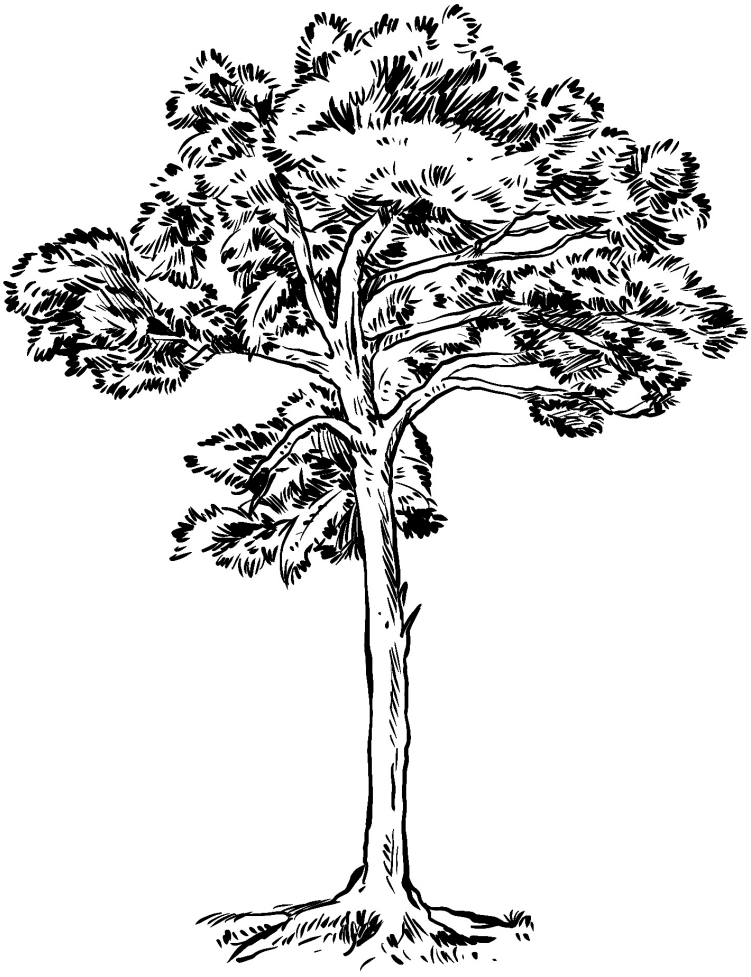

BAB 3

BANTUL PADA MASA PERANG JAWA

Wilayah Bantul Sebelum Perang Jawa

Telah diterangkan pada bab sebelumnya, bahwa wilayah selatan Yogyakarta kemudian menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan Keraton Yogyakarta. Pada masa awal pendirian Keraton Yogyakarta dapat disebutkan bahwa wilayah di selatan sekitar pesanggrahan dan bekas ibu kota Mataram adalah tanah *apanage* dari Bupati Mataram.[59] Pada masa kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono I, wilayah yang kemudian disebut sebagai Bantul ini merupakan penyangga bagi kekuatan-kekuatan politik bagi *nagara* (istana) di Yogyakarta.

Perubahan penting politik pemerintahan segera terjadi di Yogyakarta sepeninggal mangkatnya Sultan Hamengku Buwono I pada pukul sebelas malam 24 Maret 1792. Ricklefs menyebutkan bahwa sepeninggal Sultan Hamengku Buwono I, maka pemerintahan Yogyakarta menjadi bergejolak. Hal itu disebabkan konflik Sultan

Hamengku Buwono II dengan orang-orang Eropa.[60] Perselisihan Sultan dengan Gubernur Jenderal H.W. Daendels membuat keadaan politik keraton semakin terpuruk. Puncaknya adalah diturunkannya Sultan Hamengku Buwono II dan digantikan dengan putranya, Sultan Hamengku Buwono III pada awal Januari 1811.[61]

Perubahan terjadi ketika H.W. Daendels digantikan oleh J.W. Janssens pada 16 Mei 1811. Tidak begitu lama, Janssens ditaklukkan oleh Pasukan Inggris pimpinan Thomas Stamford Raffles yang segera menguasai Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono II oleh T.S. Raffles diangkat kembali menjadi Raja Yogyakarta, dan putranya kembali dijadikan sebagai Adipati Anom. Setelah pergantian tersebut, politik keraton terbelah menjadi dua bagian, yaitu kelompok *kasepuhan* yang mendukung Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh) dan kelompok *kanoman* pendukung Sultan Hamengku Buwono III (Sultan Raja).[62]

T.S. Raffles menekan Sultan Sepuh dengan mendapat dukungan Sultan Raja dan Pangeran Notokusumo yang berakhir dengan serangan Inggris ke Keraton Yogyakarta. Sultan Sepuh kembali diasingkan di Penang dan Sultan Raja diangkat kembali pada 28 Juni 1812 dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III. Setelah wafat pada 3 November 1814, Sultan Hamengku Buwono III digantikan oleh Pangeran Jarot yang bergelar Sultan Hamengku Buwono IV.[63] Raja baru tersebut kemudian mangkat ketika bertamasya (*pesiyar*) pada 6 Oktober 1822. Kedudukannya kemudian digantikan putranya yang bernama Menol yang masih berusia tiga tahun. Oleh karenanya, raja

---

60 M.C. Ricklefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Matabangsa, 2002), hlm. 527, 528.

61 Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)* (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 9-21.

62 Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)*…, hlm. 24.

63 Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)*…, hlm. 25.

baru bergelar Sultan Hamengku Buwono V dalam memerintah didampingi oleh para wali kerajaan. [64]

Permasalah politik Yogyakarta yang berubah-ubah dan kurang menentu sampai 1822 tidak hanya dirasakan oleh para elit keraton saja. Permasalahan tersebut juga dihadapi oleh masyarakat sekitar Yogyakarta yang mengerucut pada sesuatu yang tidak aman karena pengaruh intrik-intrik politik sosial. Masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya harus hidup dengan membayar 34 beban pajak yang sangat berat.[65] Dengan itu, maka wacana perlawanan kepada pemerintah setelah 1822 semakin menguat.

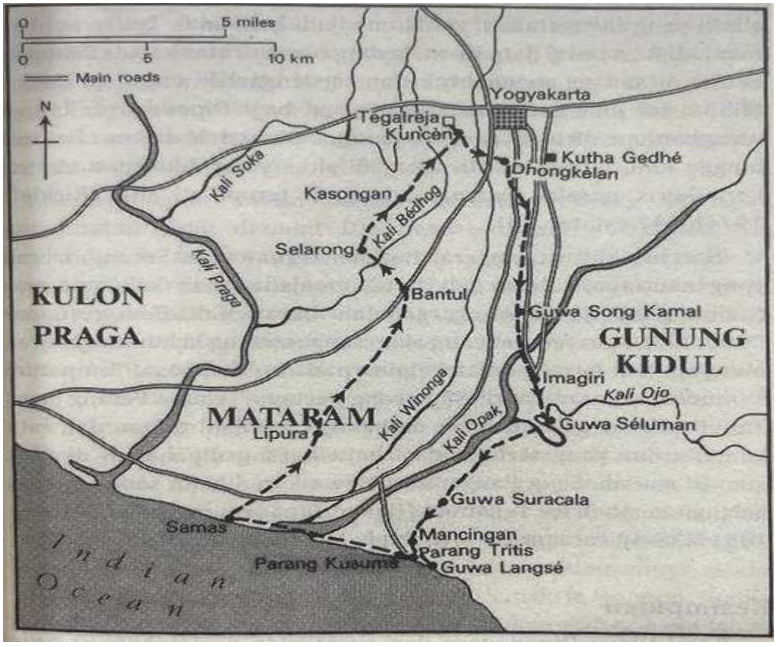

Jalur Perjalanan Pangeran Diponegoro (Carey, 2017).

Pada saat masyarakat merasa jauh dengan pemerintah, Pangeran Diponegoro justru hadir untuk mengunjungi mereka. Pangeran Diponegoro disebutkan sering meniru cara hidup para ulama, seperti diterangkan sebagai berikut: [66]

> *"Saya sering pergi ke Pasar (*Kutha*) Gede, (*Imo*)giri, Pantai Selatan (*Guwa Langse*) dan ke Selarong (...) untuk membantu memanen dan menanam padi yang (membantu) mempopulerkan para pimpinan di antara rakyat."*

Markas Selarong

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat dekat dengan situs-situs penting Mataram yang ada di wilayah selatan—bekas ibu kota Mataram Islam. Lokasi menarik bagi Pangeran Diponegoro justru adalah Selarong yang berada di sebelah barat Sungai Bedog. Tempat baru tersebut sejak 1805 telah sering dikunjungi oleh Pangeran Diponegoro ketika ke Goa Secang. Wilayah Selarong awalnya milik senopati Yogyakarta yaitu Pangeran Sumodiningrat, hanya setelah Juli 1812 dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Nama yang awalnya Raden Antawirya dengan diterimanya wilayah Selarong sebagai *apanage*, maka berubah menjadi Bendara Pangeran Arya Diponegoro.[67]

Setelah menjadi miliknya, Pangeran Diponegoro kemudian merancang Selarong untuk berbagai kebutuhan, seperti kebun, tempat tinggal, dan tempat untuk berdoa. Dengan demikian, Selarong seperti menjadi pusat penting baik sebelum maupun sesudah Perang Jawa terjadi. Sebelum jatuhnya Perang Jawa pada 1825, Pangeran Diponegoro disebutkan sangat sering pergi dan menetap di Selarong.

---

66 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 11.

67 Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* …, hlm. 186.

Keterangan yang menunjukkan usaha tersebut adalah:

> *"Pangeran juga rela bersusah payah menata kebun buah, kebun sayur, dan semak belukar di tanahnya di Selarong, dekat Gua Secang, Kabupaten Bantul di selatan Yogyakarta. Ia juga menggunakan tempat ini sebagai tempat semadi selama bulan puasa dan kemudian memperluas fasilitasnya secara besar-besaran."*[68]

> *"...Tanah di sekitar gua itu telah diubahnya menjadi taman dan satu kamar tidur yang terbuat dari batu karang dipahat di dinding gua. Di sinilah Sang Pangeran melewatkan malam sebelum esok harinya kembali ke Tegalrejo."*[69]

Sebagai tempat ritual, di Selarong juga pernah ditemukan sebuah salinan teks *Jaya Lengkara Wulang* pada Oktober 1825. Dengan ditemukannya teks tersebut, menandakan bahwa Pangeran Diponegoro atau pengikutnya mempelajari aspek kenegarawanan dari kisah berkelananya seorang pemuda untuk menemui seluruh ulama di Jawa. Teks itu merupakan ajaran ideal bagi elite muda di keraton. Ajaran teks yang ditemukan di Selarong ini diduga menjadi acuan bagi Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan-perjalanan ke situs sejarah Mataram.[70]

Pangeran Diponegoro membangun kebun di Selarong dengan sistem pengamanan yang baik. Kebun milik Pangeran Perang Jawa tersebut dikelilingi dengan tembok yang kuat dan tinggi seperti orang dewasa.[71] Oleh karenanya, dengan adanya tembok tersebut kebun buah dan sayuran yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro menjadi lebih aman. Tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro di Selarong merupakan tujuan perjalanan dari Tegalrejo ke berbagai

---

68 Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* ..., hlm. 16.
69 Peter Carey, *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* ..., hlm. 74.
70 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* ..., hlm. 32.
71 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* ..., hlm. 16.

daerah pusat keagamaan di selatan Yogyakarta. Beberapa yang dimaksud adalah Dongkelan dan Kasongan yang salah satunya menjadi pilar negara (*pathok nagari*). Bahkan karena seringnya ke Selarong melalui Kasongan, Pangeran Diponegoro kemudian menjadi menantu dari Guru Kasongan yang terkenal sebagai ulama di wilayah selatan Yogyakarta.[72]

Di dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa Pangeran Diponegoro mendapat bisikan tentang nama baru Sultan Abdul Hamid Erucakra Sayidin Panatagama pada bulan puasa tepat pada 16 Mei 1825 di Selarong.[73] Setelah itu, Pangeran Diponegoro memahami bahwa dirinya adalah pemimpin perang untuk melawan Belanda dan pendukungnya. Percikan pertama perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai dari penolakannya atas rencana pembuatan jalan kecil melalui timur Tegalreja. Pemasangan patok pada 17 Juni 1825 oleh orang Kepatihan membuat Pangeran Diponegoro dan pengikutnya terhalang untuk mengerjakan lahan miliknya. Pangeran Diponegoro kemudian mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai simbol perlawanan.[74]

Untuk merespons peristiwa tersebut, pihak Belanda pada 20 Juni 1825 didukung prajurit Belanda dan Jawa menuju Tegalrejo. Tujuan utamanya adalah untuk menciduk Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi (adik Sultan Hamengku Buwono III). Hanya saja Pangeran Diponegoro dapat meloloskan diri karena sudah mendapat informasi tentang serangan ke Tegalrejo. Informasi itu didapatkan dari para pandai besi yang memasang sepatu kuda kavaleri yang akan menyerang Tegalrejo.[75]

---

72 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*…, hlm. 19.
73 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*…, hlm. 284.
74 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*…, hlm. 292-293.
75 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*…, hlm. 394.

Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi berhasil lolos dan mendirikan tenda di wilayah Kalisoka. Setelah itu, Pangeran Diponegoro menjadikan Selarong sebagai markas perangnya yang pertama.[76] Pangeran Diponegoro juga sudah mempersiapkan perang dengan diawali mengungsikan isti-istri dan anak-anaknya serta pekerjanya yang tua ke Selarong. Mereka oleh Pangeran telah diberi bekal berupa uang dan barang-barang berharga untuk membiayai perang.[77]

Dijelaskan bahwa banyak pengikut Pangeran Diponegoro yang melengkapi diri dengan senjata tradisional dan menyusul ke Selarong. Para bangsawan Yogyakarta berjumlah 23 orang[78] dan beberapa tokoh daerah juga mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kedatangan mereka ke Selarong mulai akhir Juli hingga awal Agustus bertujuan untuk menerima perintah perang dari Pangeran Diponegoro.[79] Kelompok santri dari Baderan, Maja dan Pulo Kadang (dekat Imogiri) semua mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Para kelompok santri tersebut dipimpin oleh Kiai Mojo yang datang ke Selarong untuk menerima perintah Pangeran Diponegoro pada awal Agustus 1825.[80]

---

76 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* …, hlm. 74.
77 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* …, hlm. 293.
78 Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)* …, hlm.57.
79 Daerah lain adalah para petingi militer Demak-Grobogan-Serang yang berafilisasi dengan Kasultanan Yogyakartan, namun kemudian cenderung membela Pangeran Diponegoro. Juga terdapat tokoh Perang Jawa yaitu Sentot Prawirodirjo (putra Raden Ronggo Prawirodirjo III). Mereka oleh Pangeran Diponegoro di Selarong diajak melakukan perang sabil dan kemudian diangkat menjadi Senopati Perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro. Lihat Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* …, hlm. 305, 314, 322.
80 Peter Carey, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)* …, hlm. 317.

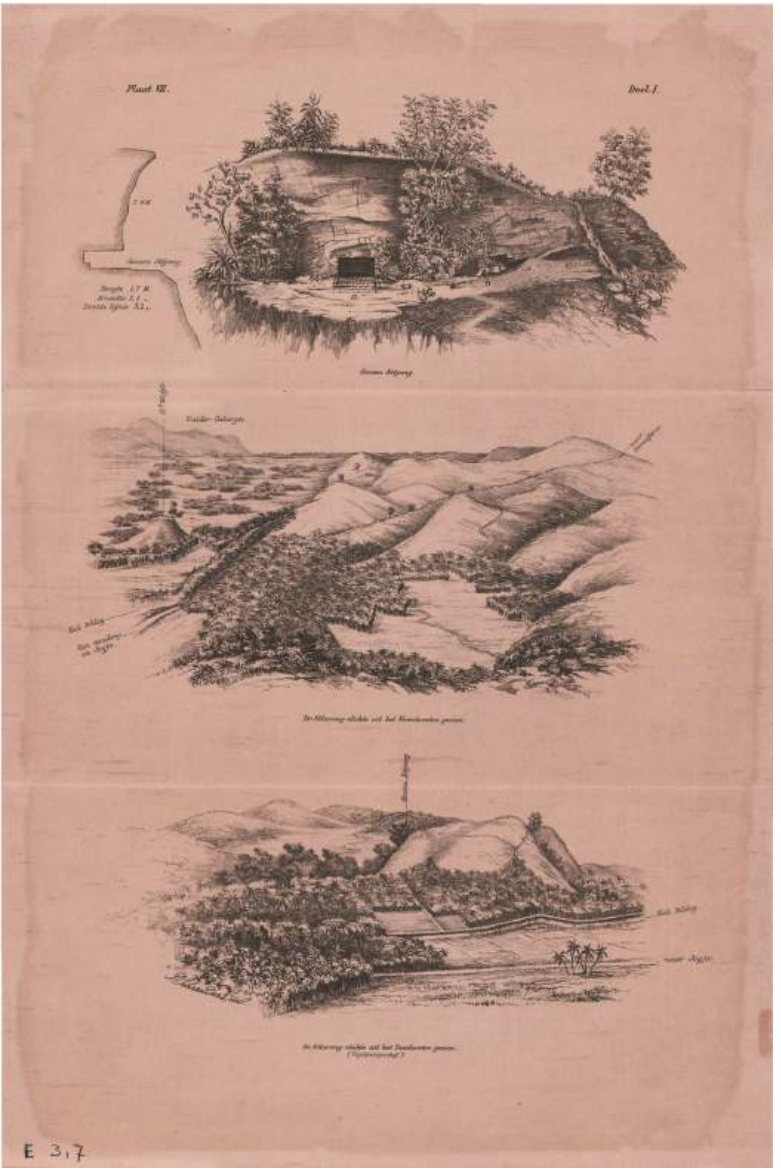

Gambar Goa Secang dan Selarong (Sumber: *Katalog Pameran Seabad Kearsipan*, 1992).

Secara resmi Perang Jawa digaungkan oleh Pangeran Diponegoro di Selarong. Bahkan di markas Selarong inilah Pangeran Diponegoro telah membuat cap untuk surat-surat resminya. Cap kebesaran gelar kerajaan dari Pangeran Diponegoro tersebut disandingnya di Selarong pada 15 Agustus 1825.[81]

Pada akhir Juli 1825, pasukan Belanda melakukan serangan bersenjata ke Selarong. Dalam serangan itu, seorang pejabat Residen Surakarta Hendrik Mauritz MacGillivray yang terlibat dalam perang Jawa hampir berhasil membunuh Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi.[82] Pada 25 September 1825 pasukan Belanda pimpinan Jenderal De Kock tiba di Yogyakarta[83] untuk melakukan pengepungan atas Selarong.

Ada sebuah sebuah gambar yang menerangkan terjadinya perang di Selarong pada Oktober 1825. Pada gambar itu telah diperlihatkan adanya bendera dengan simbol Erucakra.[84] Keterangan pada gambar dari KITLV Or 13 (*Babad Kedung Kebo*) menunjukkan bahwa ada peperangan besar di Selarong antara Pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan Belanda yang didukung prajurit Keraton Yogyakarta. Selarong kemudian menjadi hal yang begitu penting bagi awal Perang Jawa yang berlangsung selama lima tahun (1825–1830).

Pertempuran Selarong (Sumber: KITLV Or 13 *Babad Kedung Kebo*).

Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal De Kock secara perlahan menyerang pertahanan Pangeran Diponegoro di Selarong. Pada pertempuran awal Oktober 1825, seorang Arab bernama Ahmad—putra dari Syaikh Abdul Ahmad bin Abdullah al-Ansari dari Jeddah—gugur di markas Pangeran Diponegoro itu.[85] Selarong kemudian dapat dikuasai oleh Pasukan Belanda sejak 4 Oktober 1825.[86]

Pada 24 Oktober 1825 Jenderal de Kock mengetahui jika Pangeran Diponegoro berada di tepi barat Sungai Bedog. Jenderal de Kock dengan kekuatan tiga kolone (1.258 orang) mengejar Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Dua kolone di antaranya dipimpin oleh Mayor Sollewijn dan Kapten van de Polder dan satu kolone dipimpin oleh perwira Eropa lainnya. Tiga kolone pasukan tersebut

semua berkedudukan di Bantul.[87]

Usaha Jenderal de Kock dan pasukannya mengejar Pangeran Diponegoro dengan pengikutnya digambarkan sebagai berikut:

> *"Jenderal de Kock berangkat bersama kolone pertama ke Srandakan. Di Desa Jeblok gerakan pasukan dihadang oleh pasukan Diponegoro dan terjadi pertempuran hebat. Pasukan kolone kedua dan kolone ketiga (*centrum*) yang menuju ke arah utara tiba di Kasihan. Diponegoro ternyata memang berada di desa tersebut. Ia mengonsentrasikan pasukannya di desa itu untuk menghadang pasukan lawan sehingga pecahlah pertempuran."*

Berdasarkan kutipan tersebut Jenderal de Kock berhasil memasuki beberapa desa di wilayah Bantul. Hal itu terlihat ketika beberapa nama tempat di Bantul seperti Srandakan, Jeblok, dan Kasihan menjadi titik-titik pergerakan pasukan Belanda dalam mengejar Diponegoro dan pengikutnya. Pergerakan pasukan Belanda di beberapa tempat itu juga menunjukkan jika pasukan Belanda telah menguasai beberapa wilayah di sekitar Selarong.

Perang Jawa di Sekitar Bantul

Kawasan yang setelah Perang Jawa usai disebut sebagai Bantoel Karang, pada 1826 masih menjadi ajang bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Diterangkan bahwa pada 16 April 1826 terjadi pertempuran antara laskar Pangeran Diponegoro dengan pasukan Belanda-Jawa di Pleret. Serangan ke Pleret tersebut dipimpin oleh Jenderal Van Geen untuk memukul pasukan Diponegoro yang ada di sekitar ibu kota Mataram lama tersebut.[88]

Pertempuran di Pleret terjadi lagi pada 9 Juni 1826. Pertempuran

---

87 Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830* (Jakarta; Penerbit Komunitas Bambu, 2014), hlm. 45.

88 Sagimun M.D., *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)* …, hlm. 331.

lanjutan dari April 1826 ini merupakan pertempuran besar. Pasukan Belanda pimpinan Kolonel Cochius bersama pasukan Mangkunegaran sengaja menyerang Pleret yang penuh dengan pasukan Diponegoro. Namun, pertahanan pasukan Diponegoro di Pleret masih berhasil dipertahankan dengan gagah berani. Komandan yang menahan serangan Belanda-Jawa atas Pleret adalah Kertapengalasan yang didukung oleh rakyat serta militan Pangeran Diponegoro.[89]

Pertempuran selanjutnya masih terjadi di sekitar Bantul. Pasukan Belanda mengatur strategi perang untuk mengunci pasukan Pangeran Diponegoro di wilayah selatan Yogyakarta. Pada 4 Agustus 1826 kekuatan pasukan Belanda yang selesai menyerang Dekso dialihkan untuk menyerang pasukan Diponegoro di Bantul. Pasukan Belanda yang menyerang Bantul dipimpin oleh Mayor Le Bron dan Mayor Sollewijn. Serangan pimpinan dua perwira pasukan Belanda tersebut dihadapi langsung oleh Pangeran Diponegoro di Bantul.[90]

Peristiwa penting Perang Jawa lainnya juga terjadi di Bantoel Karang pada tengah malam 4 Mei 1828. Pasukan Belanda pimpinan Sollewijn menyerang Bantoel Karang dan terjadi beberapa pertempuran dengan laskar Diponegoro sampai Juni 1828. Kemudian di wilayah Bantoel Karang didirikan sebuah benteng milik Belanda untuk mengontrol gerakan pasukan Pangeran Diponegoro.[91] Kekuasaan militer Belanda di Bantul dipegang oleh pasukan batalion ekspedisi (Kolone Mobil X) pimpinan Kapten Prager. [92]

Hal penting selanjutnya adalah terjadi di Mangir. Rombongan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Notodiningrat yang menuju ke Yogyakarta melalui jalur selatan disambut oleh para pembesar

89 *Ibid.*
90 *Ibid.*
91 Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830*…, hlm. 124.
92 Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830*…, hlm. 124, 215.

Yogyakarta di Mangir. Salah satunya adalah Residen Yogyakarta Van Nes. Peristiwa penting lainnya terjadi di Imagiri tentang adanya perundingan antara pihak Belanda dengan Sentot Prawirodirjo. Disebutkan bahwa Sentot pada 17 Oktober 1829 bersedia mengakhiri perlawanannya dengan beberapa syarat yang diajukan. Sentot Prawirodirjo akhirnya dapat masuk Kota Yogyakarta pada 24 Oktober 1829.[93]

Pada masa awal pelaksanaan strategi Benteng Stelsel, dibangun beberapa benteng di wilayah Bantul. Pada 1826, wilayah di Bantul belum terdapat bangunan benteng untuk mengepung gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada 1827 disebutkan terdapat benteng didirikan oleh Belanda di Imogiri. Setelah 1828 dibangun beberapa benteng seperti: Mangir, Pedes, Jodog, Mangiran, Bedog, Bantoel Karang, Krapyak, Padoan, Srandakan, dan lainnya.[94]

Benteng milik Belanda seperti di Imogiri disebutkan hanya dapat memuat 10 orang saja, namun benteng yang berada di Bantul dapat menampung 26 orang prajurit Belanda.[95] Untuk kawasan luas Bantul sampai berakhirnya Perang Jawa tidak ada yang disebut sebagai medan kritis. Namun, terdapat benteng di kawasan Bantul yang dilengkapi dengan lebih dari dua pucuk meriam. Beberapa benteng yang dimaksud antara lain seperti Pijenan, Mangiran, Bantul, dan Gamplong. [96]

94 Saleh As'ad Djamhari, *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830*…, hlm. 238-239.

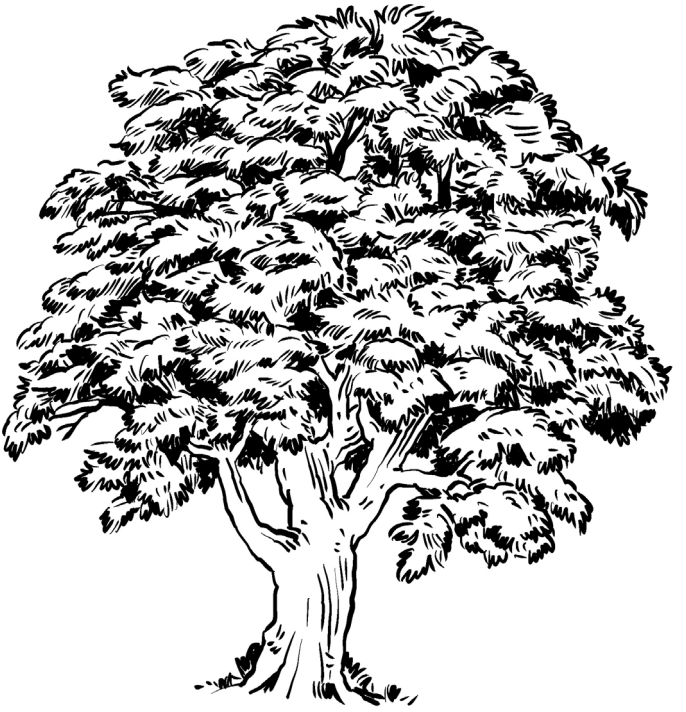

BAB 4

LAHIRNYA PEMERINTAHAN BANTUL

Kasultanan Yogyakarta dan Pembagian *Wewengkon* Pasca-Perang Jawa

Lambangipun karaton kekalih malih,
Karoya sempal semune tanpa gegaman,
Tegesipun nagari kekalih sami kalong bawahipun[97]

Sejarah Kabupaten Bantul memiliki akar yang bertalian erat dengan Perang Jawa. Pergolakan politik besar terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu memainkan peran kunci dalam pembentukan wilayah-wilayah di sekitar Yogyakarta. Pada masa sebelumnya, wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Bantul ini adalah bagian dari Kasultanan Yogyakarta yang merupakan pusat pemerintahan Jawa.

Terjadi perubahan signifikan pada wilayah kerajaan (*vorstenlanden*) saat Perang Jawa padam pada Maret 1830. Kasultanan Yogyakarta melakukan reorganisasi wilayah dan pembaruan administrasi untuk

memperkuat kontrolnya atas wilayah-wilayah yang baru direbut dari Diponegoro. Kasultanan Yogyakarta membagi wilayah baru yang mencakup berbagai kabupaten. Pembentukan Kabupaten Bantul tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kendali Kasultanan Yogyakarta atas wilayahnya yang baru direbut, tetapi juga untuk mengatur administrasi, perpajakan, dan pemerintahan.

Sementara kolonial Belanda mempunyai alasan untuk memperluas jangkauan kekuasaan dan pengawasan pemerintahannya terhadap pemerintahan kedua kerajaan, Yogyakarta dan Surakarta beserta kawulanya di daerah pedesaan. Pemerintah kolonial juga mempunyai alasan untuk mempersempit dan mengecilkan daerah wilayah kedua kerajaan tersebut. Semua ini dapat dicapai oleh pemerintah Belanda dengan jalan memaksakan penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian antara kedua penguasa kerajaan Jawa, yaitu Sunan dan Sultan di satu pihak dan pemerintah Belanda yang diwakili oleh residen di pihak lain. Maka dari itu secara berturut-turut kontrak-kontrak yang penting ditandatangani antara lain pada 22 Juni 1830, 27 September 1830, 3 November 1830, dan penetapan-penetapan lainnya pada 26 dan 31 Maret 1831, 22 Juni 1831,[98] 28 April 1831, 24 Desember 1832, 1 November 1851, 13 Februari 1855, 24 April 1861, 14 Desember 1899, bahkan hingga 27 Juni dan 12 September 1901.[99]

Pejabat Belanda yang mewakili pemerintahan Belanda antara lain ialah P. Merkus, J.I. van Sevenhoven dan H.G. Nahuys van Burgst, serta Residen Surakarta J.W.H. Smissaert dan pihak Kasunanan Surakarta diwakili oleh Adipati Sosrodiningrat II (Patih) dan Panembahan Buminata, sedangkan pihak Kasultanan Yogyakarta diwakili oleh Adipati Danurejo IV (Patih) dan Panembahan Mang-

98 "Sejarah Bantul", https://www.oocities.org/h_artono/bantul/sejarah.htm
99 G.P. Rouffaer, *Vorstenlanden*, Encyclopedie van Nederlandsch-Indie IV, ,s-Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-NV-E.J. Brill, 1921, hlm. 596-599

kurat (putra Sultan Hamengku Buwono II). Pada perjanjian di Yogyakarta, pihak pemerintah diwakili oleh P. Merkus dan J.I. van Sevenhoven sedangkan pihak Kasultanan Yogyakarta diwakili oleh Panembahan Mangkurat, Pengeran Mangkukusuma, dan Adi Winata.[100]

Penandatanganan kontrak ini mengakibatkan kedua kerajaan kehilangan wilayah *mancanegara* dan konsekuensi-konsekuensi lainnya. Reorganisasi terjadi ketika Kasunanan Surakarta mendapatkan wilayah Pajang dan Sukawati sementara Kasultanan Yogyakarta mendapatkan wilayah Gunungkidul. Selain itu, ditentukan juga perlunya penataan kembali atau pembagian wilayah administrasi baru dengan tingkat pemerintahan yang berbeda sesuai dengan keinginan pemerintah kolonial. Di antaranya adalah pemekaran wilayah pemerintahan kabupaten (*regentschap*) dengan pengangkatan kepala daerah–bupati (*regent*) serta pembentukan pengadilan daerah baru (*inlandsce rechtbank*) di wilayah Kasultanan yang harus mendapat persetujuan Belanda. Termasuk juga jaminan keamanan melalui kepolisian pemerintah Belanda. Serangkaian perubahan penting di wilayah Kasultanan Yogyakarta tersebut dilakukan pada 1831.[101]

Rouffaer menyebut Sultan Hamengku Buwono V—yang diwakili para wali[102]—membagi wilayah administrasi di Yogyakarta menjadi tiga bagian:

---

100 Djoko Suryo, "Dari Vorstenlanden Ke DIY: Kesinambungan dan Perubahan", Konferensi Nasional Sejarah IX, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011, hlm.8-9.

101 *Ibid.*

102 Perwalian dipegang Pangeran Mangkukusumo dan Pangeran Adiwinata (keduanya putra Hamengku Buwono I) sejak 21 Januari 1828 serta ditambah dengan kembalinya Pangeran Mangkubumi/Panembahan Mangkurat sebagai wali Sultan Hamengku Buwono V selepas padamnya Perang Jawa pada 1830. A.S. Dwidjasaraja, 1935, *Ngajogjakarta Hadiningrat. Djilid Satoenggal. Kraton Ngajogjakarta*, Yogyakarta: Mardi-Moelja, hlm.27.

1. Mataraman, pusat Yogyakarta yang terletak antara Kali Progo dan Kali Opak, suatu *negaragung* dalam skala kecil;
2. Kulon Progo, terletak tanah lungguh Pangeran Pati dan Mangkubumi serta tanah Pakualam dan beberapa tanah *mancanegara*;
3. Gunungkidul, terdapat tanah-tanah *mancanegara* dan disediakan untuk *pamajegan dalem* (pajak kepada sultan).[103]

Mataraman, yang menjadi bagian dari *negaragung* ini, kemudian dibagi lagi menjadi tiga *wewengkon* (wilayah) yang dalam administrasi kolonial dinamakan *regentschap*, yaitu Kabupaten Bantul (Bantool/Bantoel) yang terletak di bagian selatan, Kabupaten Denggung (yang kemudian berubah menjadi Sleman) di bagian utara, dan Kabupaten Kalasan di bagian timur. Tiap kabupaten dibagi menjadi beberapa wilayah distrik. Masing-masing kabupaten dikepalai oleh seorang *regent*, dan masing-masing mendapat gelar: *mantri*, *tumenggung*, dan *rangga*. Setiap distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik. Semua ini dilakukan dengan persetujuan pihak pemerintah Belanda.[104] Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantoel Karang.[105]

---

103 G.P. Rouffaer, *Dunia Swapraja. Sketsa Sistem Pemerintahan, Agraria dan Hukum* (disadur M.Husodo Pringgokusumo), Yogyakarta: Kasan Ngali, 2021, hlm.58.
104 *Ibid.*
105 "Sejarah Bantul", https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030004/sejarah-bantul.html

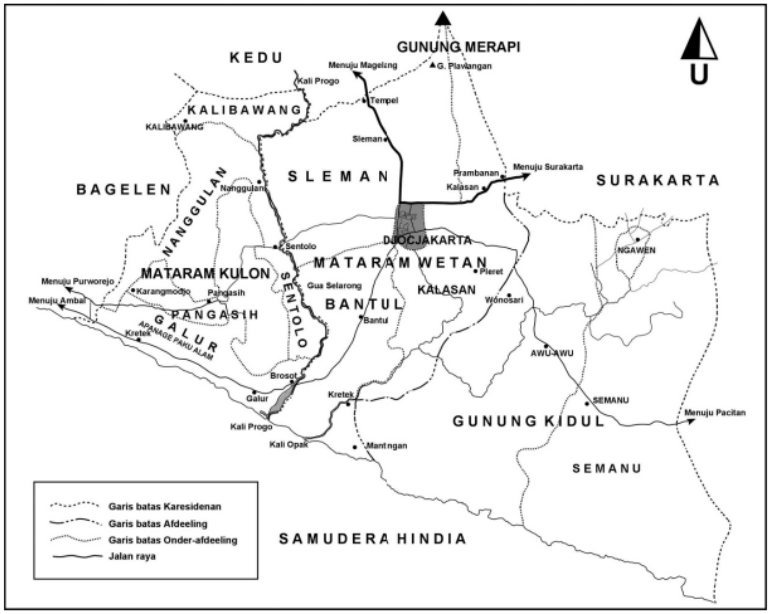

Peta Karesidenan Yogyakarta (1857). (Sumber: Riya Sesana, "Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kasultanan Yogyakarta, 1877–1921", *Tesis*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2010).

Pembaruan administrasi pemerintahan dan birokrasi pemerintahan keraton tersebut tidak mengalami perubahan sampai masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI. Baru setelah itu, terjadi perubahan-perubahan lebih lanjut. Pembagian wilayah kabupaten ini selanjutnya disusun kembali oleh Sultan Hamengku Buwono VIII. Sebelumnya, pada masa Hamengku Buwono VII, wilayah kabupaten dibagi menjadi enam wilayah: Kulon Progo, Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kalasan dan Gunungkidul. Seperti yang berlaku di daerah *Gubernemen*, masing-masing kabupaten kemudian dibagi menjadi sejumlah distrik, dan tiap distrik dibagi menjadi beberapa onderdistrik. Kepala distrik disebut *panji* kemudian diubah menjadi

wedana, kepala onderdistrik disebut asisten *panji* diubah menjadi asisten *wedana*, seperti yang berlaku di daerah *gubernemen*.[106]

Pada 1867, *Regentschap* Bantul terbagi dalam 13 distrik dengan 739 desa.[107] Di dalam laporan kolonial terkait jumlah penduduk bumiputra di wilayah Bantul pada 1845 berjumlah 53.279. Selama dua puluh dua tahun kemudian jumlah penduduk di wilayah Bantul mengalami kenaikan. Pada 1867, jumlah penduduk bumiputra di Bantul berjumlah 61.514.[108] Di dalam data statistik yang lebih lengkap, pada tahun itu, di samping orang-orang bumiputra, di Bantul juga tinggal warga asing, dengan rincian: komunitas Eropa sebanyak 30 dan komunitas Cina sebanyak 79 (sementara pada tahun itu tidak ada data komunitas orang Arab yang menetap di wilayah Bantul). Total jumlah penduduk secara keseluruhan dari beberapa ras sebanyak 61.623 orang.[109] Sementara pada 1869, data statistik kolonial menyebutkan wilayah Bantul mengalami jumlah penurunan penduduk menjadi 53.280 jiwa.[110]

---

106 Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm.11. Perubahan nama jabatan dari *panji* menjadi *wedana* dan asisten *panji* menjadi asisten *wedana* terjadi pada masa Sultan Hamengku Buwono VIII tahun 1926. Sementara nama jabatan lurah (di bawah asisten *panji*/*wedana*) baru muncul pada 1918. Sebelumnya wilayah desa berada di bawah wewenang *bekel*. Jabatan *bekel* ini kemudian dihapuskan. Lihat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017, hlm. 153-154.

107 *Bevolking en indeelingstaat van Java en Madura, volgens officiële opgaven*, 'Sgravenhage: Martinus Nijhoff, 1867, hlm.16.

108 Pieter Bleeker, *Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingsstatistiek van Java*, 'SGravenhage: Martinus Nijhoff, 1870, Hlm.112

109 *Ibid.*, hlm.108-109.

110 Pieter Johannes Veth, *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie I*, Amsterdam: P. N. Van kampen, 1869, hlm.95.

Data Wilayah dan Penduduk Bantul 1867[111]

Distrik	Jumlah desa	Jumlah bumiputra
Celep	23	2658
Samen	37	4295
Bungkus	48	4143
Pucanganom	50	4267
Panggang	56	6295
Lipuro	46	4414
Cepit	60	5235
Soka	39	6467
Pekojo	96	6199
Kretek	50	4474
Kwarasan	48	4424
Gabusan	50	4284
Pandes	38	4359

Reorganisasi administratif terus berlangsung di wilayah Bantul, *Regeerings Almanak Nederlandsch-Indie* 1884 menyebut wilayah Bantul terbagi dalam 8 distrik: Pasargedhe (60 desa), Kretek (101 desa), Srandakan (126 desa), Sewon (118 desa), Cepit (117), Pandak (226 desa), Panggang (137 desa), dan Canden (120 desa)[112]. Perkembangannya, dalam *Regeerings Almanak Nederlandsch-Indie* 1912, distrik seperti Imogiri dan Jejeran —awalnya masuk wilayah Sleman— telah masuk dalam wilayah Bantul.[113] Sementara berdasar pada *Rijksblad*

111 *Bevolking en indeelingstaat van Java en Madura, volgens officiële opgaven*, 'Sgravenhage: Martinus Nijhoff, 1867, hlm.16.
112 *Regeerings Almanak Nederlandsch-Indie* 1884 I, Batavia: Landsrukkerijk, 1884, hlm.32.
113 *Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie* 1912, S. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912, hlm.712.

van Jogjakarta nomor 11 tahun 1916, wilayah Bantul terbagi dalam 4 distrik: (1) Cepit yang terdiri dari dalam 6 onderdistrik dan 52 desa, (2) Srandakan yang terdiri dari dalam 8 onderdistrik dan 53 desa, (3) Imogiri Yogya yang terdiri dari dalam 3 onderdistrik dan 15 desa serta (4) Kretek yang terdiri dari dalam 8 onderdistrik dan 44 desa.[114]

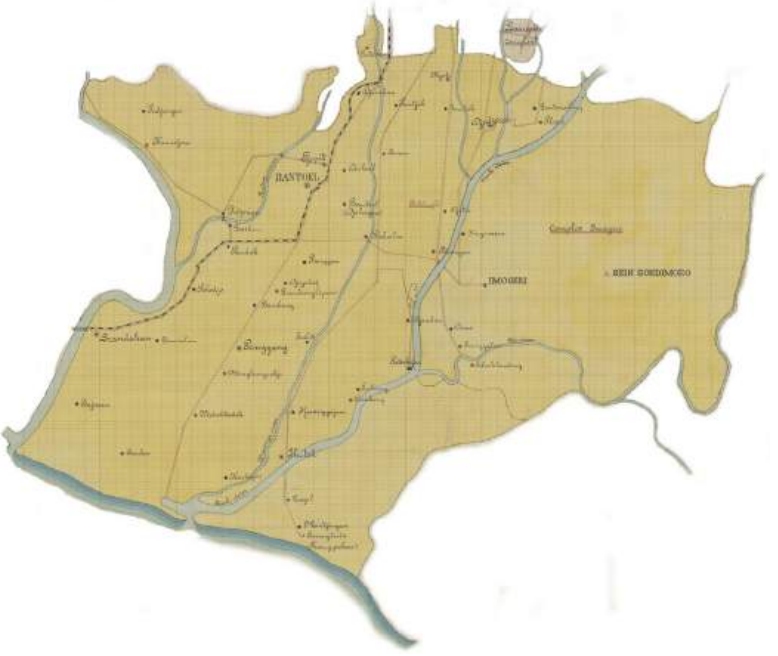

Peta *Regentschap* (Kabupaten) Bantul (Bantoel) 1890. (Sumber: *Kaart van de afdeeling Mataram* (*Residentie* Jogjakarta). digitalcollections.universiteitleiden.nl.

Pada 1917, terjadi reorganisasi ditingkat onderdistrik, yakni terjadi penggabungan-penggabungan wilayah di Distrik Srandakan seperti Onderdistrik Bambang yang digabungkan menjadi satu dengan Onderdistrik Jagadayoh, Onderdistrik Bajuran yang disatu-

114 Artaqi Bi Izza Al-Islami, "Proketen dari Masa ke Masa", naskah, 2023, hlm.9.

kan dengan Onderdistrik Srandakan, dan Onderdistrik Sanden yang disatukan dengan Onderdistrik Gumulan; di Distrik Cepit wilayah Onderdistrik Bakulan disatukan dengan Onderdistrik Jarakan. Pada 1920, penyatuan terjadi lagi di Distrik Kretek, yakni Onderdistrik Wuluhadeg disatukan dengan Onderdistrik Panggang. Pada 1921, Bantul kehilangan beberapa wilayahnya di Kebonongan yang meliputi 32 desa. Pada 1923, Onderdistrik Gandok disatukan dengan Onderdistrik Sewon (Distrik Cepit) serta Onderdistrik Grogol disatukan dengan Onderdistrik Kretek (Distrik Kretek). Pada 1926, terjadi reorganisasi di tingkat distrik, yakni terjadi penggabungan beberapa distrik. Di Bantul, penggabungan dilakukan terhadap Distrik Cepit, Srandakan, dan Kretek.[115]

Dengan demikian secara administratif, wilayah Bantul dipadatkan dalam beberapa distrik yang lebih sedikit. Pada 1927, Kabupaten Bantul terdiri dari 4 distrik yang membawahi 21 onderdistrik dan meliputi 274 desa. Hingga akhir masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII (1939), secara spesifik wilayah administrasi Bantul masih sama.[116] Pembagian administratif Kabupaten Bantul tetap tidak berubah masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX.

Para Bupati (*Regent*)

Pada struktur kekuasaan masyarakat tradisi Jawa, bupati beserta keluarganya dan kerabatnya menduduki posisi-posisi pemerintahan lokal. Mereka menjadi elite sosial-lokal atau kelompok bangsawan lokal. Mereka masih kerabat raja (sultan).

---

115 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.,* hlm. 155-157.

116 Djoko Suryo, *loc.cit.* Lihat juga P.J. Suwarno, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hlm.54. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *loc.cit.*

Bupati sebagai puncak hirarki pemerintahan dan kebangsawanan lokal itu, di daerah menjadi elite politik yang menduduki fungsi-fungsi pemerintahan, militer, dan ekonomi.[117] Bupati memiliki otoritas tertinggi untuk memerintah dengan memberi perlindungan, pengadilan, menjamin keamanan dan tata tertib serta memungut pajak dan *rajakarya* (pengerahan tenaga).

Pasca-Perang Jawa dan munculnya *cultuurstelsel*, secara umum pemerintah kolonial berusaha melakukan refeodalisasi kekuasaan bupati. Kekuasaan bupati atas desa dikembalikan, tetapi tidak seperti dulu. Pengaruh dan kekuasaan bupati dipergunakan untuk menggerakkan ekonomi perkebunan yang berkembang di wilayahnya (indigo, nopal, kopi, dan tebu). Masa Politik Liberal (1870) berbeda, bupati tidak lagi hanya mengurusi ekonomi perkebunan tetapi juga urusan-urusan lain yang memerlukan pengaruh bupati.

117 Soehardjo Hatmosoeprobo, *Bupati-Bupati di Jawa pada Abad 19,* Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986, hlm.3.

[kiri] Lukisan payung dari para pejabat sultan Yogyakarta untuk bupati, termasuk bagi Bupati Bantul. Lukisan dibuat sekitar tahun 1900. [Sumber: J.H. Maronier, *Pictures of the Tropics: a Catalogue of Drawings, Water-Colours, Paintings, and Sculptures in the Collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden*, 's-Gravenhage: Nijhoff, 1967, hlm. 118 (*digitalcollections.universiteitleiden.nl*)]

[kanan] Foto payung (*songsong*) pejabat bupati, termasuk bupati Bantul yang dibuat fotografer Kassian Cephas pada 1895. (Sumber: *digitalcollections.universiteitleiden.nl*)

Struktur pemerintah bumiputra kemudian diperluas dengan menambah jabatan *wedana* distrik dan asisten *wedana* onderdisrik. Jabatan-jabatan baru ini diisi orang-orang dari lingkungan bangsawan lokal. Karena itu *pangreh praja* menjadi korps yang anggota-anggotanya terkait satu sama lain dan tidak hanya karena profesi, tetapi juga karena jalinan kekeluargaan.[118] Wilayah Bantul dalam konsep lingkaran konsentris (*mandala*) Jawa—yang telah dikembangkan sejak Sultan Agung—berada pada wilayah *kutagara* (*negara agung/ negaragung*). Secara umum *kutagara* dahulu dipimpin oleh *wedana* Jawi yang dibantu seorang *kliwon*, seorang *kabayan*, dan 40 *mantri jajar*. Semuanya tinggal di wilayah *kutagara*.[119]

> Bupati harus mengabdi dan setia pada raja secara pribadi. Ia wajib mengetahui semua hal yang terjadi dalam daerahnya, untuk itu pada saat-saat tertentu dia bersama dengan sekelompok pengawal bersenjata berkeliling pada malam hari untuk menyelidiki keadaan dan kepuasan hati penduduk di dalam daerahnya. Kadang-kadang kalau situasi menuntut dia dengan diam-diam berada di tengah-tengah rakyat (*nyamur kawula*) bergaul dengan mereka untuk mengetahui sendiri apa dan bagaimana pendapat umum di masyarakat.[120]

Perubahan modern kolonial—meski wilayah swapraja berbeda—melalui *Regerings Reglement* 1854 memberi penguatan atas posisi bupati, tetapi kontrol kolonial tetap diberlakukan, langsung maupun tidak langsung. Mereka masih berasal dari kalangan priyayi yang dianggap "cakap, rajin, jujur, dan setia".

---

118 *Ibid.*, hlm8–9.
119 P.J. Suwarno, *Pelestarian Peranan Ganda Bupati*, Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986, hlm.6–7.
120 *Ibid.*, hlm. 10-11.

> …Penduduk hendaklah berada di bawah pengawasan pemimpin-pemimpin (bupati) sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui pemerintah (kolonial), yang tunduk pada supervisi yang lebih tinggi yang ditetapkan dengan peraturan umum maupun khusus…[121]

Residen Yogyakarta tetap mengawasi para bupati. Seorang *nayaka*[122]—pejabat tinggi kerajaan—Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sultan Hamengku Buwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul pertama.[123] Di dalam terbitan-terbitan kolonial terkait dengan struktur pejabat di wilayah Hindia Belanda, seperti dalam *Almanak van Nederlandsch-Indië* atau dalam *Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie* yang diterbitkan tahunan, nama-nama pejabat kolonial maupun bumiputra akan selalu dituliskan, termasuk para bupati. Catatan struktur kekuasaan Yogyakarta akan menjelaskan tentang "*personeel in de Binnenlanden*" yang di dalamnya termuat nama-nama bupati, termasuk Bupati Bantul (Bantoel Karang).

121 *Ibid.*, hlm.21
122 Soemarsaid Moertono, *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*, Jakarta: KPG, 2018, hlm.233.
123 "Sejarah Bantul", https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030004/sejarah-bantul.html

Daerah Bantul Karang Saat Ini.
(Dokumentasi Foto: Early Danendra, 2023)

Pada kurun waktu sejak Sultan Hamengku Buwono V hingga VIII, setidaknya telah ada 11 bupati yang memimpin wilayah Bantul:

1. Raden Tumenggung Mangun Negoro
2. Raden Tumenggung Jayadiningrat
3. Raden Tumenggung Tirtonegara
4. Raden Tumenggung Nitinegara
5. Raden Tumenggung Danukusuma
6. Raden Tumenggung Djojowinoto
7. Raden Tumenggung Djojodipuro
8. Raden Tumenggung Surjokusumo
9. Raden Tumenggung Mangunyudo
10. K.R.T. Purbadiningrat
11. K.R.T. Dirdjokusumo

Raden Tumenggung Dirdjokusumo, Bupati Bantul pada 1920.
(Sumber: https://collectie.wereldculturen.nl)

DATON — PLERET

BAB 5

BANTUL DAN PERUBAHAN SISTEM EKONOMI PERKEBUNAN

Indigo, Tembakau, hingga Gula

Tumbuhnya ekonomi perkebunan—dengan kebijakan penyewaan lahan—di Yogyakarta tidak lepas dari hubungan keraton dengan kolonial Belanda. Lantaran relasi yang pelik dengan pemerintah Belanda, Sultan Hamengku Buwono V lewat Ratu Ageng, akhirnya bersikap akomodatif terhadap Residen Huibert Gerard Nahuys van Burgst yang membuka kebijakan penyewaan lahan Kasultanan kepada pengusaha Eropa dan Tionghoa.[124] Hal ini membawa perubahan bagi orang swasta Eropa. Selepas Perang Jawa, ketenangan hidup dirasakan, terutama oleh warga Eropa di Yogyakarta. Pada 1845, Kota Yogyakarta yang berpenduduk sekitar 45.000 orang dengan mayoritas (95%) merupakan orang Jawa, populasi orang Eropa mencapai sekitar 600 orang, dan orang Tionghoa sekitar 1.000

124 Peter Carey dan Vincent Houben, P*erempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX*, Jakarta: KPG, 2018 hlm. 72–75.

orang.[125] Di dalam perkembangannya, terjalin relasi antara Sultan Hamengku Buwono V dengan beberapa penyewa lahan Eropa. Lahan yang disewakan ini—yang sudah ada sejak masa Sultan Hamengku Buwono IV dan acap ditentang kerabat Keraton Yogyakarta hingga masa awal pengangkatan Sultan Hamengku Buwono V—menjadi titik mula hadirnya "kapitalisme modern" melalui tumbuhnya perkebunan-perkebunan Eropa.[126]

Di tengah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V, industri perkebunan utama yang berkembang di Yogyakarta adalah industri indigo (nila), selain gula. Pada 1837, tanah yang disewakan untuk perkebunan mencapai 167 *jung* dan sepanjang tahun tersebut terdapat total 16 penyewa tanah di Yogyakarta. Adapun rinciannya, yakni 14 orang penyewa Indo-Eropa, 1 orang Tionghoa, dan 1 orang Melayu (pribumi). Perkebunan yang dikembangkan ini terkonsentrasi di sekitar Yogyakarta. Pada 1839, lebih dari 890 *bau* lahan telah ditanami indigo dan terdapat 14 pabrik yang telah atau sedang didirikan di Yogyakarta. Setahun berikutnya (1840) terdapat 18 pabrik indigo, baik yang telah beroperasi ataupun yang sedang dibangun.

Pada 1851, jumlah lahan yang ditanami indigo secara menyeluruh mencapai 5.000 *bau*. Sementara pada 1854, tercatat rincian tanah yang disewa, yakni 8 bidang tanah berukuran kurang dari 100 *bau*, dua puluh tiga bidang tanah berukuran 100-500 *bau*, empat bidang tanah berukuran 500-1.000 *bau*, dan hanya satu bidang tanah berukuran lebih dari 1.000 *bau*. Dalam catatan kolonial, selama rentan waktu tujuh tahun (1847-1854) investasi swasta di Yogyakarta hampir seluruhnya digunakan untuk perkebunan indigo.[127] Kaum

125 Gerrit Knaap, 1999, *Chepas, Yogyakarta. Photography in the Service of the Sultan*, Leiden: KITLV, hlm.1.
126 Heri Priyatmoko, Kuncoro Hadi, Indra Fibiona, "Profil Para Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta", draft naskah, 2022, hlm.95-97, 108–112.
127 Vincent J.H. Houben, 2002, *Keraton dan Kompeni. Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*, Yogyakarta: Bentang, hlm.575-577.

Indo-Eropa yang berbisnis nila nantinya bertransformasi sebagai pengusaha perkebunan tebu (gula), bahwa keluarga mereka punya modal investasi untuk perkebunan gula yang terakumulasi dari industri perkebunan indigo. Hingga tahun 1840, terdapat 100 kontrak gula yang diberikan kepada pabrik milik orang Indo-Eropa. Di sisi lain, era Sultan Hamengku Buwono V, juga terdapat para pengusaha perkebunan tebu Tionghoa. Terdapat 12 pabrik gula dipunyai pengusaha Tionghoa awal 1830-an. Dalam kurun waktu dua tahun berikutnya (1835-1836), terdapat 6 pabrik gula lainnya yang dirikan pengusaha Tionghoa.[128]

Perkembangan industri perkebunan, terutama indigo, semasa Sultan Hamengku Buwono V sudah menunjukkan hal negatif dan merugikan bagi kalangan penduduk bumiputra. Laporan residen merekam fakta ini. Pada 1849, residen mengakui penyewaan tanah oleh orang Indo-Eropa telah bertentangan dengan prinsip, konsep, dan adat istiadat Jawa. Ekspansi perkebunan komersial Eropa menyebabkan Kasultanan Yogyakarta miskin dan sengsara. Tiga tahun berselang (1852), residen mengakui perkebunan indigo telah merugikan penanaman padi.[129] Sultan Hamengku Buwono V tidak mampu mengatasi kerumitan penyewaan tanah lantaran ditekan pemerintah kolonial. Para pengusaha perkebunan Indo-Eropa selalu berlindung kepada residen Yogyakarta untuk menekan raja. Pada 1847, relasi Sultan Hamengku Buwono V dengan residen memburuk gara-gara arogansi residen yang mendukung pengusaha perkebunan Indo-Eropa.[130]

---

128 Abdul Wahid (ed), 2020, *Bersinergi dalam Keistimewaan Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, hlm. 45.
129 Vincent J.H. Houben, *op.cit.,* hlm. 637-638, 647
130 *Ibid.,* hlm. 205-206.

Pada masa Sultan Hamengku Buwono VI (1855), jumlah penduduk di Yogyakarta diperkirakan mencapai 331.662 orang (664 orang Eropa dan yang disetarakan; 1.479 orang Tionghoa; 175 orang Timur Asing; serta 329.344 bumiputra).[131] Masa ini, kebijakan ekonomi kolonial sejak diterapkan *cultuurstelsel* tetap melanggengkan perubahan pengelolaan tanah Kasultanan. Pada 1857, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan sewa tanah di area swapraja yang memberikan ketentuan mengenai syarat penyewaan tanah yang boleh dilakukan dan diakui oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini, secara umum, berupaya memproteksi para penyewa tanah Eropa dari persoalan tuntutan pembayaran ganda oleh pewaris pemilik tanah *apanage*. Masyarakat bumiputra memaknai sistem sewa tanah sama dengan gadai tanah, sehingga para penyewa asing harus membayar kembali uang sewa tanah ketika berganti kepemilikan karena pewarisan, terutama tanah *apanage*.[132] Berkat peraturan baru ini, perkebunan milik orang Eropa makin berkembang di Yogyakarta.

Komunitas Eropa penyewa tanah ini tidak sepenuhnya tinggal di dalam kota, tetapi juga hidup di luar pusat kota. Mereka, yang terakhir ini, orang-orang Eropa yang menjalankan berbagai perkebunan, baik kopi, nila (indigo), tebu, dan tembakau. Kaum Eropa pengelola perkebunan ini dikenal sebagai *landhuurders* (para penyewa tanah). Pada awal kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono VI, penyewaan tanah untuk perkebunan telah menghasilkan komoditas unggulan, paling banyak nila (294.900 *pikul*), kemudian gula (22.810 *pikul*), serta kopi (30 *pikul*).[133]

---

131 *Verslag van het beheer en den staat der Kolonien over 1855.* VERSLAG. (Oost-Indie.) No.2. hlm.2.

132 Endah Susilantini, Dwi Ratna Nurhajarini, dan Suyami, 2014, *Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akir Di Kraton Yogyakarta Kajian Filologis Historis*, Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, hlm.16-17.

133 *Verslag van het beheer en den staat der kolonien over 1855.* Verslag. (Oost-Indie.). No.2. hlm.130.

Akhir 1850-an, pemilik perkebunan nila meraup untung besar dampak peristiwa pergolakan petani nila di Bengal India pada 1859. Catatan kolonial di Yogyakarta pada 1860 menunjukkan peminatan komoditas nila yang cukup tinggi dibanding komoditas lain. Pada tahun tersebut terdapat 52 perusahaan perkebunan dengan rincian 1 perkebunan kopi, 45 perkebunan nila (dengan 60 pabrik), dan sisanya perkebunan tebu.[134] Tetapi setelah itu, perkebunan tebu lebih mendominasi di Yogyakarta. Sejak 1860-an, ketika *cultuurstelsel* perlahan-lahan mulai tergantikan dengan perkebunan swasta, wilayah Yogyakarta telah siap menuju transisi produksi gula secara massal.[135]

Pada 1862, jumlah tanah yang disewakan di Yogyakarta mencapai 46.000 *bau* (sekitar 34.040 hektar).[136] Sementara pada 1865, terdapat 53 perkebunan yang dikelola penyewa Eropa, dengan 42 keluarga penyewa di antaranya telah tinggal di Kasultanan Yogyakarta sejak era kekuasaan Inggris di Jawa (1811-1815).[137] Di dalam perkembangannya, hingga 1877, terdapat 57 perkebunan di Kasultanan Yogyakarta dan diizinkan oleh Sultan Hamengku Buwono VI. Demi keamanan atas pengelolaan perkebunan ini, pada 1868, residen Yogyakarta mendesak Sultan Hamengku Buwono VI untuk menyetujui permintaan tuan tanah penyewa guna menetapkan seorang kepala polisi di setiap tanah yang mereka sewa.[138]

Kebanyakan kaum penyewa dan pemilik perkebunan Eropa ini menjadi keluarga Indis Yogyakarta—karena juga menjalankan adat

---

134 *Verslag van het beheer en den staat der Oost-Indische bezittingen over 1860.* VERSLAG No.2. hlm.135.

135 Ulbe Bosma, 2007, "Sugar and Dynasty in Yogyakarta" dalam Ulbe Bosma, Giusty-Conterro dan Knight (ed.), *Sugarlandia Revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas*, New York: Berghahn Books, hlm.81.

136 Abdul Wahid (ed), 2020, *Bersinergi dalam Keistimewaan. Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, hlm.33.

137 Ulbe Bosma, *op.cit.*, hlm.77.

138 *Java Bode*, 14 November 1868.

Jawa—serta punya kedekatan dengan keraton. Mereka juga terkoneksi satu dengan yang lainnya di antara mereka sendiri. Salah satu penyewa tanah yang penting adalah F.W. Wieseman, pemilik Pabrik Gula dan Nila Bantoel.[139] Wieseman berteman dengan Sultan Hamengku Buwono VI[140] serta terhubung dengan trah Weijnschenk. Pemimpinnya, George Weijnschenk, juga memiliki kedekatan dengan Keraton Yogyakarta.[141] Selama kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono VI, dua nama penyewa Eropa tersebut tercatat dalam daftar nama penduduk Eropa di Yogyakarta pada 1855 hingga 1877.[142]

139 Dalam laporan tahun 1863-1864, industri Indigo milik Wieseman telah menghasilkan 120 pikul. Lihat Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-General, 1863-1864, hlm.606-607.

140 Gerrit Knaap, 1999, *Chepas, Yogyakarta. Photography in the Service of the Sultan*, Leiden: KITLV, hlm.5.

141 Ulbe Bosma, *op.cit.*, hlm.77.

142 *Almanak en Naamregister van Nederlandsch-indie voor 1855*, Batavia, Ter Lands-Drukkerrij, hlm.403. lihat juga Naamlijst der Europesche Inwoners van Nederlandsch-Indie en Opgave Omtrent hun Burgerlijken Stand Voor 1877, hlm.130.

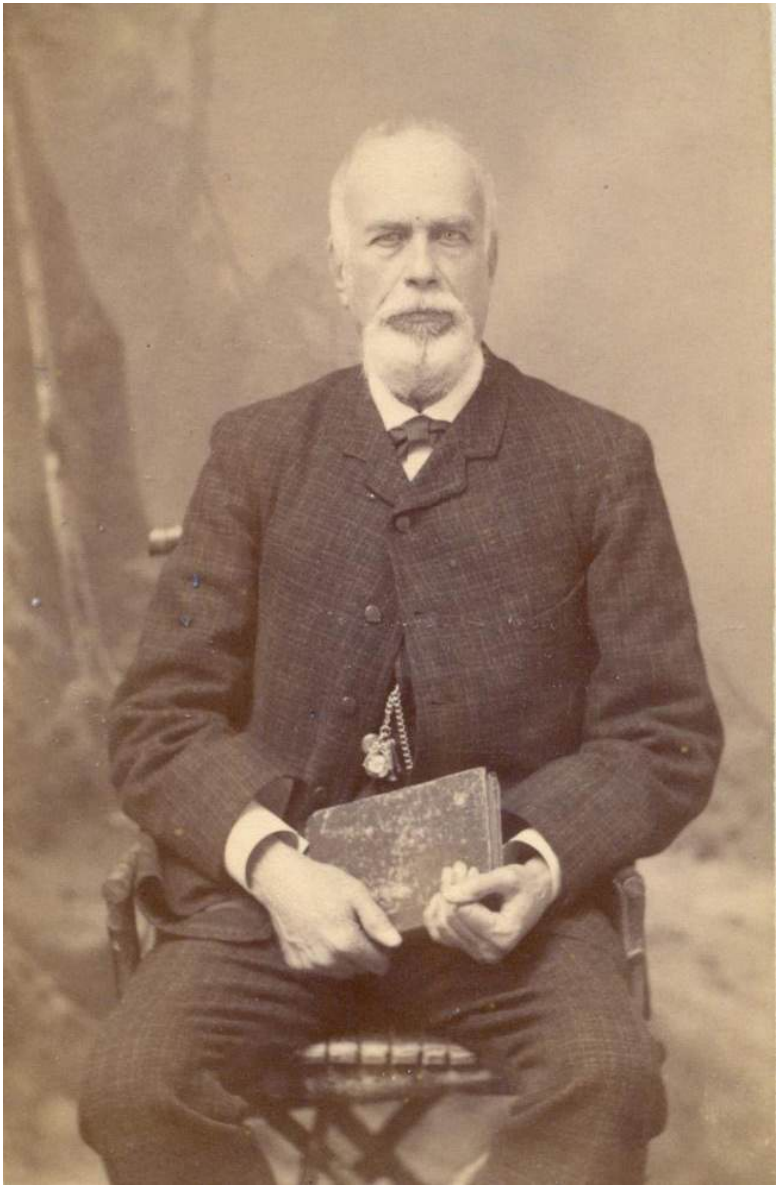

Frederik Willem Wieseman. Foto sekitar 1885- 1892
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl).

Kedekatan keraton dengan para penyewa tanah (pengusaha Eropa) ini terlihat dalam upacara yang diselenggarakan di Kasultanan Yogyakarta. Para pengusaha Eropa tersebut selalu hadir dalam perayaan penting di keraton seperti *Garebeg Pasa* (perayaan syukur sultan selepas sebulan melaksanakan puasa),[143] hari lahir sultan, serta putra mahkota. Di dalam iring-iringan perayaan di kota Yogyakarta akan tampak raja beserta residen di depan, putra mahkota berada di belakangnya, lalu diikuti pegawai karesidenan, serta para *landhuurders.*[144]

Perubahan ekonomi perkebunan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwono VI tidak bisa dilepaskan juga dari perkembangan jaringan kereta api yang dibangun pemerintah kolonial. Sejak liberalisasi ekonomi di Hindia Belanda dengan hadirnya *Agrarische Wet* 1870 —demi memperkuat jejaring produksi perkebunan— pada 1872 *Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschapij* (NISM) membuka jalur rel kereta api dari Surakarta ke Yogyakarta. Stasiun jalur kereta api ini di Yogyakarta terletak di Lempuyangan.[145] Pembangunan jaringan rel kereta api yang juga didukung Sultan Hamengku Buwono VI ini terhubung dengan kota pelabuhan Semarang untuk memudahkan ekspor hasil perkebunan.[146]

Pengelolaan perkebunan swasta yang masif juga membawa ekses buruk bagi petani di Yogyakarta. Pada 1873, para petani melakukan perlawanan atas *corvée* (kerja rodi) di tanah perkebunan milik George Weijnschenk. Seorang *bekel* akhirnya ditangkap dan dimasukkan penjara pribadi milik Weijnschenk.[147] Sultan Hamengku Buwono VI sesungguhnya telah memikirkan nasib *kawula* petani akibat swastanisasi tanah di Yogyakarta. Sekalipun Sultan Hamengku

143 J. Groneman, 1895, *De Garëbëg's te Ngajogyåkartå*, 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm.40.
144 Ulbe Bosma, *op.cit.*, hlm.77.
145 Gerrit Knaap, *op.cit.*, hlm.5.
146 Ulbe Bosma, *op.cit.*, hlm.82.
147 *Ibid.*, hlm.83.

Buwono VI dinyatakan bersedia melakukan apa pun dan bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda untuk kesejahteraan warga Yogyakarta[148] serta jauh sebelumnya menyatakan setuju dengan sewa tanah,[149] tetapi ada perintah larangan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono VI terkait sewa tanah bagi orang Eropa. Melalui Patih Danurejo V (1847-1879) —yang dibenci kalangan Eropa karena berani membela kepentingan orang Jawa, Sultan Hamengku Buwono VI mengeluarkan regulasi tertanggal 29 November 1861 yang melarang tanah *krayan* desa untuk disewakan kepada tuan Eropa karena dianggap akan menimbulkan masalah serta aturan tertanggal 14 Desember 1861 yang melarang penyewaan Tanah Gading (tanah yang ditarik pajak khusus berupa minyak kelapa) kepada penyewa Eropa karena juga dianggap akan menimbulkan masalah serta keuntungan dari sewa itu sedikit.[150]

Sultan Hamengku Buwono VI juga mengeluarkan *pranata patuh* yang terdiri 13 pasal pada 23 Juni 1862. Pranata ini memberi aturan bagi para priyayi, *bekel*, polisi yang patuh dalam perkara pengelolaan tanah serta pajak. Aturan ini sedikit banyak juga berupaya melindungi *wong cilik*, terutama pada pasal 12 yang mengatur *bekel* dan pajak.[151] Lima tahun setelahnya, 1866, sultan memberi perintah kepada semua priyayi dan patihnya untuk memperbanyak hasil panen di sawah dan melindungi rakyat kecil karena bencana kelaparan yang sedang melanda. Sultan mendapat pujian karena rasa manusiawi yang dimilikinya dengan mencoba melindungi *kawula* Yogyakarta.[152]

---

148 *Bataviaasch handelsblad*, 22 Januari 1870
149 Surat balasan Hamengku Buwono VI atas surat Asisten Residen Yogyakarta tertanggal 29 April 1857. Lihat Sri Margana, 2004, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769 – 1874.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.57.
150 *Ibid*., hlm.58.
151 Sri Margana, *op.cit.,* hlm.66-74.
152 *De Locomotief*, 16 Februari 1866

Pada masa kejayaan gula di Yogyakarta, paruh kedua abad ke-19, beberapa pengusaha perkebunan indigo (*indigoplanter*) berpindah menjadi pengusaha gula. Sementara beberapa pengusaha Eropa lain baru terjun ke industri gula saat *booming* industri ini. Mereka kemudian menjadi raja-raja gula di Yogyakarta.

Data nama-nama industri perkebunan swasta (tembakau dan gula tebu) di wilayah Bantul pada 1912.

Bantool.	Imogirie.	Siloek Lanteng.	W. H. M. de Riel, o.; E. C. de Riel, a.	tabak en suikerriet.
id.	Djodjenan.	Kedaton-plèrèt.	Cultuur Maatschappij Kedaton-Plèrèt, o., S. de Kanter, a.	id.
id.	id.	Barongan.	Cultuur Maatschappij Barongan en Padokan c. a. te Semarang, J. van Koesveld, a.	id.
id.	id.	Bantoel (Djeboegan).	Landbouw Maatschappij Bantool, te 's Gravenhage, o., Mr. F. W. Pijnakker Hordijk, a.	id.
id.	Srendakan.	Gesiekan.	Cultuur Maatschappij Gesiekan en Magoewo, gevestigd te Amsterdam, o.; A. van Blijenburg, a.	id.
id.	Panggang.	Gondang Lipoero (Gandjoeran).	Cultuurmaatschappij »Gondang Lipoero", o., W. van Drongelen, wd· a.	id.
id.	Krètèg.	Poendoeng.	Naamlooze vennootschap »Poendoeng", te 's Gravenhage, o.; J. D. Terman, a.	id.
id.	Tjèpit.	Padokan.	Cultuurmaatschappij Padokan-Barongan, te Semarang c. a. C. Gauw, a.	id.

(Sumber: *Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indie 1912*, 'Sgravenhage: Martinus Nijhoff, 1912, hlm.712.)

Para Pegawai Pabrik Gula Bantool, 1898.
(sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl)

Di wilayah Bantul hingga awal 1900-an —beberapa mungkin tidak sepenuhnya tepat di wilayah Bantul karena terjadi reorganisasi administrasi kewilayahan Bantul dan kabupaten lain selama paruh kedua abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20— setidaknya terdapat delapan industri gula (pabrik). *Pertama*, Pabrik Gula *Bantoel* (Djeboegan) yang didirikan Wieseman dan Broese van Groesneau pada 1861. Pabrik ini kemudian berpindah kepemilikan pada 1914 ke tangan Pijnacker Hordijk dengan perusahaan baru bernama *Landbow Maatschappij Bantool*. Sebelas tahun kemudian, pabrik ini dimiliki oleh pemilik baru, *Internationale Crediet en Handelsvereeniging Rotterdam*. *Kedua*, Pabrik Gula Barongan yang didirikan oleh G. Weijnschenk sebelum 1867 kemudian dimiliki oleh *N.V. Cultuur*

Maatschappij der Vorstenlanden. Pabrik ini mengalami perbaikan dan modernisasi yang dikerjakan oleh biro teknik E. Rombout pada 1917. *Ketiga*, Pabrik Gula Gesikan yang didirikan oleh Klaring dengan nama *Cultuur Maatschappij Gesiekan Id.en Magoewo*. Pabrik ini kemudian diambil alih oleh *Nederlandse Handel-Maatschappij* dan dilakukan perbaikan mesin-mesin pabrik pada 1923. *Keempat*, Pabrik Gula Gondang Lipoero (Gandjoeran) yang didirikan oleh Stefanus Barends beserta Elisa F.W. Kathaus. Pasca-1912, pabrik gula ini dimiliki oleh Josef dan Julius Schmutzer. Mereka berupaya menjalin relasi yang baik dengan para buruh pabrik gula dengan membuka sekolah-sekolah rakyat serta klinik di dekat Pabrik Gula Gondang Lipoero. *Kelima*, Pabrik Gula Kedaton Pleret yang sudah berdiri sebelum 1881 dan pada 1912 dimiliki oleh S. de Kanter melalui *Cultuur Matschappij Kedaton-Pleret*. Lalu pada 1925, pabrik gula ini berpindah kepemilikan kepada *N.V. Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden*. Bangunan pabrik ini juga pernah dirombak biro teknik E. Rombout. Pabrik ini masih melakukan produksi di masa krisis ekonomi 1930-an dengan jumlah pegawai yang berkurang sebelum akhirnya berhenti total pada 1937. *Keenam*, Pabrik Gula Padokan yang didirikan oleh G. Weijnschenk pada 1864. Bangunan pabrik ini luluh lantak akibat gempa pada 1867, sebelum akhirnya dibangun kembali oleh Weijnschenk. Kepemilikan pabrik ini berpindah ke tangan *N.V. Cultuur de Vorstenlanden*, lalu berganti menjadi *Cultuur Maatschappij Padokan-Barongan*, mereka akhirnya mengakuisisi Pabrik Gula Barongan. *Ketujuh*, Pabrik Gula Poendoeng yang didirikan sekitar 1880 oleh perusahaan *Dorrepaal and Co*. Hingga tahun 1912, pabrik ini dimiliki oleh J.D. Terman dengan perusahaan *Naamlooze Vennootschap Poendoeng*. Kepemilikan berpindah ke tangan *N.V. Vereenigde Klatensche Cultuur Matschappij* pada 1923. *Kedelapan*, Pabrik Gula Siloek Lanteng yang dimiliki oleh

H. N. Dom pada 1884. Kepemilikan lalu berganti, setidaknya pada 1912 pabrik gula ini dimiliki oleh W.M. de Riel.[153]

Hasil Produksi Gula di Wilayah Bantul (dalam Pikul).

Pabrik	1887	1889	1889
Bantoel (Djeboegan)	54.835	45.300	18.000
Padokan-Barongan	93.084	63.239	42.000
Gesiekan	47.370	30.000	25.000
Gondang Lipoero (Gandjoeran)	32.680	24.000	28.000
Kedaton Pleret	31.405	17.865	14.036
Poendoeng	36.987	14.000	37.000

Sumber: Nederlandsch Oost-Indie", Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 20 Februari 1890

Wilayah Sekitar Perkebunan Saat Ini. (Dokumentasi Foto Early Danendra)

153 Hermanu, Roemah Toea dan Yunanto Sutyastomo, *Suikerkultuur Jogja yang Hilang*, Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta, 2019, hlm. 17-54. Lihat juga Adresboek van Nederlandsch-Indië voor den handel, Rotterdam: Nijgh and van Ditmar, 1884, hlm.101-102.

Ramalan, Keresahan, dan Gerakan Sosial

Semune asmara kingkin
Tegesipun wiwitan ingkang jumeneng nata
Tedhaking ratu adil ingkang anglampahi brangta
dhateng pangeranipun[154]

Gerakan "Ratu Adil" (Erucakra) semakin menguat pada paruh kedua 1880-an. Bagi orang Jawa, tahun 1880-an dianggap akhir dari Tahun Wawu (atau Alip) yang menurut ramalan Jayabaya bertepatan dengan hadirnya kerajaan baru yang akan menghadirkan kejayaan[155] dan menandai akhir kuasa kolonial Belanda. Di Jawa, masa itu, muncul semacam perasaan bahwa era baru akan datang. Pada 1883, di Keraton Yogyakarta muncul gerakan Suryengalagan (digerakkan oleh Ratu Kedaton, salah satu permaisuri Sultan Sultan Hamengku Buwono V beserta anaknya Raden Mas Muhammad yang kemudian bergelar Pangeran Suryengalogo) yang—sekalipun dengan mudah dipadamkan—secara mengagetkan memiliki jejaring gerakan dari berbagai tokoh-tokoh lokal pinggiran (petani, kiai, atau haji), baik di wilayah Yogyakarta sendiri maupun Surakarta.[156] Pada masa Sultan Hamengku Buwono V, perampokan-perampokan terjadi dan dilakukan oleh benggolan-benggolan ulung seperti Gobang Kinosek,

154 R. Ng. Ranggawarsita, *op.cit.,* hlm.28.

155 Di dalam *Jangka Jayabaya* terdapat tiga pembagian zaman: *Jaman Kali Swara, Kali Yoga*, dan *Kali Sangara*. Zaman *Kali Yoga* dimaknai dengan negatif, bahwa orang-orang di Tanah Jawa prihatin, muncul hal-hal yang tidak masuk akal, kedatangan orang luar (asing), banyak yang mendapat hukuman dan hadirnya fitnah. Sementara zaman *Kali Sangara* ditandai dengan setidaknya pada masa akhir, hadirnya *kala bendu* bahwa di tanah Jawa terjadi pertengkaran dan permusuhan, lalu berganti dengan *kala suba* bahwa Tanah Jawa mendapatkan kesejahteraan, tidak ada permasalahan apa pun dan orang-orang bergembira dan diakhiri dengan *kala sumbaga* bahwa orang-orang di Jawa masyhur akan kemampuan, dan kehebatannya serta *kala surasa* bahwa kesejahteraan terus hadir di Jawa dan orang-orang bersuka ria. Suyami dkk, *Kajian Budi Pekerti dalam Serat Jayabaya,* Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2015, hlm. 127–132.

156 Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah. Priyayi dan Relasi di Karesidenan Madiun Abad XIX*, Jakarta: KPG, 2018, hlm. 231-232. Lihat juga Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014, hlm. 13-14.

Kandang Djinongkeng, Dadung Sinedel, Pentung Pinanggul, dan lainnya.[157]

Salah satu tokoh yang cukup berperan dalam gerakan Suryengalagan adalah Haji Istat dari Wonokromo Jejeran[158]. Di wilayah bekas Keraton Kerto dan Pleret di masa Mataram awal ini, pesantren tumbuh kuat karena wilayah ini sejak lama telah menjadi desa *pamutihan*. Sebuah desa yang ditinggali untuk kaum muslim saleh. Pesantren-pesantren dan masjid di Wonokromo-Jejeran ini pernah disinggahi Pangeran Diponegoro sebelum Perang Jawa pecah.[159] Haji Istat memiliki hubungan erat dengan Ratu Kedaton karena jalinan perkawinan-perkawinan yang dilakukan—anak perempuan Haji Istat menikah dengan adik Ratu Kedaton, R.M. Atmoarjo, sementara anak lelaki Haji Istat, yakni Haji Umar, menikah dengan adik perempuan R.M. Atmoarjo[160]—sesuatu yang lumrah dan telah jadi kebiasaan bahwa pernikahan politik dilakukan untuk mempererat hubungan keraton dengan pedesaan. Terkadang, secara searah, hal semacam ini merupakan cara keraton "meredam ancaman dari masyarakat agamis yang bersikap mandiri."[161]

Haji Istat merupakan keturunan Kajoran—trah ini masih dikenang sebagai keluarga 'oposisi' yang punya semangat perlawanan kuat. Hal ini nanti dibuktikan oleh keluarga Haji Istat dalam gerakan Suryengalagan. Hal lain, satu kenyataan bahwa Ratu Kedaton meru-

---

157 Sartono Kartodirdjo, "Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia", pidato Dies Natail ke 18 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1967, hlm. 9. Suhartono, "Kecu: Potret Perbanditan Sosial di Vorstenlanden 1850-1900", Seminar Sejarah Lokal di Medan 17-20 September 1984, hlm.14.

158 Kuncoro Hadi, "Trah Kajoran-Tembayat dalam Pergolakan Politik di Keraton Jawa tengah-selatan Abad XVII-XIX", dalam FX Domini BB Hera, *Urip iku Urup. Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019, hlm. 248-251. distrik Jejeran saat itu masuk dalam wilayah (*regentschap*) Kalasan, tetapi dekat dengan wilayah Sewon dan Pasargede yang merupakan bagian dari regentschap Bantul. lihat *Regeerings Almanak Nederlandsch-Indie* 1884 I, Batavia: Landsrukkerijk, 1884, hlm.32.

159 Peter Carey, *Takdir. Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014, hlm. 57.

160 A. L. Kumar, "The 'Suryengalagan Affair' of 1883 and Its Successors: Born Leaders in Changed Times", Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 138, 1982, hlm. 276.

161 Peter Carey dan Vincent Houben, *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX (terjemahan Peter Carey)*, Jakarta: KPG, 2018, hlm. 60-61.

pakan keponakan Pangeran Diponegoro (Ratu Kedaton merupakan anak perempuan adik Pangeran Diponegoro, Suryaingalogo), mungkin turut berpengaruh dalam dukungan-dukungan para haji. Kepercayaan terhadap kemampuan Haji Istat ditunjukkan oleh Ratu Kedaton dengan memberikan payung kuning emas, yang secara simbolis bermakna payung raja, untuk digunakan menarik dukungan sebesar-besarnya dari masyarakat.[162] Hubungan Haji Istat dengan Ratu Kedaton tersurat dalam *Babad Suryengalagan*:

> *...Kaji Istat Wanakrama, langkung sabyantu ing budi, Kanjeng Ratu sanget kang sih, pinarcaya barang rembug, gampang sungsiding nalar, pinalar sangking pangesti...Kaji Istat ngidul ngetan, umadeging Senapati, weneh pininta kang marang, ngidul ngilen anyekait, kang rembag sampun dadi, gya gegandjar Kanjeng Ratu, mring abdi brana wastra arta lan gamaning jurit…*[163]

Pentingnya peran Haji Istat tampak dalam bagaimana pemerintah kolonial dan pihak resmi Keraton Yogyakarta memandangnya. Penggambaran terhadap Haji Istat—yang tampaknya dibuat selepas meletupnya *gegeran* Suryengalagan—begitu negatif. Residen Yogyakarta, Van Baak, menyebutnya sebagai guru ilmu *kadigdayan* (kesaktian). Keraton Yogyakarta menyebutnya seseorang yang selalu membawa jimat penuh mantra atau tulisan Arab, ia selalu merapalkannya, dan para pengikutnya percaya bahwa Haji Istat pada usia 70 tahun masih mampu memberikan perlindungan gaib dan mampu memberi kemenangan dalam pertempuran.[164] Penggambaran terhadap Haji Istat seperti itu mengingatkan kembali gambaran-gambaran

---

162 A. L. Kumar, *op.cit.*, hlm. 257.

163 *Serat Babad Soerjèngalagan* (manuskrip aksara latin, museum Sonobudoyo, PB.E.9, S.153), hlm.43-44. Terjemahan bebas: "…Haji Istat Wanakrama, penolong dalam pikiran, Kanjeng Ratu berbaik hati, percaya dalam berembug, mengikuti nalarnya, dengan sebaik-baiknya… Haji Istat ke selatan timur (tenggara), menjadi Senapati, diminta ke arah selatan barat (barat daya)... persetujuan yang sudah disepakati, Kanjeng Ratu akan segera memberi ganjaran, harta kain dan perlengkapan perang…"

164 A. L. Kumar, *op.cit*, hlm. 255-256.

hampir sama yang dilontarkan petinggi VOC terhadap pendahulu Haji Istat dari Kajoran, Panembahan Romo pada abad ke-17.

Haji Istat mampu bertahan lebih lama dalam gerakan Suryengalagan yang gagal. Saat pasukan keraton datang ke Wonokromo, Haji Istat dan Haji Umar beserta keluarganya telah pergi menghindar ke Bukit Pucung, sebelah tenggara Wonokromo. Pasukan keraton di bawah Tumenggung Gondokusumo—yang justru sejak awal diminta Ratu Kedaton mendukung gerakannya tetapi tampaknya tidak menghiraukan—bersama Haji Usub, seorang haji yang juga berasal dari Wonokromo dan memihak keraton, tidak berhasil membujuk Haji Istat untuk menyerah. Mereka lenyap dari Pucung dan tidak bisa segera ditemukan. Mereka beralih tempat bersembunyi di Bukit Pajimatan Girirejo (di sekitar Makam Imogiri). Haji Umar lalu pergi ke Desa Kedung Poh di Playen Gunungkidul yang akhirnya berhasil ditangkap meski kemudian dibebaskan.[165]

Sementara Haji Istat bersama pengikutnya kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang menuju utara, ke lereng Gunung Merapi. Awalnya ia terlebih dahulu berada di Karang Semut, dekat Kali Opak, di selatan Wonokromo, lalu bergerak menuju Kembang Arum di lereng Gunung Merapi sejauh 30 kilometer. Di lereng Merapi inilah akhirnya Haji Istat diminta menyerah tanpa syarat apa pun. Ia lalu diperbolehkan kembali ke Wonokromo untuk mempersiapkan penyerahan dirinya. Saat Haji Istat datang ke rumah salah satu muridnya, Kanapi, di Wonokromo, pasukan-pasukan Keraton Yogyakarta yang berada di sana mengira bahwa Haji Istat yang datang dengan membawa tombak akan melakukan penyerangan.[166] Haji Istat yang sepuh itu akhirnya dibunuh. Tampaknya Haji Istat tidak dibiarkan untuk ditangkap hidup-hidup, mengingat

165 *Ibid.*, hlm. 278.
166 *Ibid.*, hlm. 259, 262-263.

sejak awal runtuhnya gerakan Suryengalagan, ia tidak mau menyerah dan masih bergerak selama lebih dari dua minggu. Mayat Haji Istat kemudian dibuang ke sungai atas perintah Residen Yogyakarta.

Ketakutan pemerintah kolonial terhadap kaum ulama di pinggiran yang dianggap punya potensi untuk membangkitkan gerakan penentangan, masih cukup tinggi. Karena mereka mampu memimpin dan menggerakkan dukungan, baik langsung dari wilayah pinggiran atau menjadi penyokong kuat gerakan-gerakan sosial politik yang digerakan dari kemelut dalam keraton, seperti dalam Perang Diponegoro dan berlanjut pada gerakan Suryengalagan.

Pada 1924, muncul gerakan Ratu Adil (*mesianistis*) di Srandakan. Seorang bernama Ronodjemiko yang menetap di Mangiran Srandakan dan menumpang pada keluarga Kromosedjo, menerima ilham bahwa ia harus mempermaklumkan dirinya sebagai Ratu Adil. Mbok Kromosedjo diangkat menjadi permaisuri sementara Kromosedjo sendiri dijadikan patih, beberapa pengikutnya diberi pangkat bupati, *mantri,* dan lain sebagainya. Pada 17 Juli 1924, ketegangan menyeruak, saat alat-alat negara datang dan akan membubarkan gerakan tersebut. Pengikut-pengikut Ronodjemiko Kromosedjo bersiap menghadang dan berperang dan mereka sangat militan. Sang Ratu Adil, permaisuri, patih, beserta pengikutnya duduk di balai, di luar rumah dan menunjukkan sikap penentangan. Sementara itu, di dapur ada kesibukan orang memasak.

Saat *wedana* datang dan bertanya tentang perkumpulan ini, Ronodjemiko didampingi permaisuri keluar dengan lantang menjawab dalam bahasa ngoko: "Panji, hendaklah maklum bahwa Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta tidak lagi mempunyai raja, mereka telah menghilang. Di sini muncullah kerajaan yang turun dari hutan Ketonggo. Seseorang telah memaklumkan diri sebagai Ratu Adil

dan orang itu tidak lain dari saya sendiri." Kemudian Ronodjemiko berseru kepada pengikutnya: "kamu semua bawahan saya, tahulah, bahwa panji ini tidak lagi berkuasa, besok pagi ia akan mati karena kutukan saya. Kalau ia akan menahan kita, bunuh saja." *Wedana* tidak berani bertindak segera dengan kekerasan saat itu dan memilih meminta bantuan dari Bantul dan pada malam hari, ia dengan bantuan polisi mengepung rumah Kromosedjo. Gerakan Ratu Adil di Srandakan ini akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ronodjemiko dapat ditangkap tanpa perlawanan dan pertumpahan darah.[167]

Pemimpin gerakan sering dilihat sebagai seorang juru selamat ataupun utusannya. Di dalam kebudayaan Jawa, kepercayaan datangnya Ratu Adil telah menjadi tradisi seperti dalam *Jangka Jayabaya.* Tradisi lisan tentang Tanjung Putih yang akan memerintah pada 1800—bahwa pemerintahannya akan adil, makmur, dan murah sandang pangan, moral tinggi dan rakyat bahagia—terus hidup. Begitu pula bayangan tentang kerajaan Ketonggo yang diperintah oleh Erucokro. Dalam Jayabaya, kerajaan terakhir ialah kerajaan Imam Mahdi. Masa menjelang kedatangannya ditandai dengan bencana dan kesukaran seperti bencana alam (banjir atau kebakaran) rakyat mengalami banyak kesengsaraan, tata susila merosot dan kejahatan merajalela.[168] Di Yogyakarta sendiri muncul juga ramalan yang khas terkait Ratu Adil—ia akan hadir saat Kali Progo menyatu dengan Kali Opak.[169] Tampaknya bayangan tentang Ratu Adil, Imam Mahdi, dan kerajaan Ketonggo menjadi semacam eskapisme bagi orang-orang pinggiran yang merasakan penderitaan karena tekanan-tekanan ekonomi (kolonial).

---

167 Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*,, hlm. 13-14.
168 *Ibid.*, hlm.16.
169 Sartono Kartodirdjo, "Tjatatan Tentang Segi-Segi Messianistis Dalam Sedjarah Indonesia", Penerbitan Lustrum ke II, 19 Desember 1959, Universitas Gadjah Mada, hlm.13-14.

Di samping gerakan-gerakan sosial (politik) tradisional tersebut, muncul juga gerakan perlawanan yang bersifat modern melalui gerakan yang terorganisir. Di Yogyakarta, Muncul gerakan buruh gula melalui saluran PFB (*Personeel Fabrieks Bond*) pada 1918—didirikan oleh R.M. Suryopranoto yang sebelumnya mendirikan Adi Dharmo—yang memperjuangkan hak-hak buruh industri gula. Awal abad ke-20, Yogyakarta menjadi pusat gerakan buruh (gula), di samping Semarang dan Surabaya (pusat buruh pelabuhan). Pemogokan-pemogokan buruh gula dilakukan di Yogyakarta dan pabrik gula di wilayah Bantul menjadi salah satu sasaran utamanya. Pemogokan buruh diinisiasi oleh Suryopranoto di bawah koordinasi CSI (*Centraal* Sarikat Islam). Setidaknya pada 1918 dan 1920, pemogokan buruh terjadi di wilayah pabrik gula Gesiekan (Februari—Maret 1920), Gondanglipoero (Juli 1918, Maret 1920), Barongan (Juli 1918), Poendoeng/Pundong (Juli 1918), serta Padokan (Juli 1918, April 1920). Tuntutan-tuntutan dilakukan atas nasib buruh bumiputra yang berupah rendah. Isu tentang upah rendah itu muncul di surat kabar di luar Hindia Belanda.

Wilayah Yogyakarta menghasilkan kejayaan pengusaha gula Indo-Eropa serta menjadikan wilayah ini sebagai "*sugarlandia*" (tanah gula) yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi membuat bumiputra kehilangan wujud ekonomi alaminya, lalu berubah menjadi buruh dengan bayaran murah. Pemogokan-pemogokan buruh pabrik gula di wilayah Bantul menjadi bagian dari perlawanan kalangan bumiputra terhadap kebijakan kolonial dan perubahan ekologi desa akibat industri gula.[170]

---

170 Han Revanda Putra "Zaman Mogok di Yogyakarta, 1915–1921", https://www.balairungpress.com/2022/12/25401/ diakses pada 27 November 2023. Lihat juga Danang Indra Utama, "Pemogokan Buruh Pabrik Gula Tanjung Tirto Tahun 1918", Ringkasan Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta 2017, hlm.21-22.

BAB 6

DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI PERKEBUNAN

Revolusi industri perkebunan berdampak pada bentuk modernisasi di berbagai wilayah. Modernisasi yang dimaksud salah satunya dapat dilihat dari semakin majunya bidang transportasi. Dengan kata lain, modernisasi transportasi membuka pintu bagi pertumbuhan dan perkembangan produk pertanian-perkebunan.

Modernisasi transportasi berdampak pada penciptaan dan perluasan peluang pekerjaan, yang artinya turut berkontribusi positif terhadap perekonomian suatu wilayah atau negara. Hal tersebut merupakan elemen penting dalam sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di Bantul setelah revolusi industri perkebunan.

Sistem Transportasi

Dikeluarkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) 1870 sebagai konsekuensi pengaruh kontrol pemerintah Hindia Belanda terhadap Kasultanan Yogyakarta berdampak pada berkembangnya industri perkebunan di *Regentschap* Bantul. Banyak lahan pertanian

yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tebu di wilayah Bantul dengan tanahnya yang subur.

Bersamaan dengan berkembangnya pabrik gula, sarana pendukung juga tersedia berupa alat angkutan tradisional, seperti dokar dan gerobak yang dihela dengan hewan. Keberadaan alat transportasi memiliki peran sentral pada waktu itu, karena menjadi satu-satunya sarana yang digunakan oleh perusahaan perkebunan dan pabrik-pabrik gula. Namun, tidak dapat dipungkiri pada perkembangannya meskipun sudah tersedia sarana transportasi, produksi yang kian meningkat mendesak berkembangnya transportasi yang lebih baik, lalu muncullah alat transportasi kereta api.[171]

Di Yogyakarta, kereta api baru resmi dibuka pada 1 Januari 1873 dengan stasiun pertama, yaitu Lempuyangan. Rute yang dibangun pertama kali adalah rute Yogyakarta menuju Semarang dengan melewati wilayah Surakarta. Pembangunan rute kereta api tersebut juga terdapat di Bantul karena daerah ini memiliki industri perkebunan yang besar, salah satunya adalah industri gula. *Nederlandsch-Indisch Spoorweg Maatschappij* (NISM) membangun rute Yogyakarta menuju Pundong dan rute Yogyakarta menuju Brosot dengan melewati daerah Srandakan.[172] Dengan dibangunnya rel kereta api di Bantul maka pengangkutan komoditas ekspor industri tersebut menjadi lebih mudah.

Jalur kereta api Yogyakarta-Srandakan merupakan bagian pertama dari pembangunan jalur kereta Yogyakarta-Brosot. Jalur tersebut diresmikan pada 21 Mei 1895 dengan panjang rel sejauh 23 km. Pembangunan jalur ini awalnya bertujuan untuk pengangkutan hasil perkebunan dari Distrik Cepit dan Distrik Srandakan. Di sisi

171 Nanang Setiawan. 2020. *Sejarah Kereta Api di Yogyakarta 1917-1942.* Temanggung: Kendi.

172 Eko Ashari, "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)", *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 70.

lain untuk menghubungkan daerah Srandakan dan Brosot perlu dibangun jembatan yang melintasi Sungai Progo. Oleh karenanya, diajukanlah usulan NISM kepada pemerintah kolonial untuk pembangunan jembatan tersebut. Akhirnya jembatan yang menghubungkan kedua daerah tersebut dapat selesai pada 1915 beserta jalur kereta api Srandakan-Brosot sejauh 2 km. Dengan demikian, pada 1 April 1915 jalur kereta api Yogyakarta-Brosot resmi dibuka dan dipergunakan untuk umum.[173]

Setelah peresmian tersebut, ternyata masyarakat sekitar kurang antusias menerimanya. Masalah ini terjadi karena harga tiket kereta yang terlalu mahal untuk kalangan bumiputra. Pada akhirnya, pemerintah kolonial memberikan harga khusus untuk orang-orang bumiputra. Kereta api untuk angkutan umum ini dibedakan menjadi tiga kelas. Kelas pertama diperuntukkan bagi orang Eropa. Kelas kedua disediakan untuk orang bangsawan bumiputra, Tionghoa, dan Arab, sedangkan kelas ketiga untuk orang-orang bumiputra lainnya. Bahkan terkadang orang bumiputra menggunakan gerbong kereta kelas 4 dalam menggunakan alat transportasi tersebut.[174]

Tarif Penumpang Kereta Api, 1900

Kelas Gerbong	Tarif (km/cent)
Kelas 1	6
Kelas 2	4
Kelas 3	1,5
Kelas 4	1

Sumber: Eko Ashari, "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)" dalam *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 80.

173 Eko Ashari, "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: …, *Ibid.*, hlm. 77.
174 *Ibid.*, hlm. 79.

Jumlah Penumpang Kereta Api NISM di Jawa, 1900

Jalur	Panjang rute (km)	Jumlah Penumpang				
		Kelas I	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Total
Semarang-Vorstenlanden	205	11.351	47.504	208.805	1.407.500	1.675. 160
Batavia-Buitenzorg	56	9.374	25.325	211.866	509.672	756.237
Jogja-Brosot	23	1.437	25.325	15.975	400.697	418.109
Jogja-Willem	84	7.991	25.325	96.874	948.837	1.053.702
Gundih-Surabaya	245	5.613	25.325	79.282	943.571	1.023.466

Sumber: Eko Ashari, "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)", *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 79.

Berdasarkan tabel 6.1 dan 6.2 diberlakukannya tarif khusus untuk kalangan bumiputra menambah jumlah penumpang yang menggunakan transportasi kereta api ini. Kalangan bumiputra menempati jumlah terbanyak dibandingkan dengan kaum Eropa maupun Tionghoa. Kalangan bumiputra yang menggunakan transportasi kereta api dengan jalur Yogyakarta-Brosot sebanyak 400.697 orang.

Stasiun Palbapang, 1896.
Sumber: KITLV A619. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Stasiun Palbapang Saat Ini.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Tarif pada Angkutan Barang Kereta NISM

Kelas	Tarif per 100 kilogram dalam gulden dengan jarak 60-150 km.
Kelas 1	*f* 1,4
Kelas 2	*f* 1,2
Kelas 3	*f* 1
Kelas 4	*f* 0,75
Kelas 5	*f* 0.50

Sumber: Eko Ashari, "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)", *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 79.

Pada kereta api ini, gerbong barang dibuat lebih banyak dibandingkan dengan gerbong penumpang. Kebijakan itu disebabkan oleh pengangkutan kereta api yang didominasi oleh pihak pabrik gula

seperti Gesikan dan Sewu Galur. Dari tabel 6.3 dapat diketahui bahwa harga angkutan barang dengan kereta api ini dinilai lebih murah dibandingkan dengan pengangkutan gerobak yang dihargai sebesar *f*3,50 per pikulnya dengan jarak yang sama. Berkat adanya kereta api ini pengangkutan hasil perkebunan ke Kota Yogyakarta menjadi semakin lancar dan meningkat.

Kereta Angkutan Barang Pabrik Gula Bantul, 1898.
Sumber: KITLV A619. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Rumah Pegawai NISM.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Selain jalur Yogyakarta-Brosot, jalur Yogyakarta-Pundong juga dibangun mulai 1913 dan resmi dibuka pada 1918. Pembangunan ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama dibangun jalur Ngabean menuju Minggiran. Selanjutnya dibangun menuju arah timur, yaitu Pasar Gede dengan pemberhentian Stasiun Pasar Gede yang dibuka pada 1917. Tahap ketiga yaitu pembangunan diarahkan menuju selatan, yaitu daerah Pleret dan dibuka pada 1918. Di antara kedua tempat tersebut dibangun pula dua stasiun, yakni Stasiun Pleret serta Stasiun Kuncen. Stasiun Pleret ini sangat dekat dengan Pabrik Gula Kedaton Pleret, sehingga dengan mempermudah pengangkutan hasil produksi industri gula tersebut. Berikutnya juga dibangun pemberhentian di Wonokromo dengan nama Stasiun Wonokromo. Di selatan stasiun tersebut terdapat Pasar Wonokromo

yang begitu ramai. Stasiun lain pun dibangun juga di Ngentak, Jetis, dan Barongan pada 1918. Di daerah Barongan terdapat Pabrik Gula Barongan yang juga dapat terfasilitasi dengan adanya jalur ini. Tahap terakhir, yaitu dibangunnya Stasiun Pundong pada 15 Oktober 1918. Dengan demikian, jalur Yogyakarta-Pundong dapat digunakan untuk angkutan barang serta penumpang. Pembangunan Stasiun Pundong juga berguna untuk pengangkutan hasil industri gula dari Pabrik Gula Pundong.[175]

Berkembangnya Pusat Ekonomi Baru

Dampak Revolusi Industri perkebunan sangat terasa di Bantul setelah pembukaan jalur kereta api yang memperluas jaringan transportasi darat. Aktivitas perdagangan semakin meningkat dengan jangkauan perdagangan yang semakin luas, dari pesisir ke pedalaman. Selain itu, daerah-daerah sepanjang jalur kereta api menjadi ramai. Desa-desa yang dulunya sepi, berubah menjadi ramai karena sebagai tempat pemberhentian secara serta-merta juga menjadi lokasi tujuan masyarakat.

Keramaian tersebut pada perkembangannya memunculkan pusat perekonomian baru berupa usaha-usaha angkutan tradisional dan pasar-pasar di sekitar stasiun, seperti Pasar Wonokromo, Pasar Ngentak, dan Pasar Pundong.[176] Semakin lancarnya transportasi di daerah pedalaman benar-benar membuat ramai pusat-pusat pemberhentian kereta api di daerah yang dilalui jalur kereta api.[177]

---

175 Nanang Setiawan, "Dampak Sosial Ekonomi Transportasi Kereta Api Yogyakarta-Pundong Terhadap Masyarakat Kota Gede Tahun 1917-1942", *Junal Ilmu Sejarah*, Vol.2, No. 2, hlm. 214.

176 Nanang Setiawan, *op. cit.*, hlm. 76.

177 Djoko Suryo, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900,* (Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, 1989), hlm 125.

Seiring berkembangnya waktu, aktivitas pasar-pasar tersebut mengikuti pasaran hari Jawa. Pasaran Jawa adalah konsep yang berhubungan dengan tradisi dan kalender Jawa, yang merupakan bagian penting dari budaya Jawa. Di dalam kalender Jawa, terdapat sistem penanggalan yang mengatur berbagai aktivitas, termasuk perdagangan. Hari-hari tertentu, seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon dianggap lebih berarti untuk berbagai aktivitas, termasuk berdagang. Dengan kata lain, pasaran Jawa ini digunakan untuk menentukan hari baik untuk berdagang.[178]

Lapangan Pekerjaan Mulai Terbuka

Perkembangan pada sektor ekonomi akibat Revolusi Industri menyebabkan semakin terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dengan beralihnya lahan pertanian ke perkebunan lewat sistem sewa tanah, bahwa para pengusaha perkebunan berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sesuai hak-haknya—hak atas tanah, penduduk, dan para pekerja—dengan harapan pengeluaran yang sedikit, membuat petani merugi! Petani harus mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya banyak petani yang lebih memilih menjadi buruh di perkebunan atau pabrik-pabrik gula milik Belanda yang tersebar di Bantul.[179]

Majunya sarana transportasi sebagai sarana pengangkutan massal, tentu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal tersebut menjadi peluang bagi kalangan bumiputra untuk bekerja sebagai pegawai NISM seperti petugas karcis, banskower (petugas pemeriksa jalur), kondektur, dan masinis. Keadaan ramai dan aktivitas bongkar muat barang di stasiun dimanfaatkan kalangan

178 Bashori, Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?, hlm. 248.
179 Nanang Setiawan, "Dampak Sosial Ekonomi…, *op. cit.*, hlm 21.

bumiputra dengan menjadi buruh lepas.

Selain itu, keberadaan pasar-pasar juga memunculkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai pedagang, pembantu pedagang, hingga kuli atau buruh gendong. Pekerjaan di pasar banyak digemari karena tidak memerlukan keahlian khusus atau pendidikan tinggi. Di situlah kaum bumiputra memperoleh pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.[180]

Dengan demikian, dampak dari Revolusi Industri dan dibangunnya jaringan transportasi (kereta api) untuk memenuhi kebutuhan perkebunan, dapat mengurangi tingkat pengangguran di Bantul. Sebagaimana diketahui bersama, keberadaan transportasi di Bantul pada dasarnya untuk memudahkan dan memperlancar perusahaan-perusahaan perkebunan guna mengangkut hasil produksinya. Hal ini dapat dilihat dari daerah Bantul sebagai pusat industri perkebunan tebu, menjadi faktor utama eksploitasi jalur kereta api hingga pedalaman. Namun, seiring berkembangnya zaman, transportasi kereta api ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengangkut hasil perkebunan saja, tetapi masyarakat juga dapat menggunakannya untuk bepergian.

180 *ibid,* hlm 87.

BAB 7

KONDISI SOSIAL, PENDIDIKAN, BUDAYA DI BANTUL

Kondisi Sosial Bantul

Bantul merupakan salah satu daerah swapraja dari Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut struktur sosial masyarakat Bantul masih tradisional berkaitan erat dengan pemimpin feodal. Secara umum Bantul terletak di daerah agraris sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan mengandalkan tanah pengolahan, oleh karena itu tanah menjadi tolok ukur dalam stratifikasi sosial masyarakatnya.

Pembagian kelas dalam masyarakat Bantul mengikuti segregasi kelas di Yogyakarta. Seseorang yang memiliki status sosial tinggi akan dihormati oleh kelas sosial di bawahnya. Hubungan ini sesuai dengan tradisi klasik Jawa yang disebut hubungan *kawula gusti* atau hubungan *patron klien*.

Golongan atas terdiri dari para priyayi dan bangsawan, sedangkan golongan bawah mencakup petani dan tukang. Golongan bawah melayani dan setia kepada patron karena hubungan timbal balik

yang seimbang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari budaya feodal dengan sistem pemerintahan yang dianut Keraton Yogyakarta.

Kerajinan di Bantul

Perkembangan industri kerajinan Bantul sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Merunut berbagai macam peninggalan situs, petilasan, dan artefak menunjukkan bukti yang kuat masyarakat Bantul telah aktif dalam dunia kriya kreatif kerajinan. Di dalam buku profil *Bantul Kota Kreatif* tercatat bahwa kerajinan kriya mulai berkembang pada abad ke 18–19 seiring dengan masuknya pengaruh gaya kolonial Eropa.

Bangkitnya Revolusi Industri di Eropa ditandai dengan proses mekanisasi yang membuat pekerjaan lebih efisien. Terkait hal tersebut, perkembangan kerajinan di Bantul pun sudah mengarah menuju industri. Hal ini bisa dilihat dari kecepatan waktu produksi barang. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 10 hari, kesadaran kerja industri membuatnya bisa menghasilkan barang dalam waktu satu hari.

Produk karya seni pada masa ini diukur dengan tingkat kerumitan, kehalusan, dan harga yang mahal. Adanya perdagangan barang-barang kreatif dari budaya lain menghasilkan perpaduan karya kriya yang unik. Yang dapat dilihat sampai saat ini adalah hadirnya gerabah di Kasongan.

Industri kerajinan yang berkembang di Bantul pada masa kolonial di antaranya adalah industri batik (Pandak, Gandekan, Imogiri, Batikan, dan Pekojo), gerabah (Kasongan), anyaman bambu (Keongan), keris (Imogiri), dan tenun lurik (Srandakan serta Godean). Industri kerajinan tersebut berkembang dengan basis industri rumahan dengan puncak perkembangan pada 1927–1929. Hal

tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan Kabupaten Bantul dalam sebuah kegiatan bernama *Djokjasche Jaarmarkt*[181] di Kota Yogyakarta pada 1929. Daerah ini menampilkan *stand* paling banyak dengan berbagai hasil karya kerajinan masyarakatnya.[182]

Tugu di Banyusumurup Saat Ini.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

181 *Djokjasche Jaartmarkt* merupakan kegiatan pameran kerajinan yang diadakan oleh *Djokjasche-Jaarmarkt* Vereeniging. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan untuk memamerkan hasil karya kerajinan di Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan tersebut guna mempromosikan hasil kerajinan dan mencegah oknum-oknum pengrajin mematok harga kerajinan yang terlalu tinggi.

182 *De Indische Courant*, 29 Desember 1928.

Toko Keris di Banyusumurup Saat Ini.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Sumber-sumber sejarah lebih memberikan banyak informasi mengenai kerajinan batik yang berkembang di Bantul. Industri batik di wilayah ini sudah ada sejak zaman Amangkurat I, dengan lokasi produksi di daerah Pleret. Pada pertengahan abad ke-17, sektor ekonomi ini semakin meluas dengan ditandai wilayah Bantul dapat andil dalam menyetorkan hasil kerajinannya pada suatu pameran kerajinan di Yogyakarta. Meskipun dengan alat yang sederhana, namun hasil produksi kerajinan wilayah ini mampu bersaing di pasaran. Hingga pada 1850-an dan 1870-an, industri batik semakin memperlihatkan pamornya dengan tumbuhnya cabang-cabang industri rumahan di wilayah ini. Hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya pekerja yang terlibat dalam produksi kain batik.[183]

Seiring berjalannya waktu, industri batik semakin berkembang dan modern. Di awal abad ke-20, industri batik yang ada di wilayah ini dimiliki oleh pengusaha baik bumiputra maupun Tionghoa, baik

183 Anton Haryono, "Dari Keraton ke Pasar: Industri Pribumi di Daerah Yogyakarta 1830-1930-an", *Jurnal Humaniora,* Vol, 21, No. 1, 2009, hlm. 99-101.

batik tulis maupun cap. Pada dasarnya, kedua teknik yang digunakan pada kerajinan batik ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Batik cap dinilai lebih murah dibandingkan dengan batik tulis karena waktu pengerjaannya yang lebih singkat. Namun, secara kualitas batik tersebut tidak sebagus batik tulis.[184]

Pada periode ini, banyak orang pedesaan di Bantul bekerja sebagai pengrajin batik. Para pengrajin tersebut tidak hanya bekerja di industri yang ada di sekitarnya saja melainkan juga bekerja sebagai pengrajin batik di Kota Yogyakarta. Sebagai contoh, para pengrajin pergi ke daerah Karangkajen guna mengambil kain setengah jadi untuk dilakukan proses *mbiron* dan *ngerok* di rumahnya. Apabila pekerjaan tersebut sudah selesai maka para pengrajin datang kembali ke pemilik industri batik tersebut untuk menyerahkan hasil pekerjaannya.[185]

Bantul mengalami puncak produksi batik pada 1918–1920 sehingga menjadi daerah dengan pemasok kain batik yang besar di Yogyakarta. Kegemilangan akan batik tersebut menurun ketika memasuki 1921, dari 98 industri batik yang ada tersisa 86 industri saja dengan membawahi 530 orang pekerja. Hal tersebut disebabkan oleh jatuhnya harga kain mori di pasaran sedangkan para pemilik industri telah menimbun persediaan kain batik tersebut. Oleh karena itu, apabila kerajinan ini dipasarkan maka akan mengalami kerugian yang besar.[186]

---

184 Anton Haryono, *Ibid.*, hlm. 105.
185 Wawancara kepada Mbah Mitro Mulyono (95 tahun), Dusun Tilaman, Wukirsari, Imogiri, Bantul, pada Jumat, 29 Agustus 2023.
186 *De Indische Courant*, 24 Juli 1924.

Seorang Pengrajin Batik di Giriloyo Saat Ini.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Selain industri batik, industri gerabah juga banyak berkembang di daerah ini. Industri ini juga banyak berkembang secara rumahan dan dikelola mandiri. Sentra industri gerabah di Bantul ada di Kasongan dan Pleret. Gerabah Kasongan mulai dikenal luas sejak awal abad ke-20. Tempat ini terkenal berkat lengkap dan baiknya

kualitas barang yang diperdagangkan. Sementara itu di Pleret, hasil kerajinan berupa piring keramik banyak dijumpai.[187]

Dengan berkembangnya industri rumahan di Bantul tersebut, Bupati Bantul kemudian mendirikan sebuah perkumpulan bernama 'Asta Gina'. Perkumpulan ini menjadi suatu wadah bagi pengrajin untuk mengembangkan usahanya. Organisasi ini kemudian mempromosikan kerajinan-kerajinan yang dibuat di sekolah-sekolah untuk kaum bumiputra (*Inlandsche School*). Promosi ini berupa kelas praktik pembuatan kerajinan. Kerja sama juga dijalin dengan pabrik-pabrik gula yang berdiri di Bantul. Masing-masing pabrik gula tersebut juga memberikan dana bantuan berupa *f*100 kepada organisasi ini.[188]

Melihat perkembangan industri kerajinan yang begitu baik, maka J.E Jasper selaku Residen Belanda di Yogyakarta, memberi perintah kepada beberapa pengrajin gerabah dari Desa Kasongan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang industri, dan dikirim ke Batavia. Pengetahuan tambahan yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi desa dan industri di wilayah Yogyakarta secara umum.[189]

187 *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 14 Mei 1928.
188 *De Locomotief*, 07 Desember 1927.
189 *De Locomotief*, 19 Augustus 1927.

Toko Gerabah di Kasongan pada Saat Ini.
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Industri gerabah tersebut didukung dengan adanya pelatihan-pelatihan kerajinan yang bermanfaat untuk masa mendatang. Sebagai contoh dalam laporan dari *Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië,* edisi 14 Mei 1928[190] dengan judul "Pelatihan Pengrajin Gerabah", lima pengrajin gerabah asal kabupaten Bantul dibiayai oleh *Djokjasche Jaarmarkt Vereeniging* untuk mengikuti pelatihan praktis di laboratorium keramik Departemen Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan di Bandung. Hasil yang dibawa pulang adalah berbagai macam barang yang dibuat di Bandung, termasuk percobaan yang gagal untuk mengingat metode yang tidak boleh digunakan di masa mendatang.

190 *Algemeen Handelsblad Voor Nederlandsch-Indië*, 14 Mei 1928.

Pendidikan di Bantul

Pendidikan merupakan ruang yang penting dalam sebuah perkembangan kebudayaan. Sejak abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda sudah menetapkan mengenai undang-undang pendidikan ini. Namun, hanya sebagian kecil orang-orang di kalangan bumiputra yang dapat mengenyam pendidikan tersebut. Baru pada awal abad ke-20, ketika Politik Etis digaungkan untuk pendidikan, kalangan bumiputra dapat berkembang.[191]

Di Bantul, menurut sumber sejarah, sekolah pertama kali didirikan pada 1889-1893. Sekolah tersebut berbentuk sekolah swasta untuk kaum bumiputra yang berdiri di daerah Imogiri, Jejeran, Kretek, Bantul, dan Godean. Pada tahun tersebut keadaan sekolah masih sederhana. Biaya dari pendirian sekolah ini berasal dari bantuan Kasultanan Yogyakarta, baik untuk pengadaan alat pengajaran maupun gaji untuk staf pengajar. Di pertengahan 1906, diputuskan untuk memperluas pendidikan swasta bagi kaum bumiputra. Perluasan pendidikan tersebut didanai oleh pemerintah kolonial dan Kasultanan Yogyakarta. Karena masih pada tahun-tahun awal pendirian, maka bangunan sekolah masih merupakan bangunan sewa, belum milik sendiri.

Pada Januari 1908, sekolah di Bantul mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan berdirinya *De Tweede Inlandsche-school*. Pendirian sekolah tersebut berdasarkan keputusan dari Direktur Pendidikan, Pengabdian, dan Perindustrian pada 14 Januari 1908, Nomor 529. Berdasarkan keputusan tersebut, *Inlandsche-school* mendapatkan anggaran dana pendidikan sebesar *f*20 per bulannya.[192]

---

191 Dadang Supardan, "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis", *Generasi Kampus*, Vol.1, No.2, 2008, hlm. 98–99.

192 "Nota omtrent het Inlandsche onderwijs in de Residentie Jogjakarta", Memorie van Overgave, 1908, hlm. 1–11.

Salah satu sekolah di Bantul yang telah berdiri sejak era kolonial Belanda adalah SD Jarakan. SD yang beralamat di Jalan Bantul km 5, Kweni, Panggungharjo, Sewon ini merupakan bangunan peninggalan era kolonial yang sampai sekarang masih berfungsi sebagaimana sediakala, yakni Sekolah Rakyat (SR). Berdasarkan informasi yang terdapat pada Data Pokok Pendidikan Kemendikbudristek, SK izin operasional SD Jarakan bertanggal 1 Januari 1910.[193] Sekolah ini berhasil bertahan dan berkembang melewati zaman demi zaman. Kini, SD Jarakan terbagi menjadi dua unit, yakni unit utara dan unit selatan.[194]

Informasi mengenai pendidikan di Bantul mulai banyak ditemukan pada dekade kedua abad ke-20. Sebagai contoh, *Inlandsche-school* yang didirikan di Bantul mulai mengenalkan mata pelajaran baru kepada para siswa. Mata pelajaran tersebut berupa mata pelajaran kerajinan tangan. Hal ini selaras dengan perkembangan kerajinan di Bantul yang semakin marak pada periode tersebut. Pembaharuan mata pelajaran itu diterima dengan antusias oleh para siswa di sekolah untuk kalangan bumiputra. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran praktik dengan membuat anyaman bambu, gerabah, membatik, dan lain sebagainya.[195]

Kemudian, pada rentang 1926–1934 pendirian sekolah di Kota Bantul mulai menjamur. Di Srandakan misalnya, telah didirikan sekolah pada 30 Maret 1927 dengan murid sebanyak 75 siswa. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang didirikan oleh *Vereeniging Islamia*.[196] Berikutnya juga dibangun sekolah khusus untuk guru di

193 Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/284FBCCB1EFE50B9184E diakses pada 30 November 2023.

194 Imtiyaz Putri Hanifa, dkk. 2022. Sejarah Kampung: Antologi Riwayat Kampung di Panggungharjo. Yogyakarta: Pandiva Buku hlm. 59

195 *De Indische Courant*, 29 September 1926.

196 *De Locomotief*, 30 Maret 1927.

Bantul. Sekolah ini diperuntukan bagi orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikannya di *Tweede Inlandsche-school*. Di dalam mengenyam pendidikan khusus untuk guru tersebut dibutuhkan waktu setidak-tidaknya dua tahun. Selain di Kota Bantul, sekolah tersebut juga dibangun di Sedayu.[197] Bupati Bantul kemudian mendirikan 'Tjandra Armara', sebuah perkumpulan pendukung pendidikan untuk kalangan bumiputra.[198]

Secara umum data pendidikan di Bantul pada masa kolonial tidak terlalu banyak. Hanya ditemukan data-data mengenai pendidikan untuk kalangan bumiputra. Namun, dari sumber tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan di Bantul berkembang dengan baik pada awal abad ke-20. Perkembangan tersebut tidak lain juga dipengaruhi oleh kebijakan Politik Etis berkaitan dengan edukasi.

Bangunan yang dulu dipakai untuk sekolah masa Belanda, saat ini difungsikan sebagai Ruang Koperasi
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

197 *De Locomotief*, 02 Juli 1928.
198 *De Locomotief*, 12 September 1917.

Kapel Adorasi Ekaristi di Ganjuran
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Pelesir di Parangtritis: Gaya Hidup dan Pariwisata Bantul

Istilah *plesir* atau pelesir merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu *plezier* atau *plezieren.* Arti kata tersebut adalah kesenangan atau bersenang-senang. Kegiatan ini sering kali dilakukan untuk menghindari rasa penat karena lelah dalam beraktivitas. Di dalam istilah lain, pelesir sendiri diartikan sebagai sebuah perjalanan bukan hanya tentang materi tetapi juga imateri. Perjalanan untuk memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi ketegangan, dan beristirahat. Pelesir kemudian menjadi suatu kegiatan atau bahkan gaya hidup bagi masyarakat kolonial. Pada masa ini, kegiatan pelesir juga terbatas, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki uang dan waktu. Pendukung kegiatan ini adalah adanya akomodasi, infrastruktur, serta objek wisata yang mewadahi.[199]

199 Wiretno, "Aktivitas Pelesir Orang-Orang Eropa di Surabaya Masa Kolonial (Abad 20)", *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, da Pengajarannya,* Vol.13, No.1, 2019, hlm. 15–16.

Pesanggrahan Parangtritis
Sumber: KITLV A49. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Kabupaten Bantul memiliki objek wisata yang telah terkenal semenjak masa kolonial, yaitu Pantai Parangtritis. Berdasar sejumlah artikel di koran Belanda, Parangtritis merupakan destinasi wisata yang banyak diminati pada masa kolonial. Pada awal abad ke-20, jembatan di atas Sungai Opak yang menghubungkan antara daerah Yogyakarta dengan Parangtritis dibentangkan. Hal ini mendukung berkembangnya pariwisata pada masa tersebut untuk mempermudah akomodasi dalam menjangkau Pantai Parangtritis.[200] Banyak wisatawan yang berasal dari luar daerah, seperti Semarang pun berkunjung

200 *De Locomotief*, 9 Maret 1937.

ke pantai ini. Wisatawan berkunjung tidak hanya sekadar untuk berwisata, tetapi juga melakukan tradisi kepercayaan. Hal ini seperti yang disampaikan pada surat kabar *De Locomotief* edisi 14 Juni 1928:

> "Redaktur kami dari Yogyakarta menyampaikan bahwa Go Oen Kwie, yang merupakan orang Tionghoa dari Semarang pergi ke Parangtritis bersama dengan dua orang wanita serta dua pelayannya. Untuk melakukan persembahan di pantai dan Goa Langse kepada Nyi Roro Kidul."[201] (*De Locomotief*, 14 Juni 1928).

Para anggota pemerintahan sedang bertamasya di Pantai Parangtritis, 1920.
Sumber: KITLV A443. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

201 "*Onze redacteur te Jogja meldt nog uit Solo, dat de Chinees Go Oen Kwie uit Semarang Vridag jl. met twee vrouwen en twee bedienden naar Parangtritis was gegaan om in Goa Langsee te ofteren aan de godun van het Zuiderstrand, Njai Loro Kidoel.*" *De Locomotief*, 14 Juni 1928.

Para siswa dari *De Huishoudschool te Jogjakarta* sedang mengadakan perjalanan *plesir* ke Pantai Parangtritis, 1932.
Sumber: KITLV A1067. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Dari gambar 7.3, 7.4, dan 7.5 dapat dilihat bahwa kegiatan tamasya sering kali dilakukan oleh orang-orang bumiputra kalangan menengah atas dan orang-orang Eropa. Hal ini karena ketersediaan waktu dan biaya yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan bertamasya ini juga sering kali menjadi suatu kegiatan tahunan bagi sekolah-sekolah yang ada. Bukan saja bertamasya, kegiatan sekolah seperti berkemah juga dilakukan di Pantai Parangtritis.[202]

Maalfeest: Pesta Perjamuan Makan oleh Industri Gula di Bantul

Industri gula selalu erat kaitannya dengan pembahasan dalam hal ekonomi. Pembahasan tersebut tidak jauh tentang buruh, sewa tanah, serta produksi hasil perkebunan. Padahal masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan, salah satunya pesta perjamuan makan ketika memperingati ulang tahun berdirinya pabrik-pabrik gula.

202 *De Locomotief*, 6 Agustus 1937.

Perjamuan makan ini kemudian dikenal dengan *'maalfeest'*. Setiap industri gula selalu melakukan kegiatan ini ketika hari jadi pabrik gula tiba.

Di dalam acara perayaan jamuan makan tersebut mengusung budaya Indis yang telah berkembang di abad ke-20. Seperti yang telah diketahui bahwa *rijsttafel*[203] merupakan jamuan makan yang paling terkenal di masa kolonial. Jamuan makan ini dikenal oleh orang Belanda dan bumiputra menengah atas sebagai jamuan makan yang terkesan mewah.[204] Acara *maalfeest* juga terinspirasi oleh kegiatan *rijsttafel*, sama-sama menghidangkan makanan dengan mewah dan porsi besar serta lengkap.

Pabrik Gula Kedaton Pleret Dihias untuk Mempersiapkan Acara *Maalfeest*.
Sumber: KITLV A629. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Menurut pemberitaan *De Preanger Bode* edisi 18 Mei 1911, disampaikan bahwa Pabrik Gula Bantul telah merayakan pesta untuk

203 *Rijsttafel* merupakan acara jamuan makan yang berisi hidangan nasi lengkap dengan lauk-pauk yang disajikan dalam meja yang besar. Tampilan penataan meja tersebut diadopsi dengan gaya barat. Hidangan yang disajikan merupakan hidangan Indonesia dan Eropa bahkan hidangan perpaduan Indonesia-Eropa, seperti semur, perkedel, lapis legit, dan pastel. Lihat Fadly Rahman, *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial, 1870-1942*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 2.

204 Fadly Rahman, *Rijsttafel: Budaya Kuliner..., Ibid.*, hlm. 2.

memperingati 50 tahun berdirinya pabrik gula tersebut. Kantor pabrik gula dihias dengan begitu indah untuk menyambut perayaan ini. Pesta jamuan makan disediakan dengan berisi macam-macam hidangan khas Nusantara. Jamuan makan ini hanya dihadiri oleh orang Eropa serta kalangan bangsawan bumiputra yang terlibat dalam industri gula. Setelah acara jamuan makan selesai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit dan wayang orang yang diiringi dengan musik tradisional Jawa, yaitu gamelan. Di hari berikutnya, Pabrik Gula Bantul juga masih menyelenggarakan acara *maalfeest* bersama warga setempat serta dilanjutkan dengan permainan tradisional. Acara tersebut disambut meriah baik pegawai, pemilik, kolega, maupun warga setempat.[205]

Acara yang sama juga diadakan oleh Pabrik Gula Kedaton Pleret. Di dalam acara tersebut, selain diadakan jamuan makan, juga diadakan pemutaran film (*bioscoop*) yang dapat dinikmati oleh para tamu undangan dan warga setempat.[206] Pada gambar 7.6 ditampilkan bahwa Pabrik Gula Kedaton Pleret telah dihiasi guna menyambut perayaan hari jadi pabrik.

Tidak sampai di situ saja, Pabrik Gula Gesikan pun juga menggelar jamuan makan begitu mewah.

> "Pada Hari Minggu, pesta selama dua hari diselenggarakan untuk penduduk setempat dan pegawai pabrik. Telah disiapkan 45 meja dengan penuh hidangan dan air limun yang sebelumnya telah diawali dengan doa dan permohonan berkah untuk pemanenan tebu serta penggilingan selanjutnya."[207] (*De Locomotief* edisi 24 Juni 1926).

---

205 *De Preanger Bode*, 18 Mei 1911.

206 *De Locomotief*, 29 Juni 1933.

207 *"Maandag a.s. gaat Gesiekan (en Magoewo, 't bij behoorende rietland) snijden en Dinsdag a.s. malen. Gister werd de tweedaagsche fuif voor de bevolking besloten met een feestmaaltijd van ca. 45 pirings en gekleurde flesschenlimonade, die eergister, met gebed en smeeking om zegen over 't riet en 't malen was ingezet." De Locomotief*, 24 Juni 1926.

Berkembangnya budaya pada abad ke-20 tersebut menampilkan adanya modernisasi, perekonomian negara yang baik, serta berkembanganya pendidikan yang memberikan wajah baru dalam kehidupan masyarakat kolonial. Pembentukan atas citra maupun simbolisasi mengenai budaya mewah dalam menyajikan makanan merupakan bagian merepresentasikan citra kelas sosial tertentu.[208]

Acara Jamuan Makan Salah Satu Pabrik Gula di Jawa.
Sumber: KITLV 151289. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/

Perdagangan

Pada masa kolonial, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah jajahan. Pasar bahkan menjadi sebuah pusat perekonomian masyarakat. Pada masa itu, Pasar Gedhe menjadi pasar yang paling terkenal di Yogyakarta.[209]

208 Gregorius Andika Ariwibowo, "Budaya Makan di Luar Rumah di Perkotaan Jawa pada Periode Akhir Kolonial", *Jurnal Kapata Arkeologi*, Vol.12, No.2, hlm. 202.

209 Siti Mahmudah Nur Fauziah, "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756–1941", *Lembaran Sejarah*, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm.175.

Pasar-pasar lokal juga bekembang pada setiap distrik di Yogyakarta, tidak terkecuali di wilayah Bantul. Sejak abad ke-19, Bantul telah memiliki pasar-pasar besar di antaranya ialah Pasar Mangiran, Pasar Imogiri, dan Pasar Kadiraja.[210] Namun tidak hanya itu, di Bantul juga terdapat bermacam pasar, seperti pasar yang berdiri permanen di daerah distrik, maupun pasar tiban di desa-desa.

Harga Kebutuhan Pangan di Pasar Imogiri, 1931 (per pikul)[211]

Nama Barang	Harga (dalam gulden)
Padi	3,30
Beras penjualan orang desa	6,12
Beras penjualan orang Tionghoa	5,42
Jagung pipil	1,27
Gaplek	0,19
Kacang tanah	1,90
Kedelai hitam	4,09
Daging	30,88

Sumber: Surat Kabar *Aksi* edisi 24 Februari 1931.

Harga Kebutuhan Pangan di Pasar Turi, 1931 (per pikul)

Nama Barang	Harga (dalam gulden)
Padi	2,68
Jagung pipil	1,09
Gaplek	0,59
Kacang tanah	0,30
Kedelai hitam	4,41
Daging	17,25
Singkong	0,46

Sumber: Surat Kabar *Aksi* edisi 24 Februari 1931.

Di pasar-pasar yang ada di Bantul banyak ditemui penjual yang menjual hasil pertanian. Kegiatan jual-beli di pasar ini banyak diberitakan dalam surat kabar kolonial, misalnya, di Pasar Mangiran,

210 Vincent J.H. Houben, *Keraton dan Kumpeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870,* (Yogyakarta: Mata Bangsa 2017), hlm. 571–572.

211 Satu pikul setara dengan 60 kilogram.

Pasar Jodog, dan Pasar Godean saat dipenuhi dengan penjual yang menjual singkong, gaplek, ubi, kacang hijau, dan kedelai.[212]

Pasar Jodog Saat Ini
(Dokumentasi Foto Early Danendra, 2023)

Harga barang pada setiap pasar berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan barang dan biaya produksi barang. Harga padi di Pasar Turi lebih murah dibandingkan dengan harga padi di Pasar Imogiri. Sawah di daerah Turi, Onderdistrik Bambang lebih luas sehingga hasil pertanian padi sawah lebih banyak. Sebaliknya, harga gaplek di Pasar Imogiri lebih murah dibandingkan dengan Pasar Turi. Sebagian besar wilayah Imogiri memiliki tanah dengan sifat ladang kering lebih cocok ditanami singkong, jagung, dan tanaman ladang lainnya.

212 *De Locomotief*, 22 Januari 1935.

BAB 8

BANTUL PADA AKHIR MASA KOLONIAL

Pada akhir masa kolonial, Bantul menjadi daerah yang sudah modern dengan kegemilangan sektor industri di sekelilingnya. Tidak hanya sektor industri gula saja, melainkan industri-industri kerajinan yang berbasis rumahan. Namun, puncak kegemilangan ini tidak bertahan lama. Semua yang telah terbangun dengan sempurna itu runtuh ketika depresi ekonomi dunia 1930-an melanda seluruh wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Bantul.

Depresi Ekonomi 1930-an

Depresi ekonomi pada 1930-an adalah sebuah fase signifikan dalam sejarah, bahkan menjadi fokus dalam penelitian sejarah. Periode depresi ekonomi dimulai pada sekitar 1929 dan mereda pada 1939. Di dalam konteks sejarah, fase ini memiliki makna historis yang mencakup beberapa hal, yaitu:

a. berdampak besar terhadap perekonomian dan aktivitas masyarakat di Indonesia kolonial;

b. memengaruhi evolusi politik di wilayah kolonial Indonesia; dan
c. mendorong pemerintah kolonial untuk mengakhiri kebijakan Politik Etis.[213]

Depresi ekonomi ini memiliki dampak signifikan bagi Hindia-Belanda pada periode tersebut. Harga komoditas di wilayah ini mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya permintaan barang, menyebabkan krisis keuangan akibat kurangnya pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dampaknya, kondisi sosial ekonomi seperti peluang kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat mengalami penurunan yang drastis. Dampak-dampak tersebut berpengaruh negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Hindia-Belanda, tidak terkecuali berdampak pula bagi penduduk di wilayah Bantul. Keadaan ini pun semakin diperparah dengan musim kemarau yang melanda wilayah ini beberapa kali, yaitu pada 1930, 1934, 1935, dan 1939. Hal tersebut menyebabkan paceklik gagal panen pada sektor agraris.[214]

Terhantam Krisis Malaise: Kemunduran Industri Gula

Sektor yang paling terdampak oleh depresi ekonomi 1930 adalah sektor perkebunan, terutama perkebunan tebu, yang mengalami pengurangan lahan penanaman yang signifikan. Di Hindia-Belanda, antara 1931 hingga 1935, luas lahan penanaman tebu menyusut drastis dari 200.831 hektar menjadi hanya 27.578 hektar. Dengan kata lain, luas lahan yang digunakan untuk penanaman tebu tidak mencapai 50% dari total lahan penanaman pada 1931.[215]

---

213 Abdul Wahid, *Bertahan di Tengah Krisis Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon,* (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 3.
214 Dhita Fitria Hernawati, "Bantul pada Masa Depresi Ekonomi 1929-1939", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2023, hlm. 46.
215 *Ibid.*, hlm. 56.

Selama masa depresi ekonomi, terjadi pengurangan lahan perkebunan. Sebagai contoh, Pabrik Gula Gesikan mengurangi luas tanah perkebunannya sebesar 309 hektar. Pada 1930, ada 909 hektar tanah yang bisa digunakan untuk menanam tebu, tetapi pada 1936, hanya tersisa 600 hektar. Tindakan serupa juga dilakukan oleh pabrik gula lain seperti Pabrik Gula Bantul, Gondang Lipuro, Padokan, Barongan, dan Kedaton Pleret. Pengurangan lahan ini terkait dengan kebijakan pembatasan ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi situasi di pasar di mana harga komoditas ekspor seperti gula, karet, teh, dan kina mengalami penurunan drastis. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan ordonansi untuk mengawasi dan membatasi jumlah produksi dan ekspor barang. Karena pembatasan ini, stok gula yang telah diproduksi sebelumnya menumpuk. Gudang-gudang di pabrik gula menjadi penuh dengan hasil produksi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, gudang-gudang baru didirikan, namun masalah masih tetap ada. Gumpalan gula yang sudah lama disimpan akhirnya menjadi rusak karena terlalu lama disimpan. Akibat dari pengurangan produksi dan lahan perkebunan ini, beberapa industri gula yang ada di Bantul terpaksa ditutup.[216]

Di Bantul, situasi sulit terjadi pada pabrik gula seperti Wonocatur dan Kedaton Pleret yang terpaksa ditutup. Konsekuensi penutupan Pabrik Gula Gesikan juga dirasakan sekitarnya, meskipun masih ada upaya untuk mengatasi sebagian dari dampak tersebut di Gondang Lipuro. Hal tersebut menciptakan situasi sulit di kawasan itu, karena keberadaan pabrik-pabrik memiliki peran penting dalam perekonomian dan lapangan kerja lokal. Meskipun ada usaha untuk mengurangi dampak negatifnya di Gondang Lipuro, keputusan untuk

216 *Ibid.*, hlm. 57.

menutup pabrik-pabrik gula itu tetap memiliki efek merata di seluruh daerah, sehingga menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan ekonomi setempat.[217]

Setelah penutupan Pabrik Gula Bantul, hasil panenan tebu yang tersisa milik pabrik gula tersebut dialihkan ke Pabrik Gula Gondang Lipuro. Pabrik Gula Bantul secara resmi ditutup permanen pada 1937. Kendati lahan-lahan di Bantul termasuk yang terbaik di Jawa untuk produksi gula, eksploitasi yang menguntungkan tidak mungkin dilakukan karena luas lahan yang terbatas, hanya sekitar 500 hektar.[218]

Penutupan pabrik-pabrik di Bantul juga berdampak bagi kelangsungan Pabrik Gula Cebongan dan Padokan. Kendati mesti berhadap-hadapan dengan beragam situasi yang tak menentu, kedua pabrik tersebut masih dapat beroperasi untuk memproduksi gula. Sempat terpuruk, Pabrik Gula Padokan berhasil meningkatkan produksi yang signifikan dengan memanfaatkan fasilitas dari pabrik-pabrik gula Demak Ijo dan Rewulu yang telah ditutup. Setelah perluasan tersebut, Padokan sempat digadang-gadang menjadi pabrik gula terbesar di Yogyakarta.[219]

Kenaikan Harga Bahan Pangan

Masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Bantul bergantung pada hasil pertanian ladang, baik di sawah maupun pekarangan rumah, sebagai sumber utama penghidupan. Selama masa depresi ekonomi, hasil pertanian ini menjadi landasan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk daerah tersebut. Terutama, harga komoditas pertanian seperti beras mengalami kenaikan yang

217 *De Indische Courant*, 24 Februari 1933.
218 *De Locomotief*, 29 Oktober 1937.
219 *ibid.*

signifikan pada awal 1930. Mula-mula beras berkualitas baik dihargai sekitar *f*3,10 pada Oktober 1933, tetapi kemudian melonjak tajam menjadi *f*4,45 pada bulan 1934. Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh kelangkaan beras yang dihadapi wilayah Bantul selama masa depresi ekonomi akibat dampak dari musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan gagal panen padi, sehingga Kabupaten Bantul kesulitan untuk memenuhi kebutuhan beras penduduknya.[220]

Singkong telah menjadi komoditas yang sangat penting pada masa tersebut karena berperan sebagai alternatif utama untuk beras dalam kebutuhan pangan. Meskipun harga singkong mengalami kenaikan, namun harga tersebut tetap lebih terjangkau dibandingkan dengan harga beras. Lebih lanjut, dari segi budidaya, singkong tidak memerlukan sejumlah besar air seperti padi, yang membutuhkan irigasi yang intensif selama proses penanaman. Terjadinya kenaikan harga juga dipengaruhi oleh faktor distribusi barang, seperti peningkatan biaya produksi akibat pengiriman singkong atau beras dari wilayah lain.[221]

Penurunan hasil panen yang dimaksud terjadi pada November 1930 disebabkan oleh datangnya musim kemarau. Wilayah ini hampir tidak mendapatkan curah hujan, sementara para petani telah menanam tanaman palawija dan padi *gaga*. Kemarau dimulai sejak Oktober 1930, dan sebagai akibatnya, sumur-sumur warga juga mengalami kekeringan.[222]

---

220 Dhita Fitria Hernawati, "Bantul pada Masa…", *op.cit.*, hlm. 48.
221 *Ibid.*, hlm. 49.
222 Dhita Fitria Hernawati, "Bantul pada Masa…", *Ibid.*, hlm. 49.

Harga Kenaikan Bahan Pangan 1933–1934.

Nama Jenis Barang	Oktober 1933	Agustus 1934	September 1934	Oktober 1934
Beras Desa No. 2	ƒ3.10	ƒ3.52	ƒ3.53	ƒ4.45
Beras Desa No. 3	ƒ2.83	ƒ3.05	ƒ3.14	ƒ4.06
Jagung Pipil No. 1	ƒ1.69	ƒ2.54	ƒ2.65	ƒ2.92
Jagung Pipil No. 2	ƒ1.35	ƒ2.02	ƒ2.23	ƒ2.30
Gaplek	ƒ0.65	ƒ1.25	ƒ1.36	ƒ1.88
Singkong No. 1	ƒ0.38	ƒ0.78	ƒ0.72	ƒ0.72
Singkong No. 2	ƒ0.27	ƒ0.53	ƒ0.53	ƒ0.50
Kacang Tanah No. 1	ƒ1.95	ƒ2.67	ƒ3.10	ƒ2.71
Kacang Tanah No. 2	ƒ1.05	ƒ1.90	ƒ2.35	ƒ1.97
Kedelai Putih No. 1	ƒ4.05	ƒ3.78		ƒ4.26
Kedelai Putih No. 2	ƒ3.49	ƒ3.01	ƒ3.55	ƒ3.63
Kedelai Hitam No. 1	ƒ2.80	ƒ3.30	ƒ3.18	ƒ3.26
Kedelai Hitam No. 2	ƒ2.52	ƒ2.78	ƒ2.65	ƒ2.75

Sumber: Dhita Fitria Hernawati, "Bantul pada Masa Depresi Ekonomi 1929–1939", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2023, hlm. 49.

Berdasarkan tabel 8.1, pada 1933–1934 terjadi kenaikan harga makanan pokok, terutama beras. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa kenaikan tersebut disebabkan oleh kelangkaan barang akibat gagal panen. Gagal panen tersebut terjadi karena musim kemarau yang terjadi berulang kali sepanjang 1930-an. Selain itu, hal tersebut disebabkan oleh adanya hama yang memicu penurunan produktivitas tanaman pertanian.

Secara umum di akhir masa kolonial ini perekonomian di Bantul

mengalami kemunduran terutama pada sektor industri gula. Banyak pabrik gula yang terpaksa tutup akibat depresi ekonomi 1930-an. Penderitaan akibat peristiwa ekonomi tersebut juga diperparah dengan situasi wilayah yang kurang baik, yaitu terjadinya musim kemarau panjang pada periode tersebut. Hal tersebut memicu naiknya harga makanan pokok yang mempersulit kelangsungan bagi penduduk di Kabupaten Bantul.

PENUTUP

Buku sejarah Bantul ini berupaya untuk merekam situasi historis dalam kurun waktu pasca runtuhnya Istana Mataram di Pleret era Amangkurat Agung hingga akhir masa kolonial Belanda. Wilayah yang juga dikenal dengan sebutan Gading Mataram ini menjadi bagian penting dari eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Hal tersebut merupakan efek domino dinamika politik kewilayahan—terutama karena situasi krusial pada saat dan setelah Perang Diponegoro, hingga perubahan-perubahan sosial ekonomi di wilayah Bantul dampak Undang-Undang Agraria 1870.

Pada abad ke-19, wilayah Bantul dalam catatan-catatan kolonial sering kali disebut dengan nama Bantool atau kemudian menjadi Bantoel. Di dalam catatan lokal, nama Bantoel Karang sering kali juga disebutkan. Namun, secara umum, sebelum 1831, Bantul sebagai wilayah administratif belum ada. Pembagian wilayah (*wewengkon*) pasca-Perang Jawa secara formal dan modern—karena pengaruh dan tekanan pemerintah kolonial Belanda—membuat hadirnya kabupaten (*regentschap*) baru di Kasultanan Yogyakarta, termasuk Bantul, yang dipimpin seorang bupati (*regent*) bergelar tumenggung. Dalam proses perkembangannya hingga awal abad ke-20, wilayah di bawahnya (*district*) mengalami perubahan. Dengan demikian,

seperti halnya kabupaten lain, wilayah Kabupaten Bantul dari periode 1831 hingga 1940-an terus berubah, mengalami penambahan dan pengurangan—karena pelepasan maupun penggabungan—jumlah *district* maupun desa.

Sekali lagi, meskipun secara formal administratif Kabupaten Bantul baru ada pada 1831, tetapi cikal bakal wilayah ini sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Ketika pusat kuasa Mataram berpindah ke Kartasura dan saat Pangeran Mangkubumi mendirikan Kasultanan Yogyakarta, wilayah Kotagede, Kerto, Pleret, dan wilayah-wilayah lain dari sisi selatan (Pantai Selatan) hingga utara (Gunung Merapi) menjadi bagian inti wilayah kasultanan. Wilayah ini menjadi *negaragung* yang juga masih diakui sebelumnya di masa Kartasura sebagai wilayah penting, wilayah sakral. Wilayah ini juga dikenal sebagai Mataram Krajan yang jika diperluas jangkauannya dari arah barat–timur, membentang dari Bogowonto hingga Gunungkidul. Di dalam wilayah Mataram Krajan yang luas tersebut, dikenal juga wilayah Gading Mataram yang meliputi sisi timur Sungai Progo hingga sisi barat Gunungkidul. Wilayah-wilayah Gading Mataram itulah yang nantinya menjadi bagian penting dari eksistensi Kabupaten Bantul sebagai wilayah dari Kasultanan Yogyakarta pasca-Perjanjian Giyanti 1755. Sebuah kawasan yang tidak sepenuhnya kosong tanpa penghuni dan bukan menjadi semacam *terra incognita* bagi orang-orang Mataram Kartasura maupun Belanda.

Mataram Krajan, bahkan bekas reruntuhan pusat kerajaan di Kotagede, Kerto, dan Pleret, masih bisa dikenali sebelum Kasultanan Yogyakarta berdaulat. Wilayah bekas Ibu Kota Mataram tersebut menjadi pemukim-pemukim pendukung Pangeran Puger (Sunan Paku Buwono I) dan memiliki pemimpin seorang tumenggung.

Wilayah itu, selama periode Kartasura menjadi tanah lungguh para pangeran di Kartasura. Para pemukim berikut tumenggungnya kemudian menjadi pendukung Pangeran Mangkubumi. Wilayah-wilayah di selatan kraton Yogyakarta— beberapa di antaranya Pleret, Imogiri, Bantoel Karang, Selarong, Srandakan, Pantai Selatan (Goa Langse)—menjadi bagian penting dari perjalanan Pangeran Diponegoro sebagai *santri lelana* mengembara bersama pengikutnya mengobarkan Perang Jawa.

Setelah perang Jawa dan hadirnya perkebunan-perkebunan Eropa, terutama tebu di Yogyakarta—setelah wilayah-wilayah administratif kabupaten terbentuk—wilayah Bantul, tidak terkecuali, mengalami perubahan ekologi desa. Kebun-kebun tebu hadir dan membuat masyarakat menjadi buruh perkebunan serta dalam perkembangannya—sejak kejayaan gula paruh kedua abad ke-19 hingga paruh pertama abad ke-20—di wilayah Bantul berdiri setidaknya delapan pabrik gula. Perlahan-lahan modernitas hadir di wilayah Bantul yang membawa dampak pada munculnya transportasi baru: kereta api.

Perusahaan-perusahaan swasta kolonial Belanda membangun jaringan-jaringan rel kereta api, seperti jalur Yogyakarta—Pundong atau Yogyakarta—Srandakan—Brosot, yang membelah wilayah-wilayah Bantul. Jalur-jalur rel tersebut memudahkan pengangkutan komoditas ekspor Eropa—terutama gula—dari pabrik-pabrik gula di Bantul. Tidak hanya untuk angkutan barang, kereta api juga bisa digunakan untuk mobilitas masyarakat dengan segregasi rasial kolonial: kelas satu bagi orang Eropa; kelas dua bagi bangsawan bumiputra, Tionghoa, dan Arab; sementara kelas tiga atau empat untuk orang-orang bumiputra biasa.

Jaringan rel mengharuskan pembangunan stasiun sebagai pusat

pemberhentian kereta api dan stasiun-stasiun kereta api baru dan modern ini menjadi magnet aktivitas ekonomi, terutama pasar. Di samping menciptakan buruh-buruh gula akibat perkebunan dan industri gula, rententannya, dengan adanya jaringan rel, kereta api dan stasiun, hadir pula jenis buruh baru bagi kalangan bumiputra: buruh kereta api. Dua jenis buruh tersebut pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sudah hadir di wilayah Kabupaten Bantul, dan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Eropa di Yogyakarta.

Buku ini juga merekam efek-efek lain yang muncul sebagai dampak modernisasi—dengan ditopang industri gula dan transportasi—yakni perubahan gaya hidup. Perjamuan-perjamuan makan, terutama dilakukan orang-orang Eropa dan Indo, diadakan di pabrik-pabrik gula. Pariwisata—*plesiran*—menjadi populer. Orang-orang Indo-Eropa pemilik perkebunan atau pejabat kolonial, termasuk pejabat bumiputra, *plesir* ke objek wisata, terutama Pantai Parangtritis. Para bumiputra terdidik (siswa sekolah) juga berkunjung ke pantai untuk tamasya.

Masa emas ekonomi gula itu akhirnya remuk redam ketika gelombang krisis ekonomi menerpa dunia, dan menyambar Hindia Belanda pada dekade 1929–1939. Selama masa tersebut, beberapa pabrik gula di wilayah Bantul baik milik kalangan Indo-Eropa maupun kalangan bumiputra merasakan dampak yang sama: terpuruk dan ambruk!

DAFTAR PUSTAKA

Manuskrip

Adresboek van Nederlandsch-Indië voor den handel. Rotterdam: Nijgh and van Ditmar, 1884.

Almanak en Naamregister van Nederlandsch-indie voor 1855. Batavia: Ter Lands-Drukkerrij.

Bevolking en indeelingstaat van Java en Madura, volgens officiële opgaven. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1866.

Naamlijst der Europesche Inwoners van Nederlandsch-Indie en Opgave Omtrent hun Burgerlijken Stand Voor 1877.

"Nota omtrent het Inlandsche onderwijs in de Residentie Jogjakarta", Memorie van Overgave, 1908.

Regeerings Almanak Nederlandsch-Indie 1884 I. Batavia: Landsrukkerijk, 1884.

Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie 1912. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912.

Serat Babad Soerjèngalagan. PB.E.9, S.153. Ditulis dengan aksara latin. Yogyakarta: Museum Sonobudoyo.

Verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-General, 1863-1864.

Verslag van het beheer en den staat der kolonien over 1855. Verslag. (Oost-Indie). No.2.

Verslag van het beheer en den staat der Oost-Indische bezittingen over 1860. Verslag. No.2.

Majalah dan Surat Kabar

Aksi edisi 24 Februari 1931.

Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie, 14 Mei 1928.

Bataviaasch handelsblad, 22 Januari 1870.

De Indische Courant, 24 Juli 1924; 29 Desember 1928; 29 September 1926; 24 Februari 1933.

De Locomotief, 16 Februari 1866; 12 September 1917; 24 Juni 1926; 30 Maret 1927; 19 Agustus 1927; 7 Desember 1927; 14 Juni 1928; 2 Juli 1928; 29 Juni 1933; 22 Januari 1935; 9 Maret 1937; 6 Agustus 1937; 29 Oktober 1937.

De Preanger Bode, 18 Mei 1911.

Java Bode, 14 November 1868.

O'Malley, William Joseph. "Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta pada 1930-an". *Prisma,* No.8, 1983.

Buku, Jurnal, dan Tesis

Adrisijanti, Inajati. *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000.

Al-Islami, Artaqi Bi Izza. "Proketen dari Masa ke Masa" (naskah), 2023.

Ariwibowo, Gregorius Andika. "Budaya Makan di Luar Rumah di Perkotaan Jawa pada Periode Akhir Kolonial". *Jurnal Kapata Arkeologi,* Vol.12, No.2, 2016.

Ashari, Eko. "Jalur Kereta Api Yogyakarta-Srandakan: Kepentingan Kolonial dan Dampak Ekonomi Pada Masyarakat Sekitar (1895-1930)". *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah,* Vol. 11, No.1, 2020.

Athoillah, Ahmad, *Siwates dan Temon; Sejarah Sosial-Budaya Perbatasan di Kulon Progo,* Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo, 2020.

Bashori, Muhammad Hadi, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?,* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Bleeker, Pieter. *Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingstatistiek van Java,* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1870.

Bosma, Ulbe. "Sugar and Dynasty in Yogyakarta" dalam Ulbe Bosma, Giusty-Conterro dan Knight (ed.), *Sugarlandia Revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas,* New York: Berghahn Books, 2007.

Carey, Peter dan Vincent Houben, *Perempuan-perempuan Perkasa di Jawa Abad XVIII-XIX,* Jakarta: KPG, 2018.

Carey, Peter. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa* Jakarta: KPG/Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.

_____, *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855),* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.

Djamhari, Saleh As'ad. *Strategi Menjinakkan Diponegoro: Stelsel Benteng 1827-1830,* Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2014.

Dwidjasaraja, A.S. *Ngajogjakarta Hadiningrat. Djilid Satoenggal. Kraton Ngajogjakarta,* Yogyakarta: Mardi-Moelja, 1935.

Dwiyanto, Djoko. dkk. *Hari Jadi Yogyakarta,* Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, 2004.

Dwiyanto, Djoko. *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, & Teladan*

Perjuangannya , Yogyakarta: Penerbit Paradigma Indonesia, 2009.

Fauziah, Siti Mahmudah Nur. "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941". *Jurnal Lembaran Sejarah,* Vol. 14, No. 2, 2018.

Graaf, H. J. de dan Th.G.Th. Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram,* Jakarta: Penerbit PT Grafitipers, 1985.

Graaf, H.J. de. *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*, Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1986.

_____, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I,* Jakarta: Penerbit PT Grafitipers, 1987.

_____, *Runtuhnya Istana Mataram,* Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1987.

Groneman, J. *De Garĕbĕg's te Ngajogyåkartå,* 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1895.

Hadi, Kuncoro. "Trah Kajoran-Tembayat dalam Pergolakan Politik di Keraton Jawa tengah-selatan Abad XVII-XIX", dalam FX Domini BB Hera, *Urip iku Urub. Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.

Haryono, Anton. "Dari Keraton ke Pasar: Industri Pribumi di Daerah Yogyakarta 1830-1930-an". *Jurnal Humaniora,* Vol. 21, No.1, 2009.

Hatmosoeprobo, Soehardjo, *Bupati-Bupati di Jawa pada Abad 19*, Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986.

Hermanu, dkk. *Suikerkultuur Jogja yang Hilang*, Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta, 2019.

Hernawati, Dhita Fitria. "Bantul pada Masa Depresi Ekonomi 1929-

1939". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gadjah Mada. 2023.

Houben, Vincent J.H. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017.

Kartodirdjo, Sartono. "Tjatatan Tentang Segi-Segi Messianistis dalam Sedjarah Indonesia", Penerbitan Lustrum ke II, Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1959.

_____. "Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia", Pidato Dies Natalis ke-18 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1967.

_____. *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014.

Katalog Pameran Seabad Kearsipan, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1992.

Knaap, Gerrit. *Chepas, Yogyakarta. Photography in the Service of the Sultan*, Leiden: KITLV, 1999.

Kumar, A. L. "The 'Suryengalagan Affair' of 1883 and Its Sucessors: Born Leaders in Changed Times", *Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 138, 1982.

Keulen, Gerard van, *Insulae Javae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando* Amsterdam; De Nieuwe brug met Privilegie, 1728.

Laksono, P.M., *Tradisi Dalam Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan dan Pedesaan: Alih-ubah Model Berfikir Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

M.D., Sagimun, *Pahlawan Dipanegara Berjuang (Bara Api Kemerdekaan nan tak Kunjung Padam)*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Margana, Sri. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769–1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-The Toyota Foundation, 2004.

Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lalu: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*,

Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1985.

_____. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI–XIX*, Jakarta: KPG, 2018.

Nitinegoro, R.M. Soemardjo. *Berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat* , Yogyakarta: t.p, 1981.

Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah. Priyayi dan Relasi di Keresidenan Madiun Abad XIX*, Jakarta: KPG, 2018.

Padmo, Soegijanto. "Depresi 1930-an dan Dampaknya Terhadap Hindia-Belanda". *Jurnal Humaniora*, No. 2, 1991.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017.

Priyatmoko, Heri, dkk. "Profil Para Raja Keraton Kasultanan Yogyakarta" (draft naskah). hlm. 95-97, 2022.

R.Ng. Ranggawarsita, *Serat Jangka Jayabaya*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.

Rahman, Fadly. *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial, 1870-1942.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Ricklefs, M.C., *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1793: Sejarah Pembagian Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Matabangsa, 2002.

_____. *War, Culture and Economy in Jawa 1677-1726: Asian and European Imperialisme*
in the Early Kartasura Period, Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 2003.

_____. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Penerbit PT Serambi, Ilmu Semesta, 2008.

_____. *Samber Nyawa: Kisah Perjuangan Seorang Pahlawan Nasional Indonesia, Pangeran Mangkunegara I (1726-1795)*,

Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.

Rouffaer, G.P. *Dunia Swapraja. Sketsa Sistem Pemerintahan, Agraria dan Hukum* (disadur M.Husodo Pringgokusumo), Yogyakarta: Kasan Ngali, 2021.

_____. *Vorstenlanden, Encyclopedie van Nederlandsch-Indie IV*, 's-Gravenhage-Leiden: Martinus Nijhoff-NV-E.J. Brill, 1921.

Setiawan, Nanang. "Dampak Sosial Ekonomi Transportasi Kereta Api Yogyakarta-Pundong Terhadap Masyarakat Kota Gede Tahun 1917-1942". *Jurnal Ilmu Sejarah,* Vol.2, No.2, 2017.

_____. *Sejarah Kereta Api di Yogyakarta 1917-1942.* Temanggung: Kendi, 2020.

Suhartono, "Kecu: Potret Perbanditan Sosial di Vorstenlanden 1850-1900", Seminar Sejarah Lokal di Medan 17–20 September 1984.

Supardan, Dadang. "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis". *Jurnal Generasi Kampus,* Vol.1, No.2, 2008.

Suryo, Djoko. "Kisah Senapati-Ki Ageng Mangir dalam Historiografi Babad" dalam T. Ibrahim Alfian, et.al (ed.). *Dari Babad dan Hikayat: Kumpulan Karanagn Dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartomo Kartodirdjo,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

_____. "Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900". Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. 1989.

_____. "Dari Vorstenlanden Ke DIY: Kesinambungan dan Perubahan", Konferensi Nasional Sejarah IX, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, 5 – 7 Juli 2011.

Susilantini, Endah, dkk. *Serat Angger Pradata Awal Dan Pradata Akir*

Di Kraton Yogyakarta Kajian Filologis Historis, Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2014.

Suwarno, P.J. *Pelestarian Peranan Ganda Bupati*, Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan Lembaga Javanologi, 1986.

_____. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974,* Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Suyami, dkk, *Kajian Budi Pekerti dalam Serat Jayabaya*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, 2015.

Veth, Pieter Johannes. *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie I,* Amsterdam: P. N. Van kampen, 1869.

Wahid, Abdul. *Bertahan di Tengah Krisis Komunitas Tionghoa dan Ekonomi Kota Cirebon.* Yogyakarta: Ombak, 2009.

Wahid, Abdul (ed.). *Bersinergi dalam Keistimewaan Peran Bank Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta*, Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2020

Wiretno. "Aktivitas Pelesir Orang-Orang Eropa di Surabaya Masa Kolonial (Abad 20)", *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya,* Vol.13, No.1. 2019.

Internet

"Galeri Foto Cagar Budaya (Bagian I)", https://disbud.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-bidang-warisan-budaya-galeri-foto-cagar-budaya-bagian-i

"Mengekspos Pesanggrahan Peninggalan Sultan Hamengku Buwana II", https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/mengekspos-pesanggrahan-peninggalan-sultan-hamengku-buwana-ii/

"Profil Dusun Madugondo", https://sitimulyo.bantulkab.go.id/first/artikel/392.

"Sejarah Bantul", https://www.oocities.org/h_artono/bantul/sejarah.htm

"Sejarah Bantul", https://bantulkab.go.id/tentang_bantul/index/2020030004/sejarah-bantul.html

"Sumbu Filosofi Yogyakarta, Pengejawantahan Asal dan Tujuan Hidup", https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting/21-sumbu-filosofi-yogyakarta-pengejawantahan-asal-dan-tujuan-hidup/

Wawancara

Wawancara kepada Mbah Mitro Mulyono (95 tahun), Dusun Tilaman, Wukirsari, Imogiri, Bantul, pada Jumat, 29 Agustus 2023.

المعهد الاسلامى على معصوم

PONDOK PESANTREN

Ali Maksum

KRAPYAK – YOGYAKARTA – INDONESIA

https://krapyak.org/

BIODATA PENULIS

Ahmad Athoillah, lahir di Sei Baru, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 16 Juni 1981. Menempuh Program S-1 Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta (2000-2006). Menempuh Program S-2 Ilmu Sejarah Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (2013-2015) dengan riset di *Unit Bibliothek* (UB) *Universiteid Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde* (KITLV) di Leiden, *Nationaal Archief* (NA), Den Haag dan *International Instituut voor Social Geshciedenis* (IISG) di Amsterdam. Menempuh Program Doktoral Ilmu-Ilmu Humaniora FIB UGM (2016-2021). Fokus kajian pada sejarah agama Asia Tenggara abad ke-19--20, sejarah lisan, dan sejarah lokal. Asisten pengajar di Departemen sejarah FIB UGM (2016-2018), peneliti sejarah tamu di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kulon Progo, Anggota Dewan Kebudayaan Kulon Progo (2020-2025), dan Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (2020-2025), dan Staf Pengajar di Departemen Sejarah FIB UGM sejak 1 Januari 2023. Beberapa karya diterbitkan pada buku, artikel surat kabar, dan jurnal ilmiah sejak tahun 2013. Tinggal di Sebo, RT. 77/ RW 36, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, DI. Yogyakarta, 55673 dan Perumahan Puspa Indah E 11 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Alamat email: athoilahmadgkp@gmail.com .

Kuncoro Hadi, lahir di Klaten pada April 1984 dan tinggal di Imogiri Bantul Yogyakarta. Selesai menempuh studi S-1 Ilmu Sejarah di UNY (2009) dan S-2 Sejarah di UGM (2017). Fokus kajian pada sejarah kebudayaan, politik kebudayaan, memori, serta sejarah kekerasan politik pra dan pascakolonial. Salah satu tulisannya yang berkaitan dengan fokus kajian yang terakhir itu adalah karya berjudul "Trah Kajoran-Tembayat dalam Pergolakan Politik di Keraton Jawa tengah selatan, Abad XVII-XIX" dalam buku festschrift, *Urip iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey* (editor: FX Domini BB Hera) yang diterbitkan Kompas pada 2019. Saat ini menjadi staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah, FISHIPOL, UNY.

Bayu Ananto Wibowo, lahir di Bandung, 27 Juli 1991. Telah menyelesaikan studi S-1 jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI dan S-2 jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini ia tengah menempuh program Doktoral Pendidikan Sejarah di Universitas Sebelas Maret. Ia juga menjadi salah satu Dosen Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Yogyakarta. Selain menyukai sejarah, ia aktif dalam berbagai forum dan organisasi yang berkaitan dengan sejarah. Untuk berkorespondensi dengannya dapat menghubungi akun Instagram @ananthabayu atau Facebook Bayu Anantha.

KABUPATEN BANTUL

Setelah tidak lagi menjadi pusat dari pemerintahan Mataram, wilayah Pleret dan sekitarnya—yang masa sekarang (2023) merupakan bagian dari Kabupaten Bantul—oleh G.P. Rouffaer diterangkan berubah nama menjadi Gading Mataram. Secara goegrafi, wilayah Gading Mataram merupakan kawasan di pesisir selatan, antara Sungai Bogowonto, Sungai Progo, dengan Sungai Opak. Wilayah inilah yang kemudian secara sosiologis memberikan dukungan politis kepada Pangeran Mangkubumi ketika mendirikan Kasultanan Yogyakarta setelah Perjanjian Giyanti 1755. Lebih dari itu, kawasan Gading Mataram kemudian berubah menjadi wilayah Kabupaten Bantoel Karang yang pemerintahannya dirintis setelah berakhirnya Perang Jawa.

Pasca Perang Jawa dan munculnya *cultuurstelsel*, secara umum pemerintah kolonial berusaha melakukan refeodalisasi kekuasaan bupati. Kekuasaan bupati atas desa dikembalikan, tetapi tidak seperti semula. Pengaruh dan kekuasaan bupati dipergunakan untuk menggerakkan ekonomi perkebunan yang berkembang di wilayahnya (indigo, nopal, kopi, dan tebu). Pada 1870, melalui *Agrarische Wet* perkebunan Indonesia mengalami perkembangan menuju proses industri. Perusahaan perkebunan di Indonesia adalah salah satu pilar ekonomi Hindia Belanda dan merupakan bagian integral dari eksploitasinya terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Perkebunan ini menjadi landasan bagi industri ekspor kolonial Belanda yang sangat menguntungkan. Bantul merupakan daerah *Vorstenlanden*, bahwa pada daerah ini tidak diterapkan sistem *cultuurstelsel*. Meskipun demikian, Bantul juga mengalami perkembangan dalam perekonomian industri perkebunan.

Selepas hadirnya aturan agraria 1870, wilayah Bantul mengalami perubahan lanskap tanah pedesaan. Para penyewa tanah Eropa (*landhuurder*) datang ke wilayah Bantul. Perkebunan-perkebunan nila kemudian berganti menjadi perkebunan-perkebunan tebu—termasuk juga tembakau—meluas dan bertahan hingga awal abad ke-20, sebelum meredup karena krisis ekonomi 1930-an. Saat itu bisnis gula merajalela, pabrik-pabrik didirikan di wilayah Bantul pada paruh kedua abad ke-19. Pada 1912, terdapat delapan pabrik gula yang beroperasi di distrik Imogiri, Jejeran, Srandakan Panggang, Kretek, dan Cepit dengan produksi puluhan ribu pikul dalam satu tahun (setidaknya pada akhir 1880-an).

DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN BANTUL
DANA KEISTIMEWAAN